



**RENCANA AKSI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA,
SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN,
WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011 - 2013**

DESEMBER 2010



**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA AKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA, SERTA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATRA
BARAT TAHUN 2011 - 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan di wilayah pasca bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Pada tanggal 25 Oktober 2010, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan No. 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA, SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATRA BARAT TAHUN 2011 - 2013

Pasal 1

Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2013, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami serta percepatan pembangunan wilayah di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat

Pasal 2

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2011

**KETUPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DR. SYAMSUL MAARIF, SIP, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT,
25 OKTOBER 2010

Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) kembali terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010 telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan. Akibat gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian diberbagai sektor pembangunan yang melanda 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap.

Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB dan Pusdalops PB Sumbar per tanggal 22 November 2010, bencana gempabumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Sikakap.

Jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit rumah dengan rincian kerusakan meliputi 879 unit rumah rusak berat, 116 unit rumah rusak sedang dan 274 unit rumah rusak ringan. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan sarana jalan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan resort.

Hasil penilaian kerusakan dan kerugian berdasarkan data per tanggal 22 November 2010, gempa bumi dan tsunami tersebut telah menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 348,92 milyar. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif dengan perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 117,82 milyar (33,9 % dari total nilai kerusakan dan kerugian), dimana hampir 80% kerusakan dan kerugian terjadi pada sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan. Kemudian diikuti kerusakan dan kerugian yang di alami sektor perumahan sebesar Rp. 115,82 milyar (33,2 %), sektor infrastruktur Rp. 19,16 milyar (5,50 %), sektor sosial Rp. 16, 03 milyar (4.60 %) dan lintas sektor Rp. 79,44 milyar (22,81 %).

Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai. Sesuai instruksi Presiden RI dan rekomendasi sektoral terhadap penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan relokasi permukiman masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai ke lokasi yang lebih aman. Disamping itu, kawasan Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang rawan bencana alam (gempa bumi dan tsunami) sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi bencana secara menyeluruh dalam menghadapi kejadian bencana di masa mendatang. Sehingga proses penilaian kebutuhan pemulihan wilayah pascabencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan dengan memperhitungkan aspek kebutuhan relokasi perumahan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana pendukungnya. Sehingga, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi mencapai Rp. 486,40 milyar, dimana lebih dari 50% merupakan kebutuhan untuk pembangunan rumah dan prasarana lingkungan permukiman dilokasi baru, yakni sebesar Rp. 250,54 milyar.

Dalam konteks **percepatan pembangunan**, wilayah Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah tertinggal. Diperkirakan dampak bencana gempa bumi dan tsunami tersebut akan semakin memperparah kondisi perekonomian serta sarana dan prasarana di wilayah Kepulauan Mentawai serta berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin sebesar 16,28 %. Untuk itu, proses pemulihan wilayah pascabencana di Kepulauan Mentawai perlu di intervensi dengan kebijakan-kebijakan khusus guna mengojar ketertinggalan dari daerah lain dengan strategi percepatan pembangunan, yang difokuskan untuk peningkatan dan pembangunan akses transportasi darat, laut maupun udara, yang diharapkan akan dapat mengurangi keterisoliran wilayah Kepulauan Mentawai serta dapat meningkatkan roda perekonomian wilayah tersebut. Melalui intervensi kebijakan percepatan pembangunan wilayah Kepulauan Mentawai, total kebutuhan percepatan pembangunan wilayah pascabencana gempabumi dan tsunami Mentawai mencapai Rp. 674,43 milyar.

Sehingga total keseluruhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah pascabencana di Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 1.160,83 milyar.

Potensi bencana alam di wilayah Kepulauan Mentawai yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) buah. Dilihat dari potensi ancaman bencana alam, Kepulauan Mentawai memiliki indeks risiko yang tinggi terhadap ancaman bencana alam, baik berupa gempa bumi (tektonik), tsunami maupun abrasi pantai. Dari 43 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 33 desa diantaranya terletak di daerah pesisir yang merupakan kawasan rawan terhadap bencana tsunami dan abrasi pantai. Namun, hal ini telah di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menerapkan

berbagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, yaitu dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD 2007-2011 Kabupaten Kepulauan Mentawai serta melakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis mitigasi bencana yang saat ini sedang dalam inisiasi proses penyusunan.

Kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan pertimbangan perencanaan yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kerangka pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di adalah **Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan pendekatan Relokasi permukiman** yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran 2011 dan 2012, pada daerah terdampak tsunami yaitu Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora; **Percepatan pembangunan** yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran 2012 dan 2013, terutama pada daerah terdampak tsunami dengan pendekatan penyediaan infrastruktur vital untuk membuka akses antar pulau termasuk Pulau Siberut.

Dengan pertimbangan skala dan dampak kerusakan serta kebutuhan percepatan pembangunan wilayah Kepulauan Mentawai, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan direncanakan akan berlangsung selama 3 tahun anggaran; yaitu dimulai dengan tahun anggaran 2011, selama tahun anggaran 2012 dan berakhir pada tahun anggaran 2013.

Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan percepatan pembangunan wilayah pasca bencana di Kepulauan Mentawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana yang bencana berasal dari: a) APBN, b) APBD; dan/atau c) Masyarakat. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten dan masyarakat. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai merupakan kebijakan yang di-integrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disusun melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BNPB dengan pertimbangan bahwa fungsi pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh kejadian bencana banjir bandang ini, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan di wilayah Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan dukungan dari kementerian/lembaga terkait yang di koordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan percepatan pembangunan dilakukan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana di setiap sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan percepatan pembangunan, sedangkan evaluasi pelaksanaan dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan percepatan pembangunan yang bersumber dari APBN dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengakhiran masa tugas dan kesinambungan pemulihan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan disusun sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran guna memastikan kesinambungan operasi dan pemeliharaan asset rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan lembaga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. **Kesinambungan pemulihan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi** menuju pembangunan yang lebih baik berkelanjutan (*Build Back Better*) dilaksanakan melalui integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang serta reformasi kelembagaan penanggulangan bencana sesuai amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1.1
1.1. LATAR BELAKANG	1.1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	1.3
1.3. RUANG LINGKUP	1.4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	1.4
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH BENCANA	11.1
11.1. KONDISI PERUMAHAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	11.4
11.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA	11.9
11.3. KONDISI PEREKONOMIAN	11.12
11.4. POTENSI BENCANA ALAM DAN TATA RUANG WILAYAH	11.20
BAB III PENANGANAN WILAYAH PASCABENCANA	111.1
111.1. PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	111.4
111.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI	111.10
111.3. PEMULIHAN AWAL	111.14
BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMULIHAN SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PASCABENCANA	114.1
114.1. PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	114.1
114.2. PERTIMBANGAN PERENCANAAN BAGI PEMULIHAN WILAYAH PASCABENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	114.6
114.3. RUANG LINGKUP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA DI MENTAWAI	114.15
114.4. REHABILITASI DAN RELOKASI DENGAN PENDEKATAN RELOKASI PEMUKIMAN ..	114.16
114.5. PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	114.21

IV.6.	SKIM PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN	IV.23
IV.7.	STRATEGI PENYELENGGARAAN RELOKASI PERMUKIMAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN	IV.25
IV.8.	JADWAL PELAKSANAAN PEMULIHAN PASCABENCANA TSUNAMI DI MENTAWAI	IV.28
BAB V	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA, SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS MITIGASI BENCANA ---	V.1
V.1.	PENDANAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V.1
V.2.	MEKANISME DAN KELEMBAGAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V.5
V.3.	PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN BENCANA	V.8
V.4.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V.11
V.5.	KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA --	V.14
BAB VI	PENUTUP	VI.1
VI.1.	ASPEK LEGAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	VI.1
VI.2.	JANGKA WAKTU RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	VI.2
VI.3.	ASPEK AKUNTABILITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN	VI.2

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1.	LOKASI KEJADIAN GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT	I.1
GAMBAR I.2.	WILAYAH TERKENA DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KEPULAUAN MENTAWAI	I.2
GAMBAR II.1.	PETA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	II.2
GAMBAR II.2.	PROSENTASE KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDRB KEPULAUAN MENTAWAI	II.14
GAMBAR II.3.	PROSPEK EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	II.18
GAMBAR II.4.	PETA INDEKS ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA	II.20
GAMBAR II.5.	PETA INDEKS ANCAMAN GEMPA BUMI DI INDONESIA	II.21
GAMBAR III.1.	DAMPAK KERUSAKAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010	III.5
GAMBAR IV.1.	STRATEGI PEMBANGUNAN RUMAH	IV.1
GAMBAR IV.2.	RENCANA RELOKASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN POROS	IV.11
GAMBAR IV.3.	PETA USULAN LOKASI RELOKASI PULAU PAGAI UTARA	IV.12
GAMBAR IV.4.	PETA USULAN LOKASI RELOKASI PULAU PAGAI SELATAN	IV.13
GAMBAR IV.5.	PETA USULAN LOKASI RELOKASI PULAU SIPORA	IV.14
GAMBAR V.1.	KERANGKA DASAR KELEMBAGAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KEPULAUAN MENTAWAI	V.5
GAMBAR V.2.	STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	V.6
GAMBAR V.3.	STRUKTUR ORGANISASI UPT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KEPULAUAN MENTAWAI	V.6
GAMBAR V.4.	SKIM PENYELENGGARAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	V.7
GAMBAR V.5.	MEKANISME REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NON-BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT	V.8

GAMBAR V.6.	MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH, PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR (KONTRAKTUAL) -----	V.9
GAMBAR V.7.	KERANGKA KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH --	V.17
GAMBAR V.8.	KONSTRUKSI RANGKA BAJA REKONSTRUKSI PERUMAHAN NAD - NIAS -	V.21
GAMBAR V.9.	PERMODELAN PEMBANGUNAN RUMAH KAYU TAHAN GEMPA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM -----	V.22
GAMBAR V.10.	PERMODELAN PEMBANGUNAN RUMAH TAHAN GEMPA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI -----	V.23
GAMBAR V.11.	PERMODELAN PEMBANGUNAN RUMAH RAMAH BENCANA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN -----	V.24
GAMBAR V.12.	PERMODELAN PEMBANGUNAN RUMAH TEMBOK TAHAN GEMPA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM -----	V.25

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.4
TABEL II.2	PENGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.5
TABEL II.3	KONDISI JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	II.6
TABEL II.4	JUMLAH PELABUHAN / DERMAGA DAN PPI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.7
TABEL II.5	JUMLAH KELAS GURU DAN MURID DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.9
TABEL II.6	DISTRIBUSI SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.10
TABEL II.7	FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.11
TABEL II.8	SEBARAN FASILITAS RUMAH IBADAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.12
TABEL II.9	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA 2007 – 2009 (JUTA RUPIAH)	II.13
TABEL II.10	KONDISI BIDANG PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.16
TABEL II.11	OBJEK WISATA DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2009	II.17
TABEL II.12	PROSPEK EKONOMI SEKTORAL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2007 – 2011	II.19
TABEL III.1	DATA KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KEPULAUAN MENTAWAI	III.5
TABEL III.2	IKHTISAR REKAPITULASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN (RP JUTA)	III.8
TABEL III.3	RINCIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PADA SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF (RP JUTA)	III.8

TABEL III.4.	REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PASCABENCANA DI KEPULAUAN MENTAWAI (RP JUTA) -----	III.11
TABEL III.5.	KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI -----	III.13
TABEL III.6.	PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMULIHAN AWAL PASCABENCANA DI KEPULAUAN MENTAWAI -----	III.14
TABEL IV.1	REKOMENDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA BAGI PENANGANAN PASCABENCANA DI MENTAWAI DAN DAERAH PASCABENCANA LAINNYA	IV.3
TABEL IV.2.	IKHTISAR KERUSAKAN DAN KERUGIAN PER SEKTOR AKIBAT TSUNAMI 25 OKTOBER 2010 -----	IV.7
TABEL IV.3.	RENCANA SISTEM PERKOTAAN -----	IV.8
TABEL IV.4.	DATA REKAPITULASI PENDUDUK BAGI RELOKASI PERMUKIMAN PASCABENCANA MENTAWAI -----	IV.8
TABEL IV.5.	SKIM SUMBER PENDANAAN -----	IV.24
TABEL IV.6.	JADWAL PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN -----	IV.28
TABEL V.1.	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN KOMPONEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA KOMPONEN PERCEPATAN -----	V.3
TABEL V.2.	MEKANISME PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER DANA APBN -----	V.11

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) kembali terjadi di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010 telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut tersebut telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang menurut informasi dari BPBD Provinsi Sumbar ketinggian gelombang mencapai 3 meter telah menghasilkan landaan tsunami sejauh 1 km ke arah daratan.

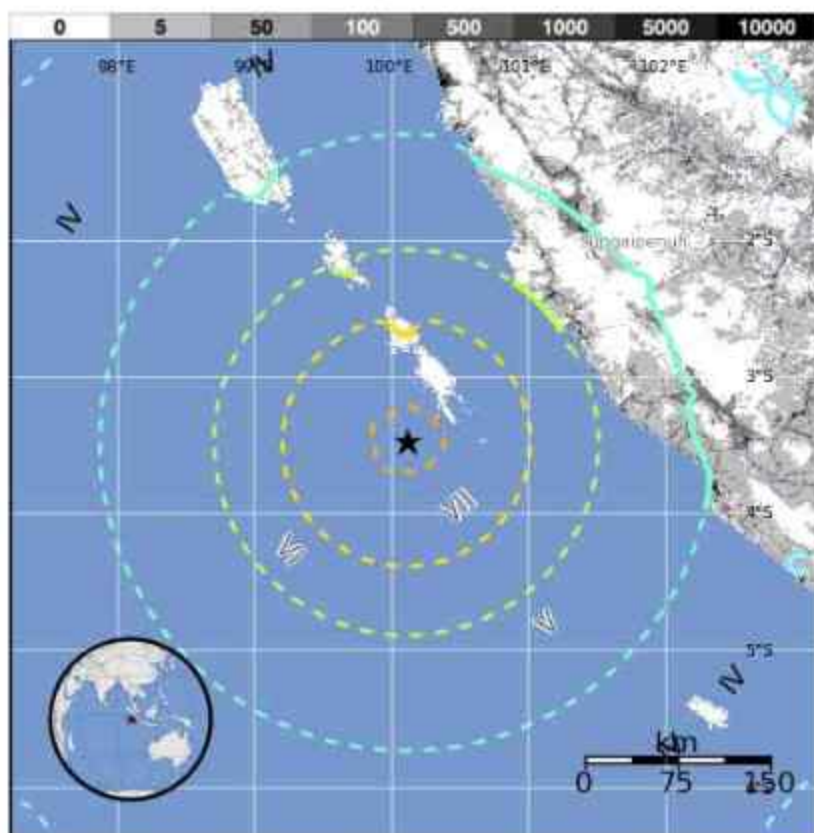
Gambar I.1. Lokasi Kejadian Gempa bumi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010

Guncangan gempa dan gelombang tsunami tersebut telah menyebabkan kerusakan dan kerugian di 4 wilayah kecamatan di Kepulauan Mentawai, yaitu Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora Selatan, dan Sikakap. Wilayah Kecamatan Pagai Selatan dan Kecamatan Pagai Utara merupakan daerah yang paling parah terkena dampak gempa bumi dan gelombang tsunami yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan rumah serta sarana dan prasarana. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Kecamatan Pagai Selatan yang berada dekat dengan pusat kejadian gempa dan terletak di pesisir pantai barat.

Gambar 1.2. Wilayah Terkena Dampak Bencana Gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai



Sumber : USGS, 25 Oktober 2010

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 ini disusun sebagai rencana program dan kegiatan untuk:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi pascabencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kementerian/lembaga, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten dan masyarakat secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
7. Mempersiapkan wilayah Kepulauan Mentawai dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang dengan melakukan percepatan pembangunan wilayah pascabencana yang berbasis mitigasi bencana.

Sedangkan tujuan diterbitkannya Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 ini adalah:

1. Terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta unsur-unsur swasta, masyarakat nasional dan daerah agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Memudahkan dilakukannya pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip "*prudent*" (kehati-hatian) dan "*accountable*" (bertanggung-jawab).

I.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini meliputi: (1) Sektor perumahan dan prasarana lingkungan permukiman; (2) Sektor infrastruktur yang terdiri dari transportasi (darat, laut dan udara), air dan sanitasi, energi dan telekomunikasi; (3) Sektor sosial yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan kebudayaan; (4) Sektor ekonomi produktif yang terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perikanan, pariwisata, perindustrian, koperasi dan UKM; (5) Lintas sektor yang meliputi sektor pemerintahan dan ketertiban dan keamanan (TNI/POLRI) dan lingkungan hidup serta keuangan dan perbankan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 terdiri dari 6 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH BENCANA

Bab II mengulas gambaran singkat terhadap karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari: (1) kondisi perumahan, sarana dan prasarana; (2) kondisi sosial dan budaya; dan (3) kondisi perkonomian serta (4) potensi bencana dan rencana tata ruang wilayah.

BAB III PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN, KEBUTUHAN PEMULIHAN

Bab III membahas tentang metodologi penilaian kerusakan dan kerugian dan hasil penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana, serta hasil penilaian kebutuhan pemulihan atas 5 sektor, meliputi: (1) Sektor perumahan dan prasarana lingkungan permukiman; (2) Sektor infrastruktur; (3) Sektor sosial; (4) Sektor ekonomi produktif, dan (5) Lintas sektor.

BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMULIHAN SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PASCABENCANA

Bab IV berisikan prinsip dasar, ruang lingkup pemulihan, kebijakan, serta strategi dan pentahapan pelaksanaan pemulihan pascabencana.

BAB V PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA, SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS MITIGASI BENCANA

Bab V membahas tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendanaan, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kesinambungan pemulihan dalam kerangka percepatan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana.

BAB VI PENUTUP

Bab VI merupakan bagian penutup yang berisikan tentang regulasi, tanggungjawab dan jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH BENCANA

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara $0^{\circ}55'00''$ - $3^{\circ}21'00''$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}35'00''$ - $100^{\circ}32'00''$ Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Provinsi Sumatera Barat oleh Laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah pulau-pulau kecil sebanyak 98 buah. Keempat pulau besar ini adalah Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Secara geografis dan administratif, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 202 dusun. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah sebagai berikut¹ :

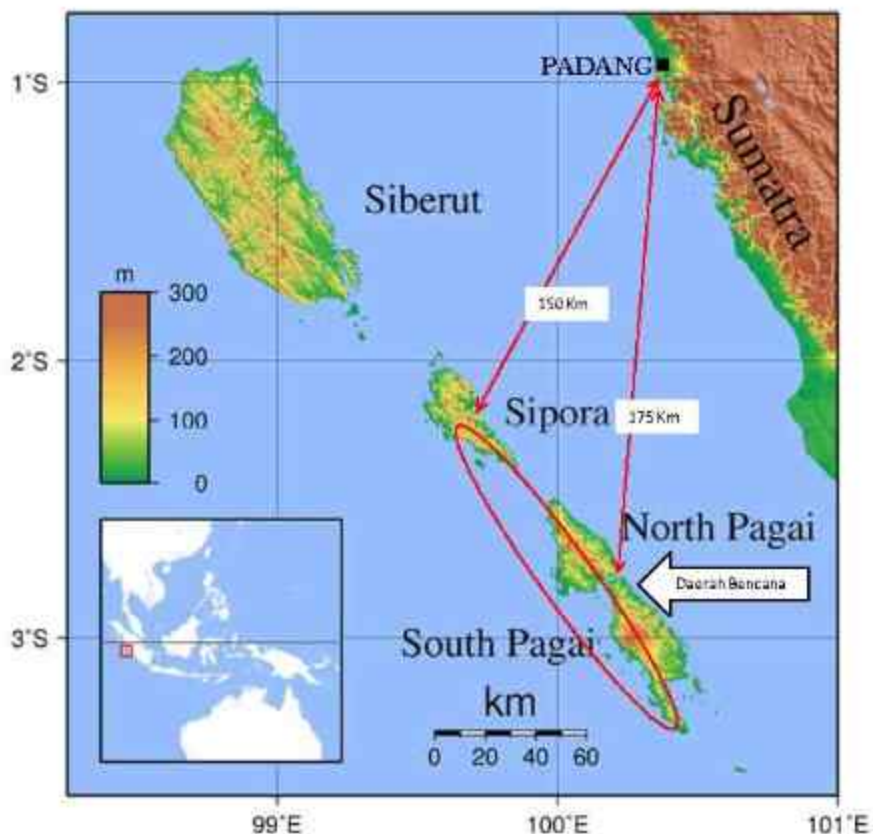
1. Kecamatan Pagai Selatan dengan luas wilayah 901,08 km² (14,99 %) dan ibukota kecamatan adalah Malakopak;
2. Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah 278,45 km² (4,63 %) dan ibukota kecamatan adalah Sikakap;
3. Kecamatan Pagai Utara dengan luas wilayah 342,02 km² (5,69 %) dan ibukota kecamatan adalah Saumanganyak;
4. Kecamatan Sipora Selatan dengan luas wilayah 268,47 km² (4,47 %) dan ibukota kecamatan adalah Sioban;
5. Kecamatan Sipora Utara dengan luas wilayah 383,08 km² (6,37 %) dan ibukota kecamatan adalah Sido Makmur;
6. Kecamatan Siberut Selatan dengan luas wilayah 508,33 km² (8,46 %) dan ibukota kecamatan adalah Muara Siberut;
7. Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah 649,08 km² (10,80 %) dan ibukota kecamatan adalah Pasakiat Tailelu;
8. Kecamatan Siberut Tengah dengan luas wilayah 739,87 km² (12,31 %) dan ibukota kecamatan adalah Saibi Samukop;

¹ Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Kepulauan Mentawai Dalam Angka Tahun 2009*, (BPS Kab. Kepulauan Mentawai). Hal 1-2

9. Kecamatan Siberut Utara dengan luas wilayah 816,11 km² (13,58 %) dan ibukota kecamatan adalah Muara Sikabaluai;
10. Kecamatan Seberut Barat dengan luas wilayah 1.124,86 km² (18,71 %) dan ibukota kecamatan adalah Suimatalu.

Secara topografi, permukaan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara dataran, sungai, dan berbukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian daerah seluruh ibukota kecamatan dan permukaan laut (DPL) adalah 2 meter. Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara dengan jarak tempuh ke kota Padang sepanjang 153 km. Untuk mencapai ibukota Provinsi Sumatera Barat ini harus ditempuh melalui jalan laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing ibukota kecamatan ke kota Padang ataupun ke ibukota kabupaten juga harus ditempuh melalui jalur laut.

Gambar II.1. Peta Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Paparan Gubernur Sumatera Barat Pada Rakor di Bappenas, 3 Desember 2010.

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009 memiliki 10 kecamatan, 43 desa, dan 202 dusun. Kesepuluh kecamatan baru tersebut merupakan hasil pemekaran dari empat kecamatan lama (induk).

Kecamatan Pagai Utara Selatan mengalami pemekaran menjadi tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sipora mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan baru, yaitu kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara.

Sementara itu Kecamatan Siberut Selatan mengalami pemekaran menjadi tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat Daya dan Kecamatan Siberut Tengah; Kecamatan Siberut Utara mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 70.174 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 36.479 orang dan penduduk perempuan sebanyak 33.695 orang. Tahun 2009, jumlah penduduk meningkat 1,68 % jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 (69.011 orang). Sedangkan komposisi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari total 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Sikakap dengan jumlah penduduk tercatat sekitar 8.715 orang atau 12,42 % dari total jumlah penduduk. Kemudian Kecamatan Sipora Utara sebagai ibukota kabupaten menempati urutan ke dua dengan jumlah penduduk sebanyak 8.448 orang atau 12,04 % dari total jumlah penduduk, selanjutnya Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.243 orang atau 11,75 % dari total jumlah penduduk, dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagai Utara yakni sebanyak 4.690 orang atau 6,68 % dari total jumlah penduduk.

Kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan menunjukkan distribusi yang cukup bervariasi, dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sikakap dengan kepadatan 31 orang/ km². Adapun kepadatan penduduk di Kecamatan Sipora Utara selaku ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sekitar 22 orang/ km². Sedangkan Kecamatan Siberut Barat merupakan kecamatan yang relatif jarang penduduknya, yakni sekitar 5 orang/km². Dan rata-rata kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sekitar 12 orang/ km².

**Tabel II.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa			Luas Daerah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		L	P	Jumlah		
1	Pagai Selatan	4,312	3,931	8,243	901,08	9,15
2	Sikakap	4,528	4,187	8,715	278,45	31,30
3	Pagai Utara	2,428	2,201	4,690	342,02	13,71
4	Sipora Selatan	4,145	3,758	7,903	288,47	29,44
5	Sipora Utara	4,401	4,047	8,448	383,08	22,05
6	Siberut Selatan	3,997	3,746	7,743	508,33	15,23
7	Siberut Barat Daya	2,887	2,668	5,555	649,08	8,58
8	Siberut Tengah	2,908	2,678	5,586	739,87	7,55
9	Siberut Utara	3,667	3,455	7,122	816,11	8,73
10	Siberut Barat	3,205	2,984	6,189	1.124,86	5,48
Jumlah		36,479	33,695	70,174	6.011,35	11,67

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

Jika dilihat dan berdasarkan angka kepadatan penduduk tersebut, untuk 1 km² di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya dihuni oleh penduduk secara rata-rata sekitar 12 orang. Kemudian karakteristik penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang cenderung tinggal mengelompok pada spot area tertentu untuk masing-masing dusun, sehingga penduduk antara satu dusun dengan dusun lainnya cenderung terpisah meskipun dalam satu desa. Selain itu kebanyakan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga cenderung tinggal di daerah pesisir atau dekat pantai dan sungai. Hal ini akan mengakibatkan suatu wilayah dusun atau desa tertentu tidaklah merata dihuni oleh penduduk, sehingga menyebabkan distribusi penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang merata.

II.1. KONDISI PERUMAHAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian besar merupakan kawasan hutan. Total kawasan hutan (terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar) memiliki presentase terbesar yaitu mencapai 85,19 % dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau sebesar 512.044 hektar atau sebagian berpotensi sebagai lahan tidur, meliputi 456.956 hektar berupa hutan lebat (76,02 %), 12.348 hektar berupa hutan sejenis (2,05 %) dan selebihnya sebesar 42.740 hektar berupa semak belukar (7,11 %). Sementara itu komposisi luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian adalah sebesar 85.783 hektar atau 14,26 persen dari total luas wilayah, meliputi

446 hektar luas lahan untuk sawah (0,07 %), 40 hektar luas lahan untuk tegalan (0,01 %), 68.385 hektar luas lahan untuk kebun campuran (11,36 %), dan 16.912 hektar luas lahan untuk perkebunan (2,82 %).

Tabel II.2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)						
		Permukiman	Sawah	Tegalan	Kebun Campuran	Perkebunan	Hutan	Semak Belukar
1	Pagai Selatan	296	0	0	6.436	2.300	68.608	8.228
2	Sikakap	444	193	0	3.772	1.088	17.509	3.760
3	Pagai Utara	168	0	0	2.232	2.444	27.256	892
4	Sipora Selatan	453	19	0	7.538	812	16.080	1.420
5	Sipora Utara	421	96	40	6.605	4.432	19.168	5.148
6	Siberut Selatan	324	190	0	3.284	96	41.561	5.212
7	Siberut Barat Daya	240	0	0	5.300	1.876	48.940	7.360
8	Siberut Tengah	140	0	0	7.416	1.000	61.851	2.480
9	Siberut Utara	412	121	0	15.600	720	58.759	5.600
10	Siberut Barat	144	0	0	10.236	2.144	97.222	2.740
Jumlah		3.042	619	40	68.419	16.912	456.956	42.740

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2009.

Luas lahan untuk permukiman atau rumah hanya sebesar 3.040 hektar atau 0,52 persen dari total luas wilayah. Keadaan lahan untuk permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini tersebar untuk masing-masing kecamatan. Terkadang untuk mencapai daerah permukiman disuatu dusun atau desa pada kecamatan yang sama memerlukan waktu yang lama. Hampir sebagian besar transportasi utama masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menggunakan jalur laut.

1. Transportasi

Transportasi merupakan kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat penting dalam menunjang perkembangan suatu daerah. Transportasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk menunjang kelancaran

interaksi antar daerah, perdagangan dan jasa pelayanan. Sistem transportasi yang dimaksud adalah transportasi darat (jaringan jalan raya), transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah transportasi darat dan transportasi laut.

A. Transportasi Darat

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai total panjang jalan hingga 728,53 Km, dimana jumlah panjang jalan terbesar berada di Kecamatan Pagai Utara Selatan, yakni mencapai 359,0 Km, sedangkan panjang jalan di Kecamatan Sipora, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Utara berturut-turut adalah 193,2 Km, 46,2 Km dan 84,5 Km. Sementara itu total jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki kondisi baik hanya 21,17 km, sedangkan 63,30 km rusak ringan, 139,95 km kondisinya rusak berat dan sepanjang 504,11 km kondisi jalannya belum tembus.

Tabel II.3. Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)				Kondisi Jembatan (Km)			
		Panjang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Panjang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pagai Selatan	3,00	3,00	0,00	0,00	50,0	0,0	50,0	0,0
2	Sikakap	16,15	11,25	0,00	4,90	137,0	0,0	77,0	60,0
3	Pagai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sipora Selatan	79,02	3,00	5,00	71,02	163,0	0,0	66,0	105,0
5	Sipora Utara	73,39	0,00	18,79	54,60	145,0	0,0	55,0	90,0
6	Siberut Selatan	11,20	6,80	4,40	0,00	85,0	0,0	79,0	6,0
7	Siberut Barat Daya	11,00	3,00	8,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Siberut Tengah	6,50	2,50	4,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Siberut Utara	9,00	3,80	5,20	0,00	23,0	0,0	23,0	0,0
10	Siberut Barat	21,00	0,00	21,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah		230,26	33,36	66,39	130,52	603,00	0,00	342,00	261,00

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2006.

B. Transportasi Laut

Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga tahun 2009 memiliki 11 buah pelabuhan laut dan terdiri atas 8 pelabuhan beton dan 1 pelabuhan berkonstruksi besi, sedangkan pelabuhan kayu yang sebelumnya sudah ada rusak berat dan tidak berfungsi lagi. Sebanyak 3 pelabuhan terdapat di Kecamatan Sikakap (3 buah Pelabuhan Laut Sikakap), 3 pelabuhan

terdapat di kecamatan Sipora (3 buah Pelabuhan Laut di Sioban dan Tuapejat), 2 Pelabuhan di Kecamatan Siberut Selatan (Pelabuhan Laut Maileppet), dan 1 pelabuhan di Kecamatan Siberut Utara (Pelabuhan Laut Pokai).

Tabel II.4. Jumlah Pelabuhan/ Dermaga dan PPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Pelabuhan/ Dermaga			
		Beton	Besi	Kayu	PPI
1	Pagai Utara Selatan (Sikakap)	3	-	-	1
2	Sipora (Sioban dan Tuapejat)	3	-	-	1
3	Siberut Selatan (Maileppet)	1	1	-	-
4	Siberut Utara (Pokai)	1	-	-	1
Jumlah		8	1	-	3

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

Jumlah kunjungan kapal di pelabuhan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah kunjungan kapal di pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 ini mencapai 2.965 kapal atau mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu 52,44 % (tahun 2008 : 1.945 kapal). Sementara itu jumlah penumpang yang naik - turun di pelabuhan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu sebanyak 90.993 orang atau turun 34,60 persen (tahun 2008 : 139.129 orang). Total penumpang yang naik dari pelabuhan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 ada sebanyak 39.468 orang (tahun 2008 : 48.789 orang), sedangkan total penumpang yang turun ke pelabuhan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 ada sebanyak 51.525 orang (tahun 2008 : 90.340 orang). Frekuensi terbanyak dari total penumpang yang naik turun ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara yaitu di Pelabuhan Tuapejat mengingat kecamatan ini merupakan lokasi dari ibukota kabupaten.

C. Transportasi Udara

Disamping transportasi darat dan laut, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki sarana transportasi udara, yaitu pelabuhan udara khusus (milik swasta) di Pagai Utara Selatan. Saat ini kebutuhan akan layanan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah. Kebanyakan pengguna adalah kalangan-kalangan tertentu yang melakukan bisnis dalam skala besar, ketika itu pengusaha-pengusaha kayu di

Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang gencar-gencarnya beroperasi, namun seiring dengan semakin surutnya perusahaan hutan, maka sejak tahun 1999 kedua pelabuhan udara itupun tidak beroperasi lagi.

Selain itu Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki sarana transportasi udara, yaitu bandara Rokot yang terletak di Kecamatan Sipora yang dapat dilandasi pesawat dengan kapasitas 15-20 orang dan melayani rute penerbangan dari Mentawai ke Kota Padang secara reguler. Dengan ketersediaan sarana transportasi udara diharapkan akan semakin memperlancar arus transportasi keluar daerah baik dari kecepatan maupun jarak.

2. Listrik dan Air

Pada Tahun 2009 ada sebanyak 3.497 pelanggan yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan atau terjadi peningkatan sebesar 3,86 % dari tahun 2008

Jumlah pelanggan terbesar ada di Kecamatan Sipora Utara yaitu sebanyak 1.174 pelanggan (33,57 %) dengan Pusat Daerah Aliran Listrik berada di Desa Tuapejat, diikuti oleh Kecamatan Sikakap dengan jumlah pelanggan sebanyak 881 pelanggan (25,19 %) dengan Pusat Daerah Aliran Listrik berada di Desa Sikakap, dan Taikako, kemudian Kecamatan Siberut Selatan dengan jumlah pelanggan sebanyak 765 pelanggan (21,88 %) dengan Pusat Daerah Aliran Listrik berada di Desa Muara Siberut dan Maileppet, kemudian Kecamatan Sipora Selatan dengan jumlah pelanggan 283 pelanggan (8,09 %) dengan Pusat Daerah Aliran Listrik berada di Desa Sioban.

Mengenai jumlah produksi, distribusi dan penjualan air minum, bahwa hingga tahun 2009 hanya Kecamatan Sipora Utara saja yang baru memperoleh fasilitas air minum ini, dimana jumlah produksi air tahun 2009 mencapai 72.554 m³, dengan jumlah distribusi sebanyak 39.017 m³ dan jumlah terjual sebanyak 29.952 m³. Sedangkan jumlah air yang terjual ke pelanggan mencapai 76,77 % dari total distribusi air dengan jumlah persentase distribusi sebesar 53,78 % terhadap total produksi.

3. Pos dan Telekomunikasi

Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya memiliki Kantor Pos Pembantu sebanyak 4. Kantor Pos Pembantu ini hanya berlokasi di empat kecamatan induk saja (Sikakap, Sipora Selatan, Siberut Selatan, dan Siberut Utara). Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun dari PT Telkom Tuapejat bahwa total kapasitas sst yang terpasang dan terisi pada tahun 2009 adalah sebanyak 12.282 sst. Sedangkan sarana telekomunikasi seperti telepon

dan *handphone* sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Ibukota Kabupaten serta ibukota kecamatan dan sekitarnya.

II.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Pada bidang pendidikan, jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun 2009 masing-masing sebanyak 58 TK Swasta, 112 SD (104 Negeri dan 8 Swasta), 18 SLTP (14 Negeri dan 4 Swasta), serta 6 SLTA (5 Negeri dan 1 Swasta).

Tabel II.5. Jumlah Kelas, Guru dan Murid
di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009

No	Kecamatan	TK			SD			SLTP			SLTA		
		Kelas	Guru	Murid	Kelas	Guru	Murid	Kelas	Guru	Murid	Kelas	Guru	Murid
1	Pagal Selatan	-	-	-	121	61	1.857	4	5	84	-	-	-
2	Sikakap	6	6	55	84	53	1.398	35	71	996	19	39	610
3	Pagal Utara	-	-	-	62	39	1.075	4	5	79	-	-	-
4	Sipora Selatan	21	18	182	83	80	1.485	18	27	525	15	32	382
5	Sipora Utara	16	16	96	77	94	1.331	15	33	459	24	66	407
6	Siberut Selatan	13	12	119	66	54	1.636	26	56	844	18	39	536
7	Siberut Barat Daya	11	12	90	54	39	1.100	-	-	-	-	-	-
8	Siberut Tengah	13	14	189	37	41	955	4	9	125	-	-	-
9	Siberut Utara	26	26	313	119	59	1.959	17	31	519	11	31	318
10	Siberut Barat	11	12	120	58	32	1.130	4	3	56	-	-	-
Jumlah		117	116	1.164	761	552	13.925	125	240	3.667	87	207	2.253

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2009.

Berdasarkan tabel diatas digambarkan jumlah kelas, guru dan murid se-Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dimulai dari Taman Kanak-Kanan dengan 117 ruang kelas, 116 guru dan 1.164 murid. Pada Sekolah Dasar terdiri atas 761 kelas, 552 guru, dan 13.925 murid SD, untuk tingkat SLTP se-Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 125 kelas, 240 guru, dan 3.687murid. Sedangkan untuk tingkat SLTA berjumlah 87 kelas, 207 guru, dan 2.253 murid.

Tabel II.6. Distribusi Sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009

No	Kecamatan	TK		SD		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Pagai Selatan	-	-	17	1	2	-	-	-
2	Sikakap	-	3	9	2	2	2	1	-
3	Pagai Utara	-	-	9	-	1	-	-	-
4	Sipora Selatan	-	9	12	1	2	-	1	-
5	Sipora Utara	-	8	17	1	2	-	1	1
6	Siberut Selatan	-	6	7	2	2	1	1	-
7	Siberut Barat Daya	-	6	8	-	-	-	-	-
8	Siberut Tengah	-	7	5	-	1	-	-	-
9	Siberut Utara	-	13	12	1	1	1	1	-
10	Siberut Barat	-	6	8	-	1	-	-	-
Jumlah		-	58	104	9	14	4	5	1

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

Sekolah Islam di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan data dari Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya ada 1 buah (Swasta) dan berlokasi di Kecamatan Sikakap, sedangkan jumlah Madrasah Tsanawiyah ada 3 buah (2 Negeri dan 1 Swasta), masing-masing Negeri satu buah di Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Sipora Selatan, serta 1 buah Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Siberut Utara, sedangkan untuk Madrasah Aliyah hanya ada 1 buah (Swasta) di Kecamatan Sipora Utara.

2. Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya terus meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 ini masing-masing sebanyak 25 unit (7 unit Puskesmas dan 18 unit Pustu), 22 unit Poskesdes dan 225 unit Posyandu. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, dan perawat/bidan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 masing-masing sebanyak 6 dokter, 118 perawat dan 28 bidan.

**Tabel II.7. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009**

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan				Tenaga Kesehatan		
		Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu	Dokter	Perawat	Bidan
1	Pagai Selatan	-	2	1	-	-	20	3
2	Sikakap	1	-	3	96	-	19	4
3	Pagai Utara	1	-	1	16	1	16	7
4	Sipora Selatan	1	3	8	15	1	10	2
5	Sipora Utara	1	3	-	11	2	12	2
6	Siberut Selatan	1	3	3	43	1	16	4
7	Siberut Barat Daya	-	1	1	-	-	-	-
8	Siberut Tengah	-	1	2	-	-	-	-
9	Siberut Utara	1	6	1	27	1	8	2
10	Siberut Barat	1	-	2	17	-	17	4
Jumlah		7	18	22	225	6	118	26

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

Jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 4 triwulan tahun 2009 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2008, yaitu lebih dari 6 kali lipat, dengan jumlah kunjungan 59.576 kunjungan (tahun 2008 sebanyak 9.564 kunjungan). Selama tahun 2009, rata-rata kunjungan pasien pada Puskesmas untuk tiap triwulannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak 14.894 kunjungan.

3. Agama

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas memeluk Agama Kristen Protestan, yakni mencapai 54,70 persen, diikuti oleh Agama Kristen Katholik dengan jumlah pemeluk mencapai 27,90 persen, sedangkan pemeluk Agama Islam hanya mencapai 17,40 persen. Sementara itu, jumlah rumah ibadah secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi tahun 2008, yaitu menjadi 336 rumah ibadah, yang dirinci sebagai berikut : Mesjid sebanyak 50 buah, Mushalla sebanyak 17 buah, Gereja Kristen Protestan sebanyak 185 buah, dan Gereja Katholik sebanyak 83 buah.

Selanjutnya informasi lebih detail mengenai rumah ibadah berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.8. Sebaran Fasilitas Rumah Ibadah
di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009**

No	Kecamatan	Islam		Kristen Protestan				Kristen Katolik	
		Masjid	Mushalla	GKPM	GPDJ	GISI	GBI	Permanen	Kayu
1	Pagai Selatan	3	2	38	-	-	-	4	1
2	Sikakap	4	1	24	1	-	1	4	5
3	Pagai Utara	3	1	8	-	-	-	3	1
4	Sipora Selatan	9	-	16	12	1	6	4	5
5	Sipora Utara	18	3	7	2	1	1	-	4
6	Siberut Selatan	2	-	4	13	-	3	7	2
7	Siberut Barat Daya	2	2	5	1	-	-	10	2
8	Siberut Tengah	3	3	6	2	-	-	4	-
9	Siberut Utara	4	3	11	8	-	4	3	8
10	Siberut Barat	3	2	8	2	-	-	-	15
Jumlah		51	17	127	41	2	15	39	44

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

II.3. KONDISI PEREKONOMIAN

A. Perkembangan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam satu periode tertentu di tunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai sedikit meningkat dibandingkan pada tahun 2008. Meningkatnya kinerja pembangunan ekonomi ini disebabkan karena kondisi sosial, politik dan keamanan yang lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, secara nominal terjadi kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 195,165,07 juta rupiah. Dimana, pada tahun 2008 nilainya sebesar 1.099.753,46 juta rupiah maka pada tahun 2009 naik menjadi 1.294.918,53 juta rupiah. Namun kenaikan tersebut belum dapat dikatakan terjadi perbaikan produktivitas ekonomi secara riil karena masih adanya olomon inflasi di dalamnya.

Dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 dapat kita lihat produktivitas ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara riil. Dimana pada tahun 2009 nilainya mencapai 509.396,33 juta rupiah atau meningkat sebesar 22.737,62 juta rupiah dibandingkan pada tahun 2008 tercatat sebesar 486.658,71 juta rupiah. Dengan kata lain, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,67 %.

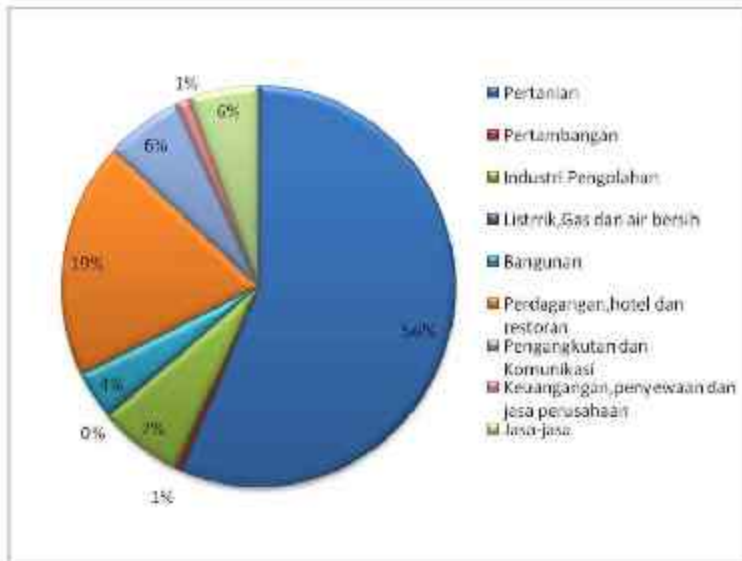
Secara keseluruhan pada tahun 2009 ini, semua sektor mengalami pertumbuhan positif walaupun beberapa sektor berada di bawah nilai rata-rata pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,67%. Laju pertumbuhan beberapa sektor yang berada di bawah nilai pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian (5,30%), Perdagangan, Hotel, & Restoran (5,35%), Jasa-jasa (5,51%), Pengangkutan dan Komunikasi (7,03%), dan Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (7,61%) serta sektor Bangunan (9,41 %). Dimana sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 56%.

Tabel II.9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha 2007-2009 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2007	2008	2009
1.	Pertanian	507,929.80	617.891.95	729,629.48
2.	Pertambangan	4,735.61	5.928.61	7,092.26
3.	Industri Pengolahan	67,748.49	78.495.54	89,031.79
4.	Listrik, Gas dan air bersih	1,330.22	1.494.22	1,618.12
5.	Bangunan	32.594.65	40.508.44	49,946.79
6.	Percagangan, hotel dan restoran	176,163.18	210.137.55	247,722.97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	60,353.59	70.129.64	81,103.62
8.	Keuangan, penyewaan dan jasa perusahaan	10,291.78	12.688.39	15.501.66
9.	Jasa-jasa	51,839.19	62.479.12	73,271.86
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		912,766.50	1,099.753.46	1,294,918.53

Sumber: *Indikator Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai 2009*

Gambar II.2. Prosentase Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kepulauan Mentawai



Sumber: Tim P3B Bappenas, diolah dari *Indeksn Kepulauan Mentawai 2009*

1. Pertanian Tanaman Pangan

Pada bidang pertanian, terutama pada tanaman pangan, perkembangan tanaman padi sawah pada tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan hampir separuh dibandingkan dengan tahun 2008 dari segi luas tanam dan luas panen. Sedangkan jumlah produksinya hanya sedikit berkurang. Luas tanam padi sawah pada tahun 2009 ini adalah 363 hektar dengan luas panen mencapai 224 hektar. Seiring dengan kondisi diatas, jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami penurunan dari 1.582 ton pada tahun 2008 menjadi 1.376,30 ton pada tahun 2009 atau terjadi penurunan sekitar 13,00 persen. Tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan talas (keladi) bervariasi. Tanaman jagung meskipun luas tanam dan luas panennya mengalami kenaikan, tetapi produksinya malah menurun. Sedangkan untuk kacang tanah, baik luas tanam, luas panen, maupun produksinya seluruhnya mengalami kenaikan.

Sedangkan tanaman sayuran (tanaman kacang panjang, terong, ketimun, cabe besar, cabe rawit, kangkung, dan tomat) rata-rata mengalami peningkatan yang cukup bervariasi dalam hal luas tanam, luas panen dan jumlah produksi jika dibandingkan pada tahun 2008. Namun tanaman buah-buahan yang meliputi durian, alpukat, mangga, rambutan, duku, jeruk, jambu biji, jambu air, pepaya, manggis, pisang, nangka, melinjo,

petai, nenas, salak, dan sawo. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang memiliki jumlah tanaman pisang terbesar diantara jenis tanaman buah-buahan yang lain. Jumlah tanaman pisang yang terdaftar pada tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 4.262.280 pohon atau meningkat 33 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2008 (122.114 pohon), jumlah produksinya meningkat sebesar 17,94 kali (204.589,44 kwintal) jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008 (10.801,12 kwintal).

2. Peternakan

Pada tahun 2009, populasi peternakan sapi mencapai 226 ekor dengan jumlah pemotongan sebanyak 61 ekor atau berkisar 26,99 % dari total populasi. Persentase populasi terbesar terdapat di Kecamatan Sipora Utara yang mencapai 26,55 % dari total populasi sapi yang terdapat pada 10 (sepuluh) Kecamatan. Sementara itu populasi hewan kerbau sebanyak 167 ekor dengan persentase terbesar terdapat di Kecamatan Siberut Selatan, yakni mencapai 32,93 %.

Sedangkan untuk jenis ternak kambing terbanyak ada di Kecamatan Sipora Utara, yakni sebanyak 130 ekor dari 714 ekor total kambing di Kabupaten Kepulauan Mentawai (18,21 %), sedangkan jumlah pemotongan kambing di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 134 ekor (18,77 %). Sementara itu jumlah populasi ternak babi mencapai 3.625 ekor dengan persentase terbesar di Kecamatan Pagai Utara, yakni sebanyak 650 ekor atau mencapai 17,93 % dari total populasi sedangkan populasi babi terkecil ada di Kecamatan Sikakap dengan jumlah babi hanya 175 ekor atau hanya mencapai 4,82 % dari total populasi keseluruhan. Jumlah pemotongan babi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 55,44 % atau mencapai 2.010 ekor.

3. Perikanan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, menunjukkan jumlah nelayan perikanan laut mencapai 2.460 nelayan, dengan perincian 1.920 nelayan penuh (*full time*) dan sisanya sebanyak 540 merupakan nelayan sambilan (paruh waktu). Terkait dengan hal tersebut jumlah produksi ikan laut untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009 mencapai 2.471 ton, atau mengalami kenaikan 10 kali lipat sebesar 1.003,13 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 (224 ton). Produksi ikan laut terbesar pada tahun 2009 ini berasal dari jenis tuna, yakni mencapai 520 ton.

**Tabel II.10. Kondisi Bidang Perikanan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009**

No	Kecamatan	Nelayan		Perikanan Laut		Perikanan Darat (PETERAKAN RAKYAT)	
		Penuh	Sambilan	Produksi (ton)	Persentase	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Pagai Selatan	170	25	90,00	3,64	0,00	0,00
2	Sikakap	210	30	510,00	20,64	0,00	0,00
3	Pagai Utara	150	75	119,00	4,82	0,00	0,00
4	Sipora Selatan	170	80	112,00	4,53	0,00	0,00
5	Sipora Utara	230	25	520,00	21,04	5,00	0,50
6	Siberut Selatan	210	40	440,00	17,81	2,1	4,00
7	Siberut Barat Daya	150	85	80,00	3,24	0,00	0,00
8	Siberut Tengah	195	70	120,00	4,86	0,00	0,00
9	Siberut Utara	220	40	420,00	17,00	1,5	2,5
10	Siberut Barat	215	70	60,00	2,43	0,00	0,00
Jumlah		1.920	540	2.471,00	100,00	8,6	15,5

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

4. Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa luas hutan paling banyak ditatagunakan untuk Hutan Produksi, yakni seluas 273.805 hektar atau mencapai 45,50 % dari total luas hutan, sedangkan hutan yang digunakan sebagai Hutan Lindung memiliki persentase terkecil, yakni hanya mencapai 1 % saja atau hanya 4.833,65 hektar. Persentase luas hutan yang digunakan untuk Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) sebesar 29,96 % (180.067,21 hektar). Sedangkan luas hutan yang digunakan untuk areal penggunaan lain adalah 92.501,19 hektar atau mencapai 15,38 % dari total luas Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sedangkan perkebunan meliputi tanaman kelapa dengan luas 8.050 hektar dengan luas produksi sebesar 7.066 hektar dan jumlah produksi 7.266 ton. Sedangkan tanaman cengkeh yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dari sektor perkebunan ini memiliki total luas lahan sebesar 1.776 hektar dengan luas produksi 1.546 hektar dan jumlah produksi 459 ton. Sementara itu luas lahan tanaman perkebunan nilam di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 1.858 hektar dengan luas produksi 1.054 hektar, sedangkan jumlah produksinya mencapai 15,78 ton.

5. Pariwisata

Jumlah dan jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, terlihat bahwa ada sebanyak 20 objek wisata dengan berbagai jenis yang tersebar di sepuluh kecamatan. Dari 20 objek wisata tersebut, terdapat 3 objek wisata berupa panorama alam, 13 objek wisata berupa wisata bahari, 1 objek wisata sumber air, dan 3 objek wisata berjenis budaya.

**Tabel II.11. Objek Wisata dan Penginapan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009**

No	Kecamatan	Objek Wisata				Penginapan		
		Panorama Alam	Bahari	Sumber Air	Budaya	Resort	Wisma	Penginapan
1	Pagai Selatan	1	1	-	-	1	0	0
2	Sikakap	-	-	-	-	0	0	7
3	Pagai Utara	-	1	-	-	1	0	0
4	Sipora Selatan	-	1	-	-	2	0	3
5	Sipora Utara	1	4	1	-	2	0	5
6	Siberut Selatan	-	-	-	1	0	0	3
7	Siberut Barat Daya	3	6	1	-	3	0	0
8	Siberut Tengah	1	1	-	-	0	0	0
9	Siberut Utara	2	2	-	-	0	0	3
10	Siberut Barat	-	-	-	1	1	0	0
Jumlah		8	18	2	2	10	0	21

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2009.

Dari kesepuluh kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai, terlihat bahwa kecamatan dengan jumlah objek wisata terbanyak adalah Kecamatan Siberut Barat Daya.

B. Kinerja Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 berdasarkan Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan laporan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Kondisi 31 Desember 2009 yang dirinci menurut Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, dimana realisasi total APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.140.345.910.616,96 dengan realisasi total Pendapatan dan Belanja masing-masing sebesar Rp. 381.311.208.796,22 dan Rp. 759.034.701.820,74 dengan nilai Minus sebesar Rp. 377.723.493.024,52.

Khusus untuk sektor Pendapatan, realisasi pendapatan yang berhasil diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan sebesar 96,59 persen, atau lebih kecil 3,41 persen nilai yang telah ditargetkan, sedangkan dari sektor anggaran belanja hanya terealisasi 59,81 persen. Realisasi Kontribusi PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. 29.188.116.273,22 atau hanya mencapai 7,65 persen dari total Anggaran Pendapatan. Sedangkan kontribusi terbesar masih berasal dari Dana Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan) yaitu sebesar Rp. 348.563.509.856,00 atau mencapai 91,41 persen. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah hanya menyumbang 0,93 persen atau sebesar Rp. 3.559.585.622,00. Adapun sumber PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari Pajak Daerah (1,22 persen), Retribusi Daerah (7,88 persen), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (28,46 persen) dan Lain-lain PAD Yang Sah (62,44 persen). Adapun sumber PAD yang berasal dari sektor Lain-lain PAD yang sah ini meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana HWS dan Penerimaan Lainnya. Sedangkan sumber Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak (5,68 persen), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (1,77 persen), Dana Alokasi Umum (81,57 persen) dan Dana Alokasi Khusus (10,98 persen).

Gambar II.3. Prospek Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran



Sumber : RPJMD 2007-2011 kabupaten Kepulauan Mentawai.

Realisasi Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009 hanya mencapai 59,81 persen dari yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp. 379.558.791.410,37 dengan perincian sebagai berikut : Untuk Belanja Operasional

menghabiskan anggaran sebesar Rp. 281.161.431.767,26 atau mencapai 74,08 persen dari total Anggaran Belanja, untuk Belanja Modal menghabiskan anggaran sebesar Rp. 98.314.478.643,11 atau mencapai 25,90 persen dari total Anggaran Belanja, sedangkan sisanya 0,33 persen dari total Anggaran Belanja adalah Belanja Tak Terduga (Rp. 82.881.000,00). Khusus untuk Belanja Operasional, sebanyak 50,42 persen digunakan untuk Belanja Pegawai, 34,65 persen digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, 8,91 persen digunakan untuk hibah, 4,07 persen digunakan untuk Bantuan Sosial, dan sisanya 1,95 persen digunakan untuk Bantuan Keuangan.

Tabel II.12. Prospek Ekonomi Sektoral Kabupaten Kepulauan Mentawai 2007-2011

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2007 (Rp. Juta)	2008 (Rp. Juta)	2009 (Rp. Juta)	2010 (Rp. Juta)	2011 (Rp. Juta)
1.	Pertanian	271,093.20	285,981.80	301,887.60	316,256.30	330,832.10
2.	Pertambangan & Penggalian	1,740.43	1,787.96	1,836.78	1,886.94	1,938.46
3.	Industri dan Pengolahan	41,423.93	42,619.85	43,850.31	45,116.28	46,418.81
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	547.33	584.71	624.66	667.33	712.91
5.	Bangunan	12,547.61	14,104.98	15,730.28	17,542.66	19,564.31
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,512.72	104,228.40	108,081.44	112,076.92	116,220.10
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	24,248.24	25,666.56	27,167.83	28,756.92	30,438.95
8.	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,618.95	4,742.12	4,868.57	4,996.35	5,131.68
9.	Jasa-jasa	23,268.93	24,669.85	26,155.12	27,729.81	29,399.30
PDRB		480,101.34	504,386.03	530,002.59	557,031.75	580,458.62

Sumber: RPJMD 2007-2011 kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sedangkan untuk Belanja Modal, sebanyak 62,76 persen digunakan untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebanyak 17,22 persen digunakan untuk Belanja Gedung dan Bangunan, 19,70 persen digunakan untuk Belanja Peralatan dan Mesin, 0,21 persen digunakan untuk Belanja Aset Tetap Lainnya, dan hanya 0,11 persen digunakan untuk Belanja Aset Lainnya.

II.4. POTENSI BENCANA ALAM DAN TATA RUANG WILAYAH

A. Potensi Ancaman Bencana

Wilayah Kepulauan Mentawai yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) buah. Dimana terdapat 4 (empat) pulau besar yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Dilihat dari potensi ancaman bencana alam, Kepulauan Mentawai memiliki potensi yang tinggi terhadap ancaman bencana alam, baik berupa gempa bumi (tektonik), tsunami maupun abrasi pantai. Dari 43 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 33 desa diantaranya terletak di daerah pesisir yang merupakan kawasan rawan terhadap bencana tsunami dan abrasi pantai.

Berdasarkan informasi United State Geological Survey (USGS) kondisi kerawanan gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kategori VIII. Dimana, gempa dengan kategori kekuatan seperti itu dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan yang cukup parah.

Jika dilihat pada **Gambar II.4.** dibawah, wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki risiko yang tinggi terhadap ancaman gelombang tsunami. Demikian juga halnya dengan gempa bumi, yang ditunjukkan pada **Gambar II.5.** dibawah ini.

Gambar II.4. Peta Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Indonesia



Sumber: www.geospasial.bnpb.go.id

Gambar II.5. Peta Indeks Ancaman Bencana Gempa Bumi di Indonesia



Sumber: www.geospasial.bnpb.go.id

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyadari betul akan bahaya yang setiap saat dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Hal ini telah di tindaklanjuti dengan menerapkan berbagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta revisi terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis mitigasi bencana, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD 2007-2011 Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memfokuskan pembangunan dibidang **Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pembangunan Berkelanjutan**, yang diselenggarakan dengan kebijakan umum yang diarahkan untuk² :

- 1) Memperbaiki sistem manajemen dengan menerapkan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu (antara pemanfaatan dan konservasi) untuk menjaga kondisi fisik sumberdaya pada tingkat yang dapat memberi manfaat secara berkelanjutan;

² RPJMD 2007-2011 Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- 2) Meningkatkan peran serta dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan program pengelolaan sumberdaya alam (termasuk penyediaan jasa lingkungan) untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 3) Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (proses produksi dan pemanfaatan) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip keberlanjutan (ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial);
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui pembuatan peraturan daerah, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk perbaikan system manajemen dan peningkatan pengelolaan dan penegakan hukum;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pengelolaan sumberdaya alam baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan;
- 6) Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam yang rusak/terdegradasi dan mengendalikan pencemaran;
- 7) Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana (banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya) dan pengendalian daya rusak air;
- 8) Memperkuat kapasitas dan kesiapan (*preparedness*) pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam;
- 9) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pencegahan dan pengurangan bencana. Berdasarkan arah kebijakan umum di atas, dilaksanakan beberapa program pembangunan daerah, yang meliputi:
 - a. Program pelestarian pemanfaatan sumberdaya hutan
 - b. Program pelestarian pemanfaatan sumberdaya kelautan
 - c. Program pengendalian kualitas lingkungan hidup

B. Rencana Tata Ruang

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, dimana sebelumnya terdiri dari 4 Kecamatan dan 43 Desa menjadi 10 (sepuluh) kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002. Dimana kesepuluh kecamatan tersebut tersebar pada 4 (empat) buah pulau besar yaitu: Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.

Untuk tindak lanjut dari pengembangan wilayah tersebut sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang, maka disusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003. Dalam 2 (dua) tahun perjalanannya, dinamika pembangunan belum mampu menjawab upaya percepatan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang diharapkan.

Atas dasar tersebut dilakukan peninjauan, koreksi dan kajian kembali terhadap Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2001. Dimana hasil kajian tersebut akan digunakan sebagai dasar masukan bagi penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2005.

Dari hasil penyusunan Dokumen Revisi RTRW 2005 Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, selanjutnya dituangkan dalam bentuk Draf Rancangan Perda RTRW 2007-2017. Namun, seiring dengan diberlakukannya Pedoman Penataan Ruang yang baru pada tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan berlakunya UU No. 27 Tahun 2007, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang tidak berlaku lagi. Maka dokumen Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW 2007-2017 perlu dilakukan penyesuaian, antara lain terhadap masa berlaku RTRW Kabupaten dari 10 tahun menjadi 20 tahun, penetapan kawasan-kawasan strategis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Untuk itu harus dilakukan penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai 2010-2030, yang saat ini sedang dalam proses inisiasi penyusunan.

BAB V

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA, SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS MITIGASI BENCANA

V.1. PENDANAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pendanaan penanggulangan bencana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana penanggulangan bencana berasal dari: a) APBN, b) APBD; dan/atau c) Masyarakat.
- Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN menyediakan juga dana kontijensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah.

Pendanaan penanggulangan bencana dari sumber APBD (Provinsi/Kabupaten/Kota), baik sistem perencanaan dan penganggarannya maupun pelaksanaan, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya perlu disesuaikan dengan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah (APBD), yaitu:

1. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 juncto nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (diterbitkan tiap tahun anggaran);
4. Peraturan lainnya yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Dengan kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada Bab IV, maka dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik pasca Pendanaan untuk pemulihan

pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai ditujukan bagi 2 (dua) kelompok utama, yaitu;

1. Komponen rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
2. Komponen percepatan pembangunan secara menyeluruh untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kebutuhan dana komponen rehabilitasi dan rekonstruksi di peroleh berdasarkan hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damages and Losses Assessment*), yang mencakup: a) Perumahan dan prasarana permukiman, b) Infrastruktur, c) Sosial, (d) Ekonomi, dan (e) Lintas Sektor. Sebagaimana strategi yang telah ditetapkan di muka, upaya percepatan pembangunan di perlu dilakukan seiring dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi fasilitas yang rusak karena bencana gempa bumi dan tsunami. Percepatan pembangunan ini akan memberikan manfaat yang lebih baik dari hasil pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat Kepulauan Mentawai (*Building Back Better*). Percepatan pembangunan ini pada prinsipnya hanya mencakup infrastruktur transportasi yang dimaksudkan untuk membuka akses di Kepulauan Mentawai secara menyeluruh sehingga akan menjadi stimulan bagi pembangunan ekonomi. Fasilitas infrastruktur transportasi meliputi transportasi darat, laut dan udara, yaitu pembangunan lintas poros utama, pembangunan dermaga pelabuhan termasuk pengadaan kapal Ro-Ro serta peningkatan bandara (*airstrip*) di Pagai Selatan, Pagai Utara, Pulau Siberut dan Pulau Sipora.

Berdasarkan hasil perhitungan total nilai kebutuhan untuk komponen pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami yaitu Rp. 486,40 milyar. Namun demikian dana yang sudah diindikasikan tersedia baru sebesar Rp. 49,52 milyar. Demikian juga untuk Komponen Percepatan Pembangunan, yang mana total nilai kebutuhan Rp. 674,43 milyar, namun dana yang tersedia saat ini baru diindikasi sebesar Rp. 28,50 milyar. Namun demikian, BNPB juga dapat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN Mata Anggaran BA 999 untuk pemulihan pasca bencana gempa bumi dan sekaligus upaya percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tabel berikut secara ringkas memperlihatkan indikasi kebutuhan pendanaan untuk komponen percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta indikasi dana yang tersedia.

Tabel V.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Komponen Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Komponen Percepatan

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)			
				APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Non Pemerintah
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI							
1	PERUMAHAN*	250,548.3	25,947.5	246,007.5	-	-	4,540.8
	1 Perumahan dan Huntara	9,046.4	9,046.4	191,672.9	-	-	4,540.8
	2 Prasarana Lingkungan	16,901.1	16,901.1	54,334.6	-	-	-
2	INFRASTRUKTUR	18,998.4	-	18,998.4	-	-	-
	1 Transportasi	-		250.0	-	-	-
	2 Air dan Sanitasi	-		120.0	-	-	-
	3 Energi	-		18,628.4	-	-	-
3	EKONOMI	113,680.9	19,572.8	110,945.9	2,735.0	-	-
	1 Pertanian	18,893.3		18,893.3	-	-	-
	2 Perkebunan	47,551.6	1,887.8	47,551.6	-	-	-
	3 Peternakan	5,379.5		4,814.5	565.0	-	-
	4 Perdagangan	2,580.0		410.0	2,170.0	-	-
	5 Perikanan	39,115.4	17,685.0	39,115.4	-	-	-
	6 Pariwisata	-		-	-	-	-
	7 Perindustrian	-		-	-	-	-
	8 Koperasi dan UKM	161.2		161.2	-	-	-
4	SOSIAL	59,070.7	1,500.0	38,070.7	-	-	21,000.0
	1 Kesehatan	7,554.3		7,554.3	-	-	-
	2 Pendidikan	27,028.3	1,500.0	27,028.3	-	-	-
	3 Agama	18,264.5		264.5	-	-	18,000.0
	4 Lembaga Sosial	6,223.6		3,223.6	-	-	3,000.0

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)			
				APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Non Pemerintah
5	LINTAS SEKTOR	44,109.4	2,500.0	44,109.4	-	-	-
1	Lingkungan Hidup	11,286.9		11,286.9	-	-	-
2	Pemerintahan	16,987.5	2,500.0	16,987.5	-	-	-
3	Ketertiban dan Keamanan	285.0		285.0	-	-	-
4	Pengurangan Risiko Bencana	15,550.		15,550.0	-	-	-
SUB TOTAL R3		486,407.8	49,520.4	49,520.4	2,735.0	-	25,540.8
PERCEPATAN PEMBANGUNAN							
1	INFRASTRUKTUR	674,430.0	28,500.0	674,430.0	-	-	-
1	Transportasi	28,500.0	28,500.0	674,000.0	-	-	-
2	Telekomunikasi	430.0		430.0	-	-	-
SUB TOTAL PERCEPATAN		674,430.0	28,500.0	674,430.00	-	-	-
TOTAL		1,160,837.8	78,020.4	1,132,562.0	2,735.0	-	25,540.8

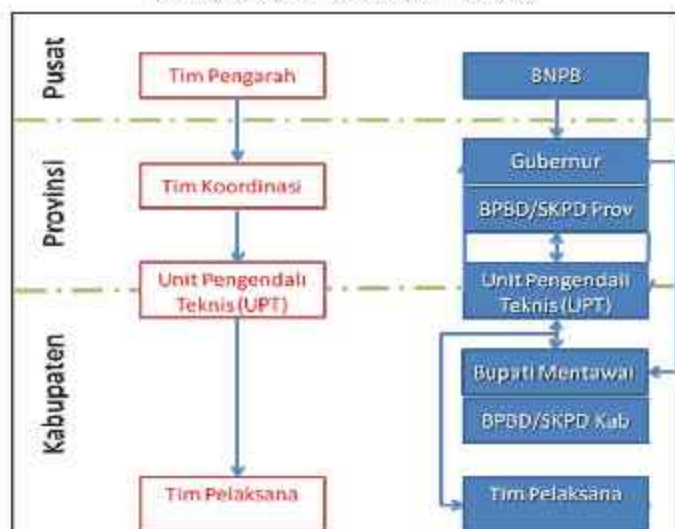
Sumber: Tim Penilaian Kebutuhan (Bappenas, BNPB, UKP4, Pemkab Mentawai): Desember 2010.

V.2. MEKANISME DAN KELEMBAGAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

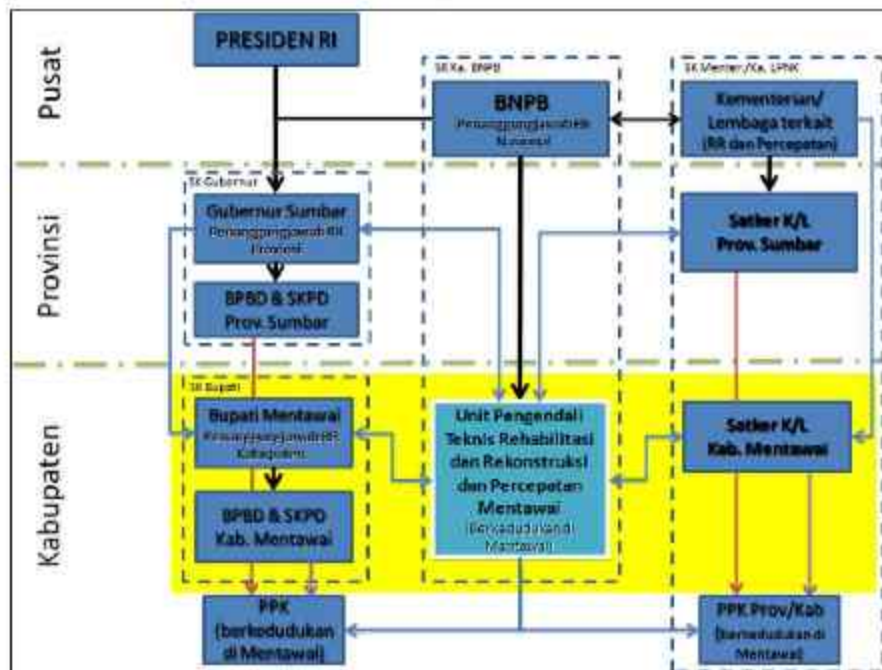
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai ditujukan sebagai sarana membangun kembali komunitas, membuka lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi masyarakat; dengan mengintegrasikan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam kegiatan pemulihan serta pengurangan risiko bencana dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang. Di samping itu juga sesuai dengan Kerangka Kerja untuk Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*) 2005 – 2015 yang memuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai kesempatan strategis untuk pengurangan risiko bencana dan membangun kembali secara lebih baik (*building back better*) serta memperhatikan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Segera setelah masa tanggap darurat diumumkan oleh Pemerintah, maka langsung dimulai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan hasil keputusan pada Sidang Kabinet tentang Penanganan Bencana di Wasior, Mentawai dan Merapi pada tanggal 25 November 2010, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kepulauan Mentawai dan sekaligus pelaksanaan percepatan pembangunan di Kepulauan Mentawai, dikoordinasikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, melalui dukungan dari kementerian/lembaga di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

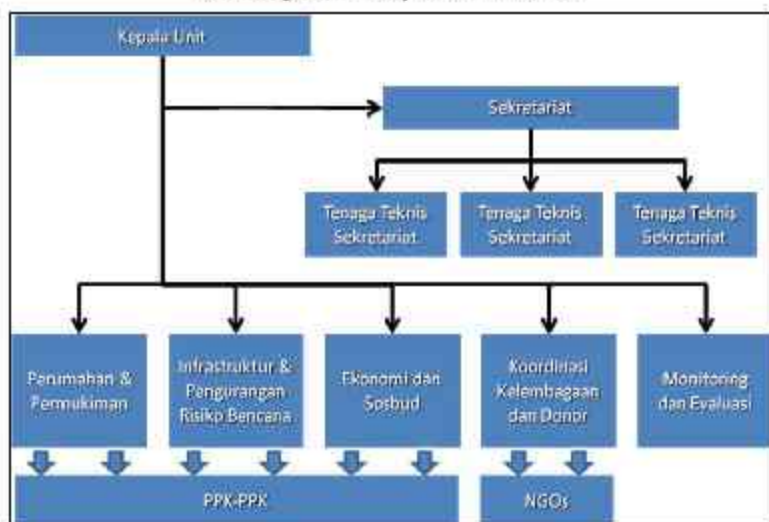
Gambar V.1. Kerangka Dasar Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Percepatan Pembangunan di Kepulauan Mentawai



Gambar V.2. Struktur Organisasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Percepatan Pembangunan Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai



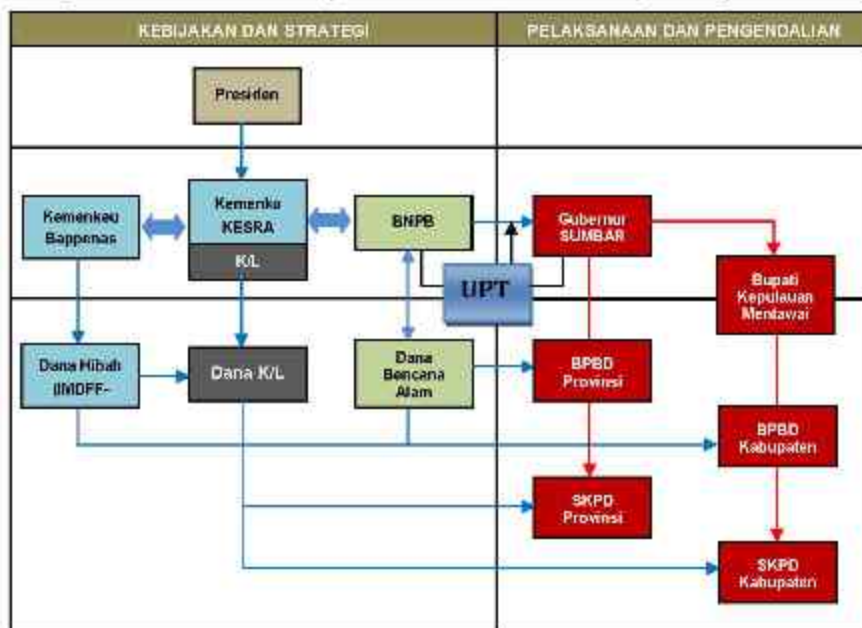
Gambar V.3. Struktur Organisasi UPT Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Percepatan Pembangunan di Kepulauan Mentawai



Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membentuk Tim Pengendali Teknis (TPT) di tingkat lapangan, yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Mentawai yang dikoordinasikan oleh Gubernur Sumatera Barat, untuk memfasilitasi Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta mengkoordinasikan Satker kementerian/lembaga dan kegiatan Donor/NGO terkait dalam pemulihan pascabencana dan percepatan pembangunan Mentawai dan melaksanakan melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan percepatan pembangunan pasca bencana di wilayah Kepulauan Mentawai.

Secara umum, dibawah ini digambarkan struktur pelaksana dan skim penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah pascabencana di Kepulauan Mentawai.

Gambar V.4. Skim Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Percepatan Pembangunan Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut:

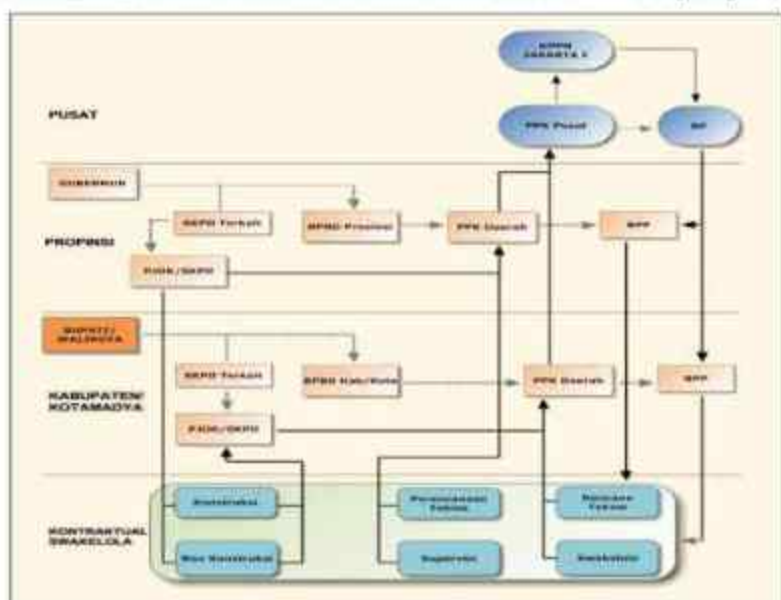
1. Menetapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional

3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Menyiapkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan jenis kegiatannya, maka secara garis besar mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang di bedakan menjadi:

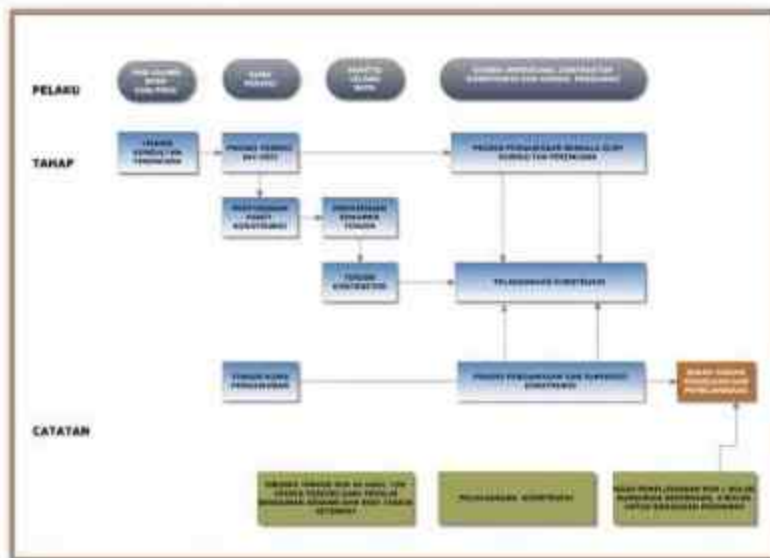
1. Rehabilitasi Rekonstruksi non-bantuan langsung masyarakat, baik untuk kegiatan konstruksi maupun non konstruksi. Kegiatan konstruksi ini diutamakan untuk pembangunan hunian relokasi penduduk, sedangkan non-konstruksi lebih diutamakan untuk tujuan pemulihan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kontraktual swakelola oleh SKPD terkait. Sumber pendanaan berasal dari APBN BNPB yang di berikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala BNPB.

Gambar V.5. Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non-bantuan Langsung Masyarakat.



2. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk gedung milik pemerintah, prasarana dan infrastruktur perkotaan yang dilakukan oleh SKPD terkait melalui kontrak dengan pihak ketiga (kontraktor). Sumber pendanaan berasal dari APBN BNPB BA-999 sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala BNPB.

Gambar V.6. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Pembangunan Gedung Milik Pemerintah, Prasarana dan Infrastruktur (Kontraktual)



3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan, termasuk pembangunan di areal relokasi, yang bersumber dari kementerian / lembaga dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh kementerian / lembaga terkait sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

V.3. PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN BENCANA

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi, pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana gempa bumi dan tsunami yang cukup signifikan yaitu di subsektor perkebunan dan perikanan, dan sebagian kecil di subsektor peternakan dan perdagangan.

Sesuai arahan Presiden RI dan masukan sektoral, bahwa masyarakat yang bermukim di pesisir pantai perlu di relokasi ke tempat yang lebih aman, yaitu di daerah perbukitan dengan ketinggian minimal 25 m dpl. Dimana hal ini, akan berimplikasi terhadap

perubahan mata pencaharian penduduk yang sebelumnya lebih berorientasi pada kelautan (perikanan) menjadi perkebunan. Guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di lokasi permukiman baru yang lebih berorientasi pada perkebunan, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan pengembangan perkebunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat sebagaimana hasil perhitungan pada tabel di atas adalah sebesar Rp. 114,60 milyar, dengan dukungan pemulihan meliputi:

Sektor Ekonomi	Dukungan Pemulihan
Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kembali di wilayah terkena dampak bencana, untuk tanaman kelapa, pinang dan pandan laut; • Penanaman kebun bibit rakyat; • Pembukaan lahan perkebunan, termasuk penanaman, pengadaan benih, pupuk dan peralatan, serta kegiatan pendampingan
Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan laut; • Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan lengkap, termasuk pengadaan perahu motor, kapal nelayan dan pengadaan peralatan; • Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pesisir; • Pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)
Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bibit ternak (babi dan ayam), beserta pakan, dan obat hewan; • Pengadaan peralatan kesehatan hewan; • Sosialisasi usaha peternakan
Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kembali pasar lingkungan, kios dan warung.

Dalam Upaya bantuan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat atau jangka pendek, maka pembangunan sector ekonomi akan dilakukan melalui skim *Cash for Work* (CfW)/padat karya di mana sekaligus dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat secara cepat guna memberi stimulus bagi perekonomian lokal dan menyediakan peluang-peluang ekonomi produktif dengan mempromosikan pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan individu. Agar tepat sasaran, maka pelaksanaan *Cash for Work* (CfW)/padat karya perlu dilengkapi dengan:

1. Mekanisme monitoring untuk menjaga produktivitas kerja dan target kerja yang jelas;
2. Penentuan tingkat upah program yang tepat supaya tidak menjadi disinsentif bagi masyarakat yang sudah bekerja atau masuknya pekerja dari daerah non-bencana

ke dalam program *Cash for Work* (CfW)/padat karya . Dalam hal ini maka upah *Cash for Work* (CfW)/padat karya sebaiknya ditetapkan di bawah upah tingkat lokal yang ada; dan

3. Kriteria kegiatan yang ditujukan untuk membangun infrastruktur sosial atau membangun keahlian (*skill*) komunitas dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Misalnya pembangunan infrastruktur public dan sektor ekonomi yang akan bermanfaat dalam jangka panjang

V.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 adalah satu kosatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam perspektif jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahap perencanaan terdiri dari: a) penyusunan rencana, b) penetapan rencana, c) pengendalian pelaksanaan rencana dan d) evaluasi kinerja.

Untuk pembiayaan yang bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2006 telah mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, seperti disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.2. Mekanisme Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Sumber Dana APBN

Jenis Laporan	Periode Pelaporan	Pelapor	Penerima Laporan	Tembusan
Laporan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan K/L	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja) b. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi) c. Para Menteri/	a. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi) b. Menteri/Pimpinan LPND c. Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan.	Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi

Jenis Laporan	Periode Pelaporan	Pelapor	Penerima Laporan	Tembusan
		Pimpinan Lembaga	dan Menteri PAN	
Laporan dalam rangka pelaksanaan Dana Dekonsentrasi di SKPD Provinsi	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan b. Penanggungjawab Program c. Kepala SKPD d. Kepala Bappeda Provinsi	a. Penanggungjawab Program b. Kepala SKPD c. Menteri/Pimpinan LPND dan Kepala Bappeda Provinsi d. Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri	
laporan dalam rangka pelaksanaan Dana Pembantuan di SKPD Kabupaten/ Kota	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan b. Penanggungjawab Program c. Kepala SKPD d. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	a. Penanggungjawab Program b. Kepala SKPD c. Menteri/Kepala lembaga terkait dan Kepala Bappeda Kab/Kota d. Kepala Bappeda Provinsi	Kepala SKPD Provinsi dengan tugas dan kewenangan yang sama

Sumber: Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2006

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 31 Ayat 4 yang berbunyi " *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan untuk tingkat Pemda diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.*"

Pelaporan kinerja keuangan dan instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2006, yang berpedoman pada Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam satu periode, sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan

APBN/APBD. Pada prinsipnya, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja harus menunjukkan konsistensi antara input (pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dana) dengan keluaran / *output* (dalam bentuk barang/jasa) dengan indikator kinerja yang terukur. Mekanisme Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dengan rinci dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 untuk dilaksanakan. Dalam peraturan ini terkandung upaya pengawasan dan pengendalian yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan digunakan 5 (lima) indikator yaitu:

1. **Konsistensi** pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. **Koordinasi** antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. **Kapasitas** lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja; serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

V.5. KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Strategi pengakhiran masa tugas Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus disusun sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran guna memastikan kesinambungan operasi dan pemeliharaan asset rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan lembaga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Sesuai amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007, maka dalam situasi tidak terjadi bencana maupun pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana, pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana, melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan Kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana dan penyusunan dokumen RPB dan RAD PRB;
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana, melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang melalui review tata ruang berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA-SKPD dan RTRW;
3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
4. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dari sumber APBD secara memadai.
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah melalui mekanisme perijinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait.

Sehubungan dengan amanat tersebut di atas, maka jembatan yang akan memastikan adanya kesinambungan dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menuju pembangunan yang lebih baik berkelanjutan (*Building Back Better*) yaitu melalui upaya Pengurangan Risiko Bencana. Beberapa aspek yang perlu disiapkan untuk menuju upaya *Building Back Better* adalah sebagaimana hal-hal yang di sarankan berikut.

1. Aspek Peraturan dan Kelembagaan terkait Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.

Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait aspek peraturan dan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pemerintah yang terkait lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana mandat dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka selain pemerintah provinsi diwajibkan untuk membentuk BPBD, perlu diterbitkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencerminkan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sudah mengedepankan aspek pengurangan risiko bencana. Hal ini juga dimaksudkan sebagai pelengkap, di mana Provinsi Sumatera Barat pada saat ini telah memiliki BPBD Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009.
- b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan melengkapi berfungsinya peran BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 17 tahun 2008.
- c. Pembentukan Forum PRB multi pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten yang akan mempunyai peran utama dalam membantu pemerintah untuk advokasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

2. Aspek Perencanaan dan Mitigasi Bencana

Salah satu hal yang penting untuk kepastian implementasi pengurangan risiko bencana (PRB) adalah pengarusutamaan PRB ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Mentawai melalui dukungan arahan dan pedoman dari BNPB dan kementerian / lembaga terkait di tingkat pusat, yaitu:

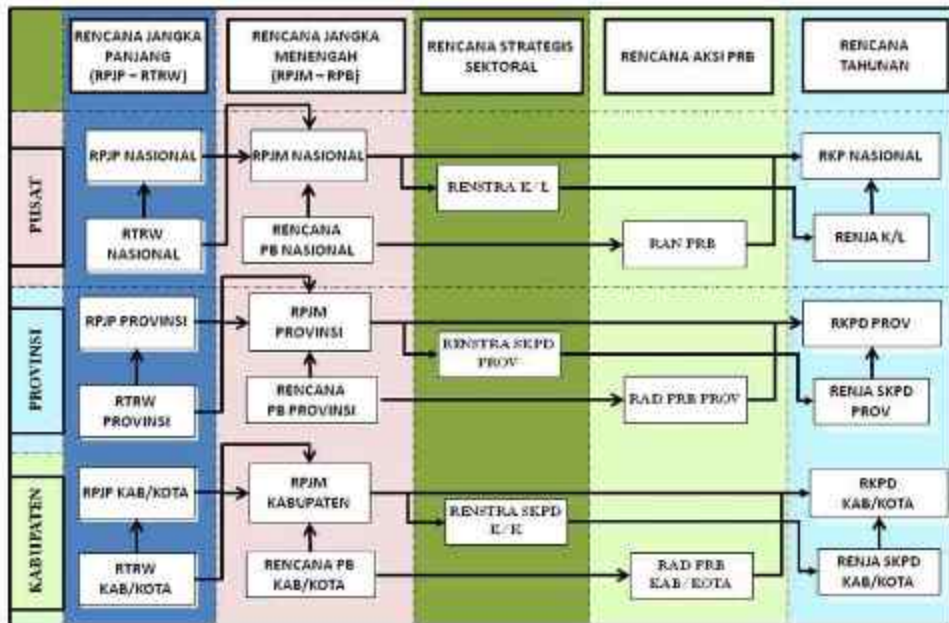
- a. Penyusunan analisis risiko bencana dan peta risiko bencana tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sesuai ancaman bencana yang ada.
- b. Pengembangan data dan informasi bencana yang diintegrasikan dengan sistem data dan informasi bencana (DIB) BNPB.

- c. Pengesahan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2029 yang disusun berbasis mitigasi bencana dengan peta multi ancaman (*hazard map*) masih dipandang perlu dilengkapi dengan analisis dan peta risiko bencana (*risk analysis & risk map*).
 - d. Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis mitigasi bencana yang mengacu pada revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami 25 Oktober 2010; yang menjadi dasar penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan relokasi permukiman pasca bencana.
 - e. Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada periode perencanaan jangka menengah tahap berikutnya tahun 2012, maka aspek pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah daerah dan selanjutnya harus masuk dalam salah satu agenda prioritas pembangunan yang dicerminkan dalam RPJMD. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan program pengurangan risiko bencana.
 - f. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat kabupaten. RPB disusun dengan dasar analisis risiko bencana guna dapat mengembangkan strategi, kebijakan dan pilihan tindakan pada tahap pra-bencana, saat terjadi bencana dan tahap pasca bencana. Sebagaimana Undang-undang nomor 24 tahun 2007, RPB memiliki periode waktu 5 (lima) tahun, dan ini harus sejalan dengan RPJMD.
 - g. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa RAD PRB di susun juga berdasarkan pengkajian risiko bencana untuk periode waktu 3 (tiga) tahun.
 - h. Penyusunan rencana mitigasi di kawasan pesisir Kepulauan Mentawai yang terpadu dengan RTRW dan Rencana Penanggulangan Bencana, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
3. **Pengarusutamaan PB dan PRB ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**

Untuk menjamin keberlangsungan pengurangan risiko bencana sesuai kebijakan dan strategi yang disusun, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memastikan

implementasi PB dan PRB yang sudah diintegrasikan kedalam sistem perencanaan pembangunan. Gambar berikut memperlihatkan kerangka koordinasi perencanaan penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.

Gambar V.7. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis Mitigasi Bencana

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2000-2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 4 tahun 2003 pada saat ini dalam kaji ulang sehubungan dengan adanya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, termasuk juga dengan adanya pertimbangan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyusunan RTRW ini juga perlu mempertimbangkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketiga undang –undang tersebut pada prinsip nya

akan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan pengaturan tata ruang wilayah, terutama terkait pengelolaan kawasan budidaya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.

Terkait dengan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan di Kepulauan Mentawai, maka revisi rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan analisis risiko bencana yang bersumber dari ancaman bencana (*hazard*) di wilayah Kepulauan Mentawai, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, serta ancaman bencana karena perubahan iklim seperti abrasi pantai dan kenaikan muka air laut. Pola permukiman masyarakat yang saat ini cenderung berkembang mengikuti garis pantai dan sepanjang sungai perlu di atur lebih tegas lagi berdasarkan peta zonasi dan peta risiko bencana dengan skala yang lebih rinci untuk ancaman gempa bumi, tsunami dan abrasi pantai. Pengaturan dan penegakan hukum pengaturan kawasan permukiman di sepanjang garis pantai ini juga harus memperhatikan persyaratan ketinggian minimum dari permukaan laut dalam rangka mengantisipasi terjadinya tsunami, gelombang pasang dan ancaman naiknya permukaan laut karena dampak perubahan iklim.

Dalam melakukan kaji ulang RTRW ini, di perlukan adanya koordinasi yang lebih intensif lagi terkait mitigasi bencana dengan kementerian / lembaga terkait ancaman bencana, seperti BMKG, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Bakorsutanal, LIPI serta Kementerian RISTEK.

5. Sektor Perumahan, Bangunan Umum dan Infrastruktur Perkotaan.

Pembangunan perumahan, fasilitas permukiman, bangunan umum dan infrastruktur perkotaan harus mempertimbangkan unsur pengurangan risiko bencana melalui berbagai peraturan, kebijakan dan penegakan hukum. Beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Peraturan terkait pembangunan rumah dan bangunan tahan gempa, tsunami dan ancaman bencana lainnya (*building codes*). Hal ini perlu diatur mulai dari penerbitan peraturan daerah sampai dengan pengaturan dalam rancangan tata bangunan dan tata lingkungan;
- b. *Retrofitting* atau renovasi bangunan sekolah, rumah sakit, bangunan kantor dan bangunan umum lainnya sesuai dengan standar konstruksi tahan gempa, angin puting beliung dan ancaman bencana lainnya;
- c. Pengembangan *Early Warning System* (EWS) tsunami yang diintegrasikan sistem regional yang ada, yaitu Indian Ocean Tsunami EWS (IO-TWES) sampai dengan

tingkat komunitas (*community-based EWS*), termasuk penyusunan SOP dan pengadaan peralatannya.

6. Percepatan Pembangunan berbasis Mitigasi Bencana

Dalam periode pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah di arahkan pula perlunya pembangunan infrastruktur utama yang ditujukan untuk upaya percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan rencana indikasi kebutuhan dana dicantumkan pada table di atas, maka komponen percepatan pembangunan difokuskan pada pembangunan prasarana transportasi darat / jalan raya, pelabuhan dan pengembangan bandar udara, serta pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi. Penyusunan rencana detail pembangunan komponen percepatan, termasuk pengembangan disain pola jaringan jalan dan konstruksi, perlu di buat berdasarkan pada pengkajian dan analisis risiko bencana untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga peta risiko bencana. Jika memungkinkan, maka pola jaringan jalan ini perlu mempertimbangkan dan diintegrasikan dengan jalur evakuasi utama. BNPB akan mengkoordinasikan penyusunan pengkajian dan penilaian risiko bencana untuk pembangunan infrastruktur ini.

7. Pemberdayaan Masyarakat terkait PRB melalui Peningkatan Pemahaman dan Pendidikan PRB .

Salah satu aspek yang sangat penting dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis dan bersinambungan dengan memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat, aparat pemerintah dan berbagai multi pemangku kepentingan. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan fasilitasi arahan dan dukungan baik dari BNPB, kementerian/lembaga terkait, organisasi donor internasional dan nasional serta dunia usaha, antara lain meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui berbagai macam metode, seperti kampanye dan sosialisasi melalui media media cetak, diskusi interaktif di radio dan televisi, serta integrasi ke dalam acara budaya lokal.
- b. Mengembangkan kearifan lokal terkait peringatan dini ancaman bencana.
- c. Melakukan integrasi PRB ke dalam sistem pendidikan sekolah sebagaimana yang di tuangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional kepada seluruh Kepala Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota nomor No.70a/MPN/SE/2010 tentang Penganusutamaan PRB di Sekolah.

- d. Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kepada aparat pemerintah daerah dan berbagai multi pemangku kepentingan.
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk upaya mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas sesuai dengan ancaman bencana yang ada melalui kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK).
- f. Perkuatan kesiagaan bencana berbasis komunitas (community based DRR) yang dilaksanakan dalam konteks pembangunan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat.

Gambar V.8. Konstruksi Rangka Baja Rekonstruksi Perumahan NAD – Nias

Bangunan-bangunan Yang Telah Menggunakan Struktur Baja Ringan



BRR Housing Type 36 Plus



Kuwait House Kayee Lhue



Royal Setia Budi



Labuy Couple House



ADB House Banda Aceh



Rumah BRR Type 36 Plus - Simelue

Gambar V.9. Permodelan Pembangunan Rumah Kayu Tahan Gempa Kementerian Pekerjaan Umum

RUMAH KAYU TAHAN GEMPA

Persyaratan Bangunan

1. Bangunan harus terletak di atas tanah yang stabil
2. Denah rumah sebaiknya sederhana dan simetris
3. Roof diangkat ke pondasi
4. Balok kayu (ring balk) dipasang keliling dikat kaku dengan kolom
5. Seluruh kerangka kayu harus terikat secara kaku dan kaku
6. Pada tiap sudut (dinding, lantai, atap) diberi skor kayu pengaku
7. Gunakan kayu kering, pilih bahan atap yang ringan
8. Pilih bahan dinding yang ringan (papan) dan dipaku ke rangka dinding
9. Rangka kuda-kuda papan paku atau kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan plat pengikat
10. Pelaksanaan konstruksi oleh tukang yang berpengalaman

Detail dan sambungan

Detail A
 Ring balk kayu 10/10 cm
 Skor antara ring balk dgn ring balk menggunakan baut menggunakan papan 2/20 cm
 Skor antara balok dgn kolom dgn menggunakan papan 2/20 cm

Detail B
 Skor kayu 5/10 cm
 Balok pengaku kayu 5/10 cm
 Kolom kayu 10/10 cm
 Balok dan papan 2/10 cm

Detail C
 Skor dgn paku besi 4 buah
 Pondasi memuat dari batu bata
 Ring balok kayu 10/10 cm

Detail D
 Skor kayu 5/10 cm
 Kolom kayu 10/10 cm
 Skor dari balok kayu 10/10 cm
 Angkur dari besi diameter 12 mm
 Pondasi memuat dari batu bata

PEDOMAN PRAKTIS PEMBANGUNAN RUMAH KAYU TAHAN GEMPA

1. Pondasi
 2. Rangka kayu
 3. Atap

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
 Jl. Padimura 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Studi Direktorat Perencanaan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2004

V.22

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2006

Gambar V.10. Permodelan Pembangunan Rumah Tahan Gempa Kementerian Riset dan Teknologi



Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi

Gambar V.11. Permodelan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Kementerian Kelautan dan Perikanan



Lokasi Kota Jayapura



Lokasi Kabupaten Tulungagung



Lokasi Kota Bengkulu



Lokasi Kabupaten Tangerang





Lokasi Kabupaten Muko-Muko



Lokasi Kabupaten Tegal



Gambar V.12. Permodelan Pembangunan Rumah Tembok Tahan Gempa
Kementerian Pekerjaan Umum




PEDOMAN TEKNIS



P E M B A N G U N A N



R U M A H T E M B O K T A H A N G E M P A



PERSYARATAN BANGUNAN

1. Bangunan harus terletak di atas tanah yang stabil.
2. Denah bangunan rumah sebaiknya sederhana dan simetris. Stoop diangkur ke pondasi.
3. Gunakan kayu kering, pilih bahan atap yang ringan.
4. Dinding pasangan bata/batako, dipasang angkur setiap jarak vertikal 30 cm yang dijangkarkan ke kolom.
5. Setiap luasan dinding 12 m² harus dipasang kolom praktis.
6. Dipasang balok ring/cincin yang dikat kaku dengan kolom.
7. Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku.
8. Rangka kuda-kuda gantung; pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan plat pengikat.
9. Perhatikan bahan spesi/adukan (1 pc : 4 pasir)
10. Pelaksanaan konstruksi oleh tukang berpengalaman





ALURSIKODE RUMAH TYPE 36

Madya Direktorat Pembinaan Bangunan dan Lingkungan
Direktori Direktorat Cipta Karya/1006

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Jl. Pahlawan 128 Padangpanjang Baru, Jakarta Selatan



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2006

BAB VI

PENUTUP

VI.1. ASPEK LEGAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Sebagai pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2013 dapat ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) atau peraturan perundangan lain sesuai kebutuhan. Bilamana diperlukan, dan didukung oleh data yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pelaksanaan kegiatan yang memperoleh persetujuan Kepala BNPB, maka Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dapat direvisi sebagai amandemen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Dalam kerangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat sebagian besar sumber pendanaan bersumber dari anggaran APBN untuk penanggulangan bencana, selanjutnya perlu diterbitkan ketetapan dan pedoman sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan tentang Sekretaris Utama BNPB selaku KPA atas nama Kepala BNPB penetapan tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Bagian Anggaran 103;
3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang penyelenggaraab koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai tentang penetapan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

5. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011-2013.

VI.2. JANGKA WAKTU RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Jangka waktu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 3 tahun anggaran, yaitu dimulai pada **tahun anggaran 2011** dan diselesaikan pada **tahun anggaran 2013**. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diprioritaskan untuk diselesaikan sampai dengan **tahun anggaran 2012**, sedangkan **percepatan pembangunan** dapat diselesaikan secara bertahap sampai dengan **tahun anggaran 2013**.

VI.3. ASPEK AKUNTABILITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menyelenggarakan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara termasuk kegiatan kebendaharaan umum negara dan meminta keterangan atas tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri, hasil pengawasan BPK dan lembaga pengawasan lainnya.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan perbendaharaan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya sesuai ketentuan perundang-undangannya dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas pendanaan dari sumber bantuan luar negeri diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku. Khususnya bagi akuntabilitas pendanaan dari sumber non pemerintah terutama dari dana masyarakat donatur yang disalurkan melalui perusahaan swasta; melihat besarnya dana yang terkumpul, diperlukan peran pemerintah untuk mengatur agar supaya pengelola bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar sehingga pengelola dapat melakukan audit yang hasilnya diumumkan melalui media cetak nasional. Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada

masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD dapat menggunakan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dan Percepatan Pembangunan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai 2010-2013 sebagai pedoman untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan bantuan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pasca bencana yang dilaksanakan pemerintah daerah, melalui mekanisme konsultasi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Mentawai.

Bilamana diperlukan, Gubernur Sumatera Barat selaku koordinator pelaksana pemulihan pasca bencana dapat membangun system pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pengelolaan informasi sebagai perangkat koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan sekaligus untuk penanganan pengaduan masyarakat korban bencana selama penyelenggaraan pemulihan pasca bencana.

**KORBAN JIWA PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT**

25 OKTOBER 2010

Status Tanggal 22 November 2010

Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Pengungsi	
					KK	Jiwa
1	Kecamatan Sipora Selatan	23				1,248
2	Kecamatan Pagai Selatan	184		3		5,495
3	Kecamatan Pagai Utara	292	5	18		2,129
4	Kecamatan Sikakap	10				2,553
5	Dirawat di rujuk ke Padang		12			
TOTAL		509	17	21		11,425

Sumber: Pusdalops PB Sumbar, 22 November 2010

**REKAPITULASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
di KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT
25 Oktober 2010
Status Tanggal 19 November 2010**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp juta)	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian	Kepemilikan	
					Pemerintah (Rp juta)	Non Pemerintah (Rp juta)
1	PERUMAHAN	105,414.13	10,412.50	115,826.63	13,749.67	102,076.96
	1 Perumahan	91,664.46	10,412.50	102,076.96		102,076.96
	2 Prasarana Lingkungan	13,749.67	-	13,749.67	13,749.67	
2	INFRASTRUKTUR	17,365.00	1,801.44	19,166.44	19,003.60	162.84
	1 Transportasi	17,245.00	1,758.60	19,003.60	19,003.60	
	2 Air dan Sanitasi	120.00	42.84	162.84		162.84
3	EKONOMI	53,423.85	64,397.77	117,821.61	-	117,821.61
	1 Pertanian	4,658.50	4,465.00	9,123.50		9,123.50
	2 Perkebunan	18,494.00	31,015.00	49,509.00		49,509.00
	3 Peternakan	248.42	1,467.87	1,716.29		1,716.29
	4 Perdagangan	405.00	-	405.00		405.00
	5 Perikanan	21,430.43	22,278.90	43,709.33		43,709.33
	6 Pariwisata	7,700.00	4,745.00	12,445.00		12,445.00
	7 Perindustrian	235.00	402.00	637.00		637.00
	8 Koperasi dan UKM	252.50	24.00	276.50		276.50
4	SOSIAL	16,037.63	-	16,037.63	16,037.63	-
	1 Kesehatan	1,065.68	-	1,065.68	1,065.68	
	2 Pendidikan	7,511.70	-	7,511.70	7,511.70	
	3 Agama	7,460.25	-	7,460.25	7,460.25	
5	LINTAS SEKTOR	79,613.40	188.00	79,441.40	79,441.40	-
	1 Lingkungan Hidup	75,450.00	-	75,450.00	75,450.00	
	2 Pemerintahan	3,258.00	64.00	2,962.00	2,962.00	
	3 Keterlibatan dan Keamanan	905.40	124.00	1,029.40	1,029.40	
TOTAL		271,854.01	76,799.71	348,293.71	128,232.30	220,061.41

**INVENTARISASI DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
di KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT
25 Oktober 2010
Status Tanggal 19 November 2010**

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Data Kerusakan				Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
PERUMUKAN												105,414.13	10,412.50	115,826.63	
1. Perumahan												91,664.46	10,412.50	102,076.96	
	A. Perumahan		879	116	274	1,209			83,856.00	5,193.90	2,613.96	91,664.46	10,412.50	102,076.96	
	Permanen	Kep. Mentawai	176	26	55	unt	48	0.90	27,838.50	1,827.00	863.10	30,528.60		30,528.60	
	Semi permanen	Kep. Mentawai	571	73	173	unt	45	2.00	51,421.50	3,003.70	1,002.80	56,078.10		56,078.10	
	Non Permanen	Kep. Mentawai	132	17	47	unt	38	1.00	4,746.00	343.20	147.86	5,237.06		5,237.06	
	Hunian Sementara	Kep. Mentawai	1,225			unt		0.50					10,412.50	10,412.50	
2. Pras Lings												13,749.67		13,749.67	
	Prasarana Lingkungan Perumahan											13,749.67		13,749.67	
INFRASTRUKTUR												17,365.00	1,801.44	19,166.44	
1. Transportasi												17,365.00	1,758.60	19,003.60	
	A. Transportasi Darat											16,900.00	1,758.60	18,718.60	
	Jembatan												1,758.60	1,758.60	
	Busa 1 (kayu, L=4 m, P=15 m)	Sipora Selatan	16			m		15.00	225.00			225.00		225.00	
	Busa 1 (kayu, L=4 m, P=30 m)	Sipora Selatan	30			m		15.00	450.00			450.00		450.00	
	Mackul (kayu, L=2 m)	Sipora Selatan	60			m		15.00	900.00			900.00		900.00	
	Stasiun 2 (kayu, L=5 m)	Sikakap	14			m		15.00	210.00			210.00		210.00	
	Stasiun (kayu, L=5 m)	Sikakap	12			m		15.00	180.00			180.00		180.00	
	Sabejungjung (kayu, L=2 m)	Pagai Utara	10			m		15.00	150.00			150.00		150.00	
	Saunangayak (kayu, L=4 m)	Pagai Utara	40			m		15.00	600.00			600.00		600.00	
	Palukel (kayu, L=4 m)	Pagai Utara	25			m		15.00	375.00			375.00		375.00	
	Majinang (kayu, L=4 m)	Pagai Utara	15			m		15.00	225.00			225.00		225.00	
	Pasinuk (kayu, L=4 m)	Pagai Utara	25			m		15.00	375.00			375.00		375.00	
	Paspeal (beton, L=2 m, P=20 m)	Pagai Utara	20			m		50.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
	Sabrak (P=15 m)	Pagai Selatan	15			m		50.00	750.00			750.00		750.00	
	Euparabol (beton/kayu)	Pagai Selatan	10			m		50.00	500.00			500.00		500.00	
	Muntakaci	Pagai Selatan	15			m		50.00	750.00			750.00		750.00	
	Muntal Besar	Pagai Selatan	20			m		50.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
	Purungal	Pagai Selatan	15			m		50.00	750.00			750.00		750.00	
	Tepek	Pagai Selatan	15			m		50.00	750.00			750.00		750.00	
	Bulesat	Pagai Selatan	20			m		50.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
	Mbanai	Pagai Selatan	15			m		50.00	750.00			750.00		750.00	
	Telake	Sikakap	60			m		50.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
	Pasceat	Sipora Selatan	60			m		50.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
	Gorong Gorong (Bocor/wat)														
	Dusun Kadel 1 (L=2 m)		2			unt		5.00	10.00			10.00		10.00	
	Dusun Kadel 2 (L=2 m)		2			unt		5.00	10.00			10.00		10.00	
	B. Transportasi Air											285.00		285.00	
	Dermaga/pelabuhan	Sipora Selatan	1			unt		200.00	200.00			200.00		200.00	
	Pis Pengawasan	Sipora Selatan	1			unt		85.00	85.00			85.00		85.00	
2. Air dan Sanitasi												120.00	42.84	162.84	
	Sarana Air Bersih Dusun Dalekat (Dekat)	Pagai Selatan				1 jamban		120.00			120.00	120.00	42.84	162.84	
EKONOMI												63,423.88	44,367.77	111,791.65	
1. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan												23,400.62	36,947.87	60,348.49	
	A. Pertanian											4,658.40	4,165.00	8,823.40	
	Pennisen Lahan	Kep. Mentawai	110			Ha		4.00	440.00			440.00		440.00	
	Recovery kebun/lahan	Kep. Mentawai	110			Ha		35.00	3,850.00			3,850.00		3,850.00	
	Rippling	Kep. Mentawai													
	-Pad	Kep. Mentawai	50			Ha		2.00	100.00			100.00	1,675.00	1,675.00	
	Take	Kep. Mentawai	10			Ha		1.00	10.00			10.00	675.00	685.00	

**INVENTARISASI DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT
25 Oktober 2010
Status Tanggal 19 November 2010**

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Data Kerusakan				Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Perkiraan Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
	- Pisang	Kep. Mentawai	50			Ha	1.50	75.00			75.00	100.00	175.00		
	Pemeliharaan	Kep. Mentawai					-								
	-Padi	Kep. Mentawai	50			Ha	0.70	35.00			35.00	1,417.50	1,452.50		
	-Tape	Kep. Mentawai	10			Ha	0.90	5.00			5.00	697.99	702.99		
	-Pisang	Kep. Mentawai	50			Ha	0.60	30.00			30.00	60.00	120.00		
	Pemeliharaan	Kep. Mentawai					-								
	-Hand Traktor	Kep. Mentawai	5			Unit	17.50	87.50			87.50		87.50		
	-Cangkul	Kep. Mentawai	270			Unit	0.05	13.50			13.50		13.50		
	-Alat Penyiraman	Kep. Mentawai	100			Unit	0.13	12.50			12.50		12.50		
	B. Perkebunan										18,484.00	31,015.00	49,509.00		
	Pemeliharaan Lahan	Kep. Mentawai	438			Ha	4.00	1,752.00			1,752.00		1,752.00		
	Recovery kebun/lahan	Kep. Mentawai	438			Ha	25.00	15,300.00			15,300.00		15,300.00		
	Papierling	Kep. Mentawai					-	-							
	-Kakas	Kep. Mentawai	21			Ha	2.50	52.50			52.50	4,725.00	4,777.50		
	-Kelapa	Kep. Mentawai	335			Ha	2.00	670.00			670.00	25,398.00	26,068.00		
	-Pisang	Kep. Mentawai	15			Ha	3.50	52.50			52.50	482.00	534.50		
	-Duren	Kep. Mentawai	50			Ha	7.00	350.00			350.00	400.00	750.00		
	-Niam	Kep. Mentawai	17			Ha	4.00	68.00			68.00	102.00	170.00		
	Pemeliharaan	Kep. Mentawai					-	-							
	-Kakas	Kep. Mentawai	21			Ha	0.50	10.50			10.50		10.50		
	-Kelapa	Kep. Mentawai	335			Ha	0.50	167.50			167.50		167.50		
	-Pisang	Kep. Mentawai	15			Ha	0.50	7.50			7.50		7.50		
	-Duren	Kep. Mentawai	50			Ha	0.50	25.00			25.00		25.00		
	-Niam	Kep. Mentawai	17			Ha	0.50	8.50			8.50		8.50		
	C. Peternakan										748.42	1,467.87	1,716.29		
	Kandang Ayam	Kep. Mentawai	1,150			m ²	0.10	115.00			115.00	290.00	405.00		
	Kandang Babi	Kep. Mentawai	1,300			m ²	0.10	130.00			130.00	1,170.00	1,300.00		
	Kandang Ili	Kep. Mentawai	24			m ²	0.10	2.40			2.40	7.87	10.27		
2. Perdagangan											405.00		405.00		
	Keswaning (rumah)	Pagai Utara	13			unit	15.00	195.00			195.00		195.00		
		Pagai Selatan	14			unit	15.00	210.00			210.00		210.00		
3. Perikanan											21,439.43	22,278.90	43,708.33		
	Coel Daks 100 liter	Pagai Selatan	12			unit	2.00	24.00			24.00		24.00		
		Sirop	30			unit	2.00	60.00			60.00		60.00		
		Pagai Utara	17			unit	2.00	34.00			34.00		34.00		
		Sirop Selatan	8			unit	2.00	16.00			16.00		16.00		
	Coel Daks 500 liter	Sirop	14			unit	7.00	98.00			98.00		98.00		
	Coel Daks 1000 liter	Sirop	8			unit	11.00	88.00			88.00		88.00		
	Karaba Jaring Aeng	Pagai Selatan	6			unit	50.00	300.00			300.00		300.00		
		Sirop	7			unit	50.00	350.00			350.00		350.00		
		Pagai Utara	3			unit	50.00	150.00			150.00		150.00		
		Sirop Selatan	2			unit	50.00	100.00			100.00		100.00		
	Rumpon	Pagai Selatan	17			unit	12.50	212.50			212.50		212.50		
		Pagai Utara	79			unit	12.50	987.50			987.50		987.50		

**INVENTARISASI DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT
25 Oktober 2010
Status Tanggal 19 November 2010**

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Data Kerusakan				Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Misi Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Perkiraan Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
	Perahu Tanpa Motor	Pagai Selatan	132			unt		100	132,00	-	-	132,00	4.149,00	4.331,00	
		Sikrap	43			unt		100	43,00	-	-	43,00	393,00	1.023,00	
		Pagai Utara	125			unt		100	125,00	-	-	125,00	2.094,00	2.493,00	
		Gicora Selatan	58			unt		100	58,00	-	-	58,00	1.050,00	1.018,00	
	Perahu Motor 5 HP	Pagai Selatan	43			unt		850	365,50	-	-	365,50	1.070,50	2.236,00	
		Sikrap	28			unt		850	238,00	-	-	238,00	1.218,00	1.456,00	
		Pagai Utara	73			unt		850	612,50	-	-	612,50	3.132,00	3.744,50	
		Gicora Selatan	42			unt		850	357,00	-	-	357,00	1.897,00	2.184,00	
	Perahu Motor 15 HP	Pagai Selatan	17			unt		2750	467,50	-	-	467,50	734,50	1.207,00	
		Sikrap	7			unt		2750	192,50	-	-	192,50	304,50	497,00	
		Pagai Utara	21			unt		2750	577,50	-	-	577,50	913,50	1.491,00	
		Gicora Selatan	17			unt		2750	467,50	-	-	467,50	734,50	1.207,00	
	Perahu Motor 25 HP	Pagai Selatan	11			unt		4200	467,50	-	-	467,50	478,50	946,00	
		Sikrap	8			unt		4200	340,00	-	-	340,00	348,00	688,00	
		Pagai Utara	13			unt		4200	540,00	-	-	540,00	522,00	1.062,00	
		Gicora Selatan	9			unt		4200	382,50	-	-	382,50	361,50	744,00	
	Kopi Melekan 5 GT	Pagai Utara	2			unt		18000	280,00	-	-	280,00	280,00	720,00	
		Gicora Selatan	2			unt		18000	300,00	-	-	300,00	300,00	720,00	
	Jaring Silet	Pagai Selatan	300			unt		0,45	125,00	-	-	125,00	-	125,00	
		Pagai Utara	536			unt		0,19	263,70	-	-	263,70	-	263,70	
		Gicora Selatan	239			unt		0,45	130,05	-	-	130,05	-	130,05	
	Pancing Ular	Pagai Selatan	200			unt		0,31	62,75	-	-	62,75	-	62,75	
		Sikrap	75			unt		0,31	23,53	-	-	23,53	-	23,53	
		Pagai Utara	332			unt		0,31	113,58	-	-	113,58	-	113,58	
		Gicora Selatan	274			unt		0,31	85,37	-	-	85,37	-	85,37	
	Bawal aring	Sikrap	350			unt		1486	5.127,50	-	-	5.127,50	-	5.127,50	
		Pagai Utara	519			unt		1402	7.693,35	-	-	7.693,35	-	7.693,35	
	4. Pariwisata											7.700,00	4.745,00	12.445,00	
	Resort	Pagai Utara	1			unt		3.500,00	-	-	3.500,00	-	2.900,00	6.400,00	
		Gicora Selatan	1			unt		2.500,00	-	-	2.500,00	-	1.825,00	4.325,00	
	Peralatan resort	Pagai Utara	1			unt		1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	
		Gicora Selatan	1			unt		700,00	-	-	700,00	-	-	700,00	
5. Perindustrian											235,00	402,00	637,00		
Industri Manufaktur	Bangunan	Pagai Selatan				unt					50,00	50,00	24,00	84,00	
	Industri Kecil	Gicora Selatan	14			unt		12,00	175,00	-	-	175,00	378,00	553,00	
	Datang dan Peralatan														
6. Koperasi dan UKM												252,50	24,00	276,50	
Koperasi	- Bangunan	Pagai Utara	1			unt		87,50	-	-	87,50	-	12,00	99,50	
		Sikrap	1			unt		105,00	-	-	105,00	-	10,00	117,00	

**INVENTARISASI DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT
25 Oktober 2010
Status Tanggal 19 November 2010**

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Data Kerusakan				Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
	Barang	Pagai Utara	1			unit		30,00			30,00			30,00	
		Gilakop	1			unit		30,00			30,00			30,00	
SOSIAL											16.037,63			16.037,63	
1. Kesehatan											1.065,68			1.065,68	
	Pondok	Pagai Selatan	3			unit	56	350	411,00		411,00			411,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Pondok		3			unit			41,16		41,16			41,16	
	Puskesmas Pembantu	Pagai Selatan	1			unit	56	350	137,20		137,20			137,20	
	Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas Pembantu		1			unit			13,72		13,72			13,72	
	Puskesmas	Pagai Selatan	1			unit	120	350	420,00		420,00			420,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas		0			unit			42,00		42,00			42,00	
2. Pendidikan											7.511,70			7.511,70	
	Gedung TK (1 ruang)	Pagai Selatan	1			unit		137,20	137,20		137,20			137,20	
	Peralatan dan Perlengkapan TK					unit			6,88		6,88			6,88	
	Gedung SD (4 ruang)	Sipora Selatan	1			unit		548,80	548,80		548,80			548,80	
	Peralatan dan Perlengkapan SD					unit			27,44		27,44			27,44	
	Gedung SD (7 ruang)	Pagai Selatan	3			unit		660,40	2.381,20		2.381,20			2.381,20	
	Peralatan dan Perlengkapan SD					unit			144,00		144,00			144,00	
	Gedung SD (7 ruang)	Pagai Utara	3			unit		660,40	2.381,20		2.381,20			2.381,20	
	Peralatan dan Perlengkapan SD					unit			144,00		144,00			144,00	
	Gedung SMP (4 ruang)	Pagai Selatan	1			unit		705,60	705,60		705,60			705,60	
	Peralatan dan Perlengkapan SMP					unit			35,28		35,28			35,28	
3. Agama											1.460,75	0,00		1.460,75	
	Gereja	Sipora Selatan	3			unit		400,00	1.470,00		1.470,00			1.470,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Gereja					unit			73,50		73,50			73,50	
	Gereja	Pagai Selatan	3			unit		400,00	1.470,00		1.470,00			1.470,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Gereja					unit			73,50		73,50			73,50	
	Gereja	Pagai Utara	4			unit		400,00	1.960,00		1.960,00			1.960,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Gereja					unit			98,00		98,00			98,00	
	Mesjid	Sipora Selatan	2			unit		735,00	1.470,00		1.470,00			1.470,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Mesjid					unit			73,50		73,50			73,50	
	Mesjid	Pagai Utara	1			unit		735,00	735,00		735,00			735,00	
	Peralatan dan Perlengkapan Mesjid					unit			36,75		36,75			36,75	
LINTAS SEKTOR											79.613,40	188,00		79.441,40	
1. Pemerintahan											1.248,00	64,00		2.962,00	
	1. Bangunan Kantor														
	Kantor Kepala Desa	Dusun Tapak	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	
	Gedung Perhutungan	Dusun Tapak	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	
	Kantor Camat	Pagai Utara Ds Saungangan	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	
	Rumah Dinas Camat	Malakokop, Pagai Selatan	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	
		Sipora Selatan	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	
		Malakokop, Pagai Selatan	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Utara Ds Batumunga	1			unit	45	400	180,00		180,00			180,00	

**INVENTARISASI DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
di KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT
25 Oktober 2010
Status Tanggal 18 November 2010**

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Data Kerusakan				Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Perkiraan Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
		Pegai Utara Des Saumangaya, Des Raubukuk	1			unt	45	400	180.00			180.00		180.00	
		Pegai Utara Des Saumangaya, Des Pasipuat	2			unt	45	400	360.00			360.00		360.00	
		Siopa Selatan, Des Dehau	2			unt	45	400	360.00			360.00		360.00	
		Siopa Selatan, Des Benufo	2			unt	45	400	360.00			360.00		360.00	
	Rumah Dinas Dokter	Malakokok, Faga Selatan	1			unt	45	400	180.00			180.00		180.00	
	Rumah Dinas Paramedis	Malakokok, Faga Selatan	1			unt	45	400	180.00			180.00		180.00	
	Tower Telepon Desa	Fulasa	1			unt	45	400	180.00			180.00		180.00	
		Esau	1			unt	45	400	180.00			180.00		180.00	
		Benufo	1			unt	45	400	180.00			180.00		180.00	
		Nilai kerusakan peralatan pertanahan											64.00	64.00	
2 - Keterlibatan dan Kesaminan (TMIPOLRI)												905.40	134.00	1.039.40	
	1 - Bangunan Kantor														
	Rua Polai	Semua Kecamatan	15			unt	12	400	720.00			720.00		720.00	
	Rua Polai Sementara												120.00	120.00	
	Kantor Koramil	Siopa Selatan	1			unt	45	400			18.00	18.00		18.00	
	Kantor Koramil	Sikatap	1			unt	45	400			18.00	18.00		18.00	
	Kantor POLSEK	Sikatap	1			unt	45	400			18.00	18.00		18.00	
	Kantor POLSEK	Siopa Selatan	1			unt	45	400			18.00	18.00		18.00	
		Nilai kerusakan peralatan pertanahan										113.40		113.40	
		Biaya pembebasan											4.00	4.00	
3 - Lingkungan Hidup:												75.450.00	0.00	75.450.00	
	Hutan Bakau	Semua Kecamatan	150			ha		3	4,000			450.00		450.00	
	Tanambi Karang	Semua Kecamatan	10.000			ha		7.5	75,000.00			75,000.00		75,000.00	
	TOTAL											271.854.01	76.796.71	348.650.71	

**ASUMSI PENILAIAN KERUSAKAN dan KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

No.	Sektor/Sub-Sektor	Asumsi Penilaian Kerusakan			Asumsi Penilaian Kerugian	Keterangan
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan		
1.	Sektor Perumahan					
	Bangunan Rumah Permanen	penilaian kerusakan berat bangunan rumah permanen menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan bangunan Rp. 3,5 juta/m ² x 100% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)	jumlah rumah rusak sedang diasumsikan 10% dari jumlah rumah rusak berat. penilaian kerusakan berat bangunan rumah permanen menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan bangunan Rp. 3,5 juta/m ² x 50% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)	penilaian kerusakan berat bangunan rumah permanen menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan bangunan Rp. 3,5 juta/m ² x 10% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)		kerusakan; harga satuan bangunan per /m ² bersumber dari SK. Kadis PU Mentawai
	Bangunan Rumah Semi Permanen	penilaian kerusakan berat bangunan rumah semi permanen menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan Rp. 2 juta/m ² x 100% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)	penilaian kerusakan berat bangunan rumah semi permanen menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan Rp. 2 juta/m ² x 50% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)	penilaian kerusakan berat bangunan rumah semi permanen menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan Rp. 2 juta/m ² x 10% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)		
	Bangunan Non Permanen	penilaian kerusakan berat bangunan rumah tidak permanen menggunakan asumsi luas bangunan 36m ² dengan asumsi harga satuan bangunan Rp. 1 juta/m ² x 100% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)	penilaian kerusakan berat bangunan rumah tidak permanen menggunakan asumsi luas bangunan 36m ² dengan asumsi harga satuan bangunan Rp. 1 juta/m ² x 50% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)	penilaian kerusakan berat bangunan rumah tidak permanen menggunakan asumsi luas bangunan 36m ² dengan asumsi harga satuan bangunan Rp. 1 juta/m ² x 10% (luas bangunan x harga satuan x bobot kerusakan)		
	Hunian Sementara (Huntara)	Kebutuhan jumlah hunian sementara lazimnya dihitung berdasarkan jumlah rusak berat, akan tetapi kondisi di Kepulauan Mentawai berbeda, dimana ada kebijakan relokasi. Sehingga kebutuhan huntara dihitung berdasarkan jumlah KK yang akan direlokasi.			Sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh BNPB dengan luasan 24 m ² per unit seharga Rp. 8,8 jt dengan jumlah kebutuhan huntara 1.028 unit.	
	Pra sarana Lingkungan (jalan lingkungan dan sanitasi)	faktor pengali rusak berat (bobot kerusakan) = 1	faktor pengali rusak sedang (bobot kerusakan) = 0,5	faktor pengali rusak ringan (bobot kerusakan) = 0,1	Nilai kerusakan prasarana lingkungan diasumsikan 15% dari total nilai kerusakan perumahan.	
2.	Sektor Infrastruktur					
	Transportasi					
	Jalan Kabupaten	Tidak terdapat data kerusakan jalan kabupaten	Tidak terdapat data kerusakan jalan kabupaten	Tidak terdapat data kerusakan jalan kabupaten		
	Jembatan Kabupaten	Sebagian besar konstruksi jembatan terbuat dari kayu dengan asumsi pembangunan jembatan per-m ² senilai Rp. 15 juta (panjang x harga satuan per m x faktor pengali rusak berat)	Sebagian besar konstruksi jembatan terbuat dari kayu dengan asumsi pembangunan jembatan per-m ² senilai Rp. 15 juta (panjang x harga satuan per m x faktor pengali rusak sedang)	Sebagian besar konstruksi jembatan terbuat dari kayu dengan asumsi pembangunan jembatan per-m ² senilai Rp. 15 juta (panjang x harga satuan per m x faktor pengali rusak ringan)		
	Gorong - gorong (Box Curvet)	penilaian kerusakan berat gorong-gorong menggunakan asumsi pembangunan 1 unit gorong gorong senilai Rp. 5 juta (unit x harga satuan x faktor pengali rusak berat)	penilaian kerusakan berat gorong-gorong menggunakan asumsi pembangunan 1 unit gorong gorong senilai Rp. 5 juta (unit x harga satuan x faktor pengali rusak sedang)	penilaian kerusakan berat gorong-gorong menggunakan asumsi pembangunan 1 unit gorong gorong senilai Rp. 5 juta (unit x harga satuan x faktor pengali rusak ringan)		
	Air dan Sanitasi	merupakan data dan informasi dari pengelola jaringan air bersih di Kabupaten Mentawai				
	Jaringan air bersih	merupakan data dan informasi dari pengelola jaringan air bersih di Kabupaten Mentawai				
3.	Sektor Sosial					
	Kesehatan					

**ASUMSI PENILAIAN KERUSAKAN dan KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

No.	Sektor/Sub-Sektor	Asumsi Penilaian Kerusakan			Asumsi Penilaian Kerugian	Keterangan
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan		
	Puskesmas	penilaian kerusakan berat bangunan puskesmas menggunakan asumsi luas bangunan 170m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	Peralatan Puskesmas	10% dari nilai bangunan rusak berat	10% dari nilai bangunan rusak sedang	10% dari nilai bangunan rusak ringan		
	Puskesmas pembantu	penilaian kerusakan berat bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi luas bangunan 56m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	Peralatan Puskesmas Pembantu	10% dari nilai bangunan rusak berat	10% dari nilai bangunan rusak sedang	10% dari nilai bangunan rusak ringan		
	Polindes	penilaian kerusakan berat bangunan posyandu menggunakan asumsi luas bangunan 56m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan posyandu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan posyandu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	Peralatan polindes	10% dari nilai bangunan rusak berat	10% dari nilai bangunan rusak sedang	10% dari nilai bangunan rusak ringan		
	Pendidikan					
	Sekolah Dasar	penilaian kerusakan berat bangunan sekolah dalam satuan ruang kelas belajar (RKB) dengan asumsi 1 RKB seluas 56m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x RKB x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan RKB menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan RKB menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	SMP	penilaian kerusakan berat bangunan sekolah dalam satuan ruang kelas belajar (RKB) dengan asumsi 1 RKB seluas 72m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x RKB x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan RKB menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan RKB menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	TK	penilaian kerusakan berat bangunan sekolah dalam satuan ruang kelas belajar (RKB) dengan asumsi 1 RKB seluas 56m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x RKB x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan RKB menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan RKB menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		

**ASUMSI PENILAIAN KERUSAKAN dan KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

No.	Sektor/Sub-Sektor	Asumsi Penilaian Kerusakan			Asumsi Penilaian Kerugian	Keterangan
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan		
	Agama					
	Masjid	penilaian kerusakan berat bangunan puskesmas menggunakan asumsi luas bangunan 300m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	Gereja	penilaian kerusakan berat bangunan puskesmas menggunakan asumsi luas bangunan 300m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 3,5 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
4.	Sektor Ekonomi					
	Pertanian					
		Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	Perikanan					
		Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan		
	Peternakan					
		Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	Industri					
		Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	Perdagangan					
		Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	Pariwisata					
	Hotel/Penginapan/ fasilitas pariwisata	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai		
5.	Lintas Sektor					
	Unkungan Hidup					

ASUMSI PENILAIAN KERUSAKAN dan KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010

No.	Sektor/Sub-Sektor	Asumsi Penilaian Kerusakan			Asumsi Penilaian Kerugian	Keterangan
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan		
	Hutan Mangrove	Data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	Terumbu Karang	Data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Data diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai		
	Pemerintahan					
	Bangunan Kantor Desa	penilaian kerusakan berat bangunan puskesmas menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 4 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		
	Rumah Dinas	penilaian kerusakan berat bangunan puskesmas menggunakan asumsi luas bangunan 45m ² dengan asumsi harga satuan tertinggi bangunan per-m ² senilai Rp. 4 juta (luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan sedang bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 50% dari nilai kerusakan berat (50% x luas bangunan x harga satuan)	penilaian kerusakan ringan bangunan puskesmas pembantu menggunakan asumsi 10% dari nilai kerusakan berat (10% x luas bangunan x harga satuan)		

**REKAPITULASI PENILAIAN DAMPAK TERHADAP KEMANUSIAAN (HRNA)
PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

NO	SEKTOR	Penyediaan	Pemfungsian	Pengurangan Risiko	TOTAL	%
A	SEKTOR PERUMAHAN	124.40	124.40	186.60	435.40	1.25
	Perumahan	124.40	124.40	186.60	435.40	1.25
E	INFRASTRUKTUR	1,050.00	36.94	0.00	1,086.94	3.12
	Energi	1,050.00	36.94	0.00	1,086.94	3.12
B	SEKTOR SOSIAL	6,679.30	388.75	2,842.33	9,910.38	28.43
1	Kesehatan	3,106.51	124.40	490.80	3,721.71	10.67
2	Pendidikan	2,516.33	0.00	2,268.41	4,784.73	13.72
3	Agama	0.00	264.35	0.00	264.35	0.76
4	Lembaga Sosial	1,056.46	0.00	83.12	1,139.58	3.27
C	SEKTOR EKONOMI	0.00	21,805.24	0.00	21,805.24	62.54
1	Pertanian	0.00	18,893.33	0.00	18,893.33	54.19
2	Perikanan	0.00	2,239.21	0.00	2,239.21	6.42
3	Industri	0.00	511.55	0.00	511.55	1.47
4	Koperasi	0.00	161.16	0.00	161.16	
D	LINTAS SEKTOR	0.00	892.80	734.20	1,627.00	4.67
1	Pemerintahan	0.00	768.40	734.20	1,502.60	4.31
2	Lingkungan	0.00	124.40	0.00	124.40	0.36
E	INFRASTRUKTUR	1,050.00	36.94	0.00	1,086.94	3.12
	Energi	1,050.00	36.94	0.00	1,086.94	3.12
	TOTAL	7,890.64	24,298.14	4,850.08	34,864.97	100.00

**RINCIAN PENILAIAN DAMPAK TERHADAP KEMANUSIAAN (HRNA)
PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

Sektor / Sub Sektor		Lokasi (Kab/Kota/ Kecamatan)	Jumlah Sasaran	Satuan	Harga Satuan (Rp. dalam juta)	HRNA			Total Kebutuhan (Rp. Juta)	Keterangan
						Penyediaan	Pemfungsian	Pengurangan Risiko		
SEKTOR PERUMAHAN						124.40	124.40	186.60	435.40	
	a	Fasilitasi untuk pengelolaan hunian sementara	Pagai Selatan	4	Komunitas (desa)	10.37		41.47		41.47
			Sikakap	2	Komunitas (desa)	10.37		20.73		20.73
			Pagai Utara	3	Komunitas (desa)	10.37		31.10		31.10
			Sipora Selatan	3	Komunitas (desa)	10.37		31.10		31.10
	b	Musyawarah untuk sosialisasi rencana pemukiman kembali penduduk (relokasi)	Pagai Selatan	4	Komunitas (desa)	10.37	41.47			41.47
			Sikakap	2	Komunitas (desa)	10.37	20.73			20.73
			Pagai Utara	3	Komunitas (desa)	10.37	31.10			31.10
			Sipora Selatan	3	Komunitas (desa)	10.37	31.10			31.10
	c	Pelatihan ketrampilan membangun rumah, fasilitas air bersih dan jamban	Pagai Selatan	4	Komunitas (desa)	15.55			62.20	62.20
			Sikakap	2	Komunitas (desa)	15.55			31.10	31.10
			Pagai Utara	3	Komunitas (desa)	15.55			46.65	46.65
			Sipora Selatan	3	Komunitas (desa)	15.55			46.65	46.65
SEKTOR SOSIAL						6,679.30	388.75	2,842.33	9,910.38	
1.	Kesehatan									
		HRNA				3,106.51	124.40	490.80	3,721.71	
	a	Penyediaan layanan kesehatan umum utk masyarakat terdampak	Pagai Selatan	4,040	Jiwa	0.21	860.82			860.82
			Sikakap	322	Jiwa	0.21	68.61			68.61
			Pagai Utara	1,710	Jiwa	0.21	364.36			364.36
			Sipora Selatan	1,320	Jiwa	0.21	281.26			281.26
	b	Penyediaan makanan tambahan untuk balita	4 Kecamatan	3,209	Balita	0.48	1,531.47			1,531.47
	c	Revitalisasi posyandu	Pagai Selatan	3	Komunitas (posyandu)	10.37		31.10		31.10
			Sikakap	1	Komunitas (posyandu)	10.37		10.37		10.37
			Pagai Utara	7	Komunitas (posyandu)	10.37		72.57		72.57
			Sipora Selatan	1	Komunitas (posyandu)	10.37		10.37		10.37

**RINCIAN PENILAIAN DAMPAK TERHADAP KEMANUSIAAN (HRNA)
PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

Sektor / Sub Sektor		Lokasi (Kab/Kota/ Kecamatan)	Jumlah Sasaran	Satuan	Harga Satuan (Rp. dalam juta)	HRNA			Total Kebutuhan (Rp. Juta)	Keterangan	
						Penyediaan	Pemfungsian	Pengurangan Risiko			
	d	Pemberdayaan masyarakat untuk lingkungan sehat	Pagai Selatan	4	Desa	15.55			62.20	62.20	
			Sikakap	2	Desa	15.55			31.10	31.10	
			Pagai Utara	3	Desa	15.55			46.65	46.65	
			Sipora Selatan	3	Desa	15.55			46.65	46.65	
	e	Penyusunan rencana kontingensi dinas kesehatan	Mentawai	1	Unit	304.20			304.20	304.20	
2.	Pendidikan					2,516.33	-	2,268.41	4,784.73		
	a	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SD terdampak	Sipora Selatan	94	Orang	1.78	166.99			166.99	
			Pagai Selatan	301	Orang	1.78	534.71			534.71	
			Pagai Utara	477	Orang	1.78	847.36			847.36	
			Sikakap	12	Orang	1.78	21.32			21.32	
	b	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SMP terdampak	Sipora Selatan	33	Orang	2.66	87.93			87.93	
			Pagai Selatan	14	Orang	2.66	37.31			37.31	
			Pagai Utara	35	Orang	2.66	93.26			93.26	
			Sikakap	9	Orang	2.66	23.98			23.98	
	c	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SMA terdampak	4 kecamatan	198	Orang	3.55	703.47			703.47	
	d	Analisis risiko bencana berbasis sekolah	Paket	1	Paket	340.20			340.20	340.20	
	e	Pengurangan risiko bencana berbasis sekolah (pemberdayaan)	Sipora Selatan	16	Unit Sekolah	31.10			497.60	497.60	
			Pagai Selatan	20	Unit Sekolah	31.10			622.00	622.00	
			Pagai Utara	10	Unit Sekolah	31.10			311.00	311.00	
			Sikakap	16	Unit Sekolah	31.10			497.60	497.60	
3.	Agama					-	264.35	-	264.35		
	a	Pemulihan kegiatan keagamaan masyarakat	Pagai Selatan	15	Unit tempat ibadah	7.78		116.63		116.63	
			Sikakap	1	Unit tempat ibadah	7.78		7.78		7.78	
			Pagai Utara	12	Unit tempat ibadah	7.78		93.30		93.30	
			Sipora Selatan	6	Unit tempat ibadah	7.78		46.65		46.65	
4.	Lembaga Sosial					1,056.46	-	83.12	1,139.58		
	a	Stimulan untuk ketahanan pangan keluarga	Pagai Selatan	143	Rumah Tangga	2.78	397.56			397.56	

**RINCIAN PENILAIAN DAMPAK TERHADAP KEMANUSIAAN (HRNA)
PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

Sektor / Sub Sektor	Lokasi (Kab/Kota/ Kecamatan)	Jumlah Sasaran	Satuan	Harga Satuan (Rp. dalam juta)	HRNA			Total Kebutuhan (Rp. Juta)	Keterangan
					Penyediaan	Pemfungsian	Pengurangan Risiko		
	Sikakap	5	Rumah Tangga	2.78	13.90			13.90	
	Pagai Utara	203	Rumah Tangga	2.78	564.37			564.37	
	Sipora Selatan	29	Rumah Tangga	2.78	80.62			80.62	
	b Penyuluhan untuk pengarusutamaan gender	Pagai Selatan	4	Desa	6.93		27.71	27.71	
	Sikakap	2	Desa	6.93			13.85	13.85	
	Pagai Utara	3	Desa	6.93			20.78	20.78	
	Sipora Selatan	3	Desa	6.93			20.78	20.78	
SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF						21,805.24	-	21,805.24	
1.	Pertanian					-	18,893.33	-	18,893.33
	a Pemberdayaan kelompok tani (termasuk peternakan)	Pagai Selatan	44	Kelompok	139.95		6,157.83		6,157.83
		Sikakap	3	Kelompok	139.95		419.85		419.85
		Pagai Utara	71	Kelompok	139.95		9,936.49		9,936.49
		Sipora Selatan	17	Kelompok	139.95		2,379.16		2,379.16
2.	Perikanan					-	2,239.21	-	2,239.21
	a Pemberdayaan usaha nelayan	Pagai Selatan	3	Kelompok	139.95		419.85		419.85
		Sikakap	1	Kelompok	139.95		139.95		139.95
		Pagai Utara	10	Kelompok	139.95		1,399.51		1,399.51
		Sipora Selatan	2	Kelompok	139.95		279.90		279.90
3	Industri dan Perdagangan						511.55	-	511.55
	a Pemberdayaan Industri Kecil Menengah	Sipora Selatan	14	Unit Usaha	7.26		101.59		101.59
	b Pemberdayaan Usaha Perdagangan (kios)	Pagai Utara	13	Unit Usaha	4.71		61.26		61.26
		Pagai Selatan	14	Unit Usaha	4.71		65.97		65.97
		Sikakap	60	Unit Usaha	4.71		282.73		282.73
4	Koperasi					-	161.16	-	161.16
	a Revitalisasi koperasi	Pagai Utara	1	Unit	80.58		80.58		80.58
		Sikakap	1	Unit	80.58		80.58		80.58
LINTAS SEKTOR						-	892.80	734.20	1,627.00
1	Pemerintahan					-	768.40	734.20	1,502.60
	a Revitalisasi fungsi layanan dasar pemerintah melalui rapat koordinasi		4	Kecamatan	105.60	-	422.40	-	422.40

**RINCIAN PENILAIAN DAMPAK TERHADAP KEMANUSIAAN (HRNA)
PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI, 25 OKTOBER 2010**

Sektor / Sub Sektor		Lokasi (Kab/Kota/ Kecamatan)	Jumlah Sasaran	Satuan	Harga Satuan (Rp. dalam juta)	HRNA			Total Kebutuhan (Rp. Juta)	Keterangan
						Penyediaan	Pemfungsian	Pengurangan Risiko		
	b	Revitalisasi sistem dan data kependudukan (pendataan ulang)	865	Rumah Tangga	0.40		346.00		346.00	
	c	Penyusunan rencana kontingensi sektor pemerintahan	1	Unit Pemerintah	338.20			338.20	338.20	
	d	Penyusunan, penguatan dan penyelenggaraan PB Daerah	1	Unit Pemerintah	396.00			396	396.00	
2	Lingkungan					-	124.40	-	124.40	
	a	Pendidikan pola hidup ramah lingkungan pasca bencana	4	Desa	10.37	-	41.47	-	41.47	
		Sikakap	2	Desa	10.37		20.73		20.73	
		Pagai Utara	3	Desa	10.37		31.10		31.10	
		Sipora Selatan	3	Desa	10.37		31.10		31.10	
INFRASTRUKTUR						1,050.00	36.94	-	1,086.94	
	a	Penyediaan generator diesel untuk pembangkit listrik desa	2	Desa	150.00	300.00	-	-	300.00	
		Pagai Utara	3	Desa	150.00	450.00			450.00	
		Sipora Selatan	2	Desa	150.00	300.00			300.00	
	b	Revitalisasi sistem pengelolaan pembangkit listrik desa	2	Desa	5.28		10.56		10.56	
		Pagai Utara	3	Desa	5.28		15.83		15.83	
		Sipora Selatan	2	Desa	5.28		10.56		10.56	
TOTAL						7,853.70	23,248.14	3,763.13	34,864.97	

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013
25 Oktober 2010
Status: 9 Januari 2011**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan	Kebutuhan Pendanaan (Rp juta)				Indikasi Pendanaan**	Kebutuhan Pendanaan (Rp juta)		
			APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Non Pemerintah		2011	2012	2013
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI										
1	PERUMAHAN*	250,548.3	246,007.5	-	-	4,540.8	25,947.5			
	1 Perumahan dan Hunata	196,213.7	191,672.9	-	-	4,540.8	9,046.4	196,213.7	-	-
	2 Prasarana Lingkungan	54,334.6	54,334.6	-	-	-	16,901.1	54,334.6	-	-
2	INFRASTRUKTUR	18,998.4	18,998.4	-	-	-	-			
	1 Transportasi	250.0	250.0	-	-	-	-	250.0	-	-
	2 Air dan Sanitasi	120.0	120.0	-	-	-	-	120.0	-	-
	3 Energi	18,628.4	18,628.4	-	-	-	-	18,628.4	-	-
3	EKONOMI	113,680.9	110,945.9	2,735.0	-	-	19,572.8			
	1 Pertanian	18,893.3	18,893.3	-	-	-	-	18,893.3	-	-
	2 Perkebunan	47,551.6	47,551.6	-	-	-	1,887.8	42,458.6	2,546.5	2,546.5
	3 Peternakan	5,379.5	4,814.5	565.0	-	-	-	5,379.5	-	-
	4 Perdagangan	2,580.0	410.0	2,170.0	-	-	-	2,580.0	-	-
	5 Perikanan	39,115.4	39,115.4	-	-	-	17,685.0	39,115.4	-	-
	6 Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Koperasi dan UKM	161.2	161.2	-	-	-	-	161.2	-	-
4	SOSIAL	59,070.7	38,070.7	-	-	21,000.0	1,500.0			
	1 Kesehatan	7,554.3	7,554.3	-	-	-	-	7,554.3	-	-
	2 Pendidikan	27,028.3	27,028.3	-	-	-	1,500.0	27,028.3	-	-
	3 Agama	18,264.5	264.5	-	-	18,000.0	-	18,264.5	-	-
	4 Lembaga Sosial	6,223.6	3,223.6	-	-	3,000.0	-	4,223.6	1,000.0	1,000.0
5	LINTAS SEKTOR	44,109.4	44,109.4	-	-	-	2,500.0			
	1 Lingkungan Hidup	11,286.9	11,286.9	-	-	-	-	4,786.9	4,000.0	2,500.0
	2 Pemerintahan	16,987.5	16,987.5	-	-	-	2,500.0	16,987.5	-	-
	3 Ketertiban dan Keamanan	285.0	285.0	-	-	-	-	285.0	-	-
	4 Pengurangan Risiko Bencana	15,550.0	15,550.0	-	-	-	-	9,525.0	6,025.0	-
SUB TOTAL R3		486,407.8	458,132.0	2,735.0	-	25,540.8	49,520.4			
PERCEPATAN PEMBANGUNAN										
1	INFRASTRUKTUR	674,430.0	674,430.0	-	-	-	28,500.0			
	1 Transportasi	674,000.0	674,000.0	-	-	-	28,500.0	5,000.0	344,000.0	325,000.0
	2 Telekomunikasi	430.0	430.0	-	-	-	-	430.0	-	-
SUB TOTAL PERCEPATAN		674,430.0	674,430.0	-	-	-	28,500.0			
TOTAL		1,160,837.8	1,132,562.0	2,735.0	-	25,540.8	78,020.4	472,220	357,572	331,047

Keterangan:

* Bersumber dari dana bencana BA 999

** Alokasi pendanaan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013
25 Oktober 2010
Status: 9 Januari 2011**

NO	SEKTOR / SUBSEKTOR	Kebutuhan Pendanaan 2011 (Rp juta)				Kebutuhan Pendanaan 2012 (Rp juta)				Kebutuhan Pendanaan 2013 (Rp juta)			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	Non Pemerintah
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI													
1	PERUMAHAN*	246,007.5	-	-	4,540.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Perumahan dan Hunata	191,672.9	-	-	4,540.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Prasarana Lingkungan	54,334.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRASTRUKTUR	18,998.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Transportasi	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Air dan Sanitasi	120.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Energi	18,628.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	EKONOMI	105,852.9	2,735.0	-	-	2,546.5	-	-	-	2,546.5	-	-	-
	1 Pertanian	18,893.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perkebunan	42,458.6	-	-	-	2,546.5	-	-	-	2,546.5	-	-	-
	3 Peternakan	4,814.5	565.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Perdagangan	410.0	2,170.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Perikanan	39,115.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Koperasi dan UKM	161.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SOSIAL	38,070.7	-	-	19,000.0	-	-	-	1,000.0	-	-	-	1,000.0
	1 Kesehatan	7,554.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Pendidikan	27,028.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Agama	264.5	-	-	18,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Lembaga Sosial	3,223.6	-	-	1,000.0	-	-	-	1,000.0	-	-	-	1,000.0
5	LINTAS SEKTOR	31,584.4	-	-	-	10,025.0	-	-	-	2,500.0	-	-	-
	1 Lingkungan Hidup	4,786.9	-	-	-	4,000.0	-	-	-	2,500.0	-	-	-
	2 Pemerintahan	16,987.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Ketertiban dan Keamanan	285.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Pengurangan Risiko Bencana	9,525.0	-	-	-	6,025.0	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL R3		440,514.0	2,735.0	-	23,540.8	12,571.5	-	-	1,000.0	5,046.5	-	-	1,000.0
PERCEPATAN PEMBANGUNAN													
1	INFRASTRUKTUR	5,430.0	-	-	-	344,000.0	-	-	-	325,000.0	-	-	-
	1 Transportasi	5,000.0	-	-	-	344,000.0	-	-	-	325,000.0	-	-	-
	2 Telekomunikasi	430.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL PERCEPATAN		5,430.0	-	-	-	344,000.0	-	-	-	325,000.0	-	-	-
TOTAL		445,944.0	2,735.0	-	23,540.8	356,571.5	-	-	1,000.0	330,046.5	-	-	1,000.0

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013**

25 Oktober 2010

Status : 9 Januari 2011

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Unit	Satuan					
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							250,548.28	25,948	
1 Perumahan							198,213.70	9,046.40	
	Perumahan dan hunjara						196,213.70	9,046	
	Relokasi Perumahan dan Permukiman	Kep. Mentawai	2,072	unit			187,167.30	-	
		Sipora Selatan	613	unit	36	2.5	55,170.00		
		Pagai Selatan	936	unit	36	2.5	84,240.00		
		KM 27					-		
		KM 37 - 46					-		
		KM 1 - 7					-		
		Pagai Utara	447	unit	36	2.5	40,230.00		
		KM 27					-		
		KM 4 UPT Taikako					-		
		Sikakap	76	unit	36	2.5	6,840.00		
	Pematangan dan pembersihan lahan perumahan	Kep. Mentawai	155	ha		2.0	310.00		
	Sosialisai rencana relokasi	Kep. Mentawai	7	pkt		13.7	95.90		
	Fasilitas pengeolaan hunian sementara	Kep. Mentawai	7	pkt		13.7	95.90		
	Pelatihan keterampilan membangun rumah, MCK	Kep. Mentawai	7	pkt		26.5	185.50		
	Hunian Sementara*	Pagai Utara	512			8.8	4,505.60	4,505.60	BNPB
		Pagai Selatan	516			8.8	4,540.80	4,540.80	PMI
2 Prasarana Lingkungan Permukiman							54,334.58	16,901.12	
	Prasarana lingkungan								
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	2,072	unit			28,075.10		
	Hunjara	Kep. Mentawai	1,028	unit			675.84	675.84	
	Penyediaan Air Bersih								
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	2,072	unit			3,743.35		
	Hunjara	Kep. Mentawai	1,028	unit			90.11	90.11	
	Perencanaan Teknis								
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	2,072	unit			1,871.67		

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Unit	Satuan					
	Huntara	Kep. Mentawai	1,028	unit			45.06	45.06	
	Pendampingan								
	Relokasi Pemukiman Baru	Kep. Mentawai	2,072	unit			3,743.35		
	Huntara	Kep. Mentawai	1,028	unit			90.11	90.11	
	PNPM Mandiri Perdesaan pasca bencana*	Pagai Utara	1	paket		4,000.0	4,000.00	4,000.00	PNPM Mandiri
		Sipora Selatan	1	paket		4,000.0	4,000.00	4,000.00	PNPM Mandiri
		Sikakap	1	paket		4,000.0	4,000.00	4,000.00	PNPM Mandiri
		Pagai Selatan	1	paket		4,000.0	4,000.00	4,000.00	PNPM Mandiri
TOTAL							250,548.28	25,948	

Keterangan:

* Alokasi Pendanaan dari Kementerian/Lembaga Terkait dan Non Pemerintah

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013**

26 Oktober 2010

Status : 9 Januari 2011

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
			APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			246,007.48	-	-	4,540.80	-	-	-	-	-	-	-	
1 Perumahan			191,672.90	-	-	4,640.80	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumahan dan huntera		191,672.90	-	-	4,541	-	-	-	-	-	-	-	
	Relokasi Perumahan dan Permukiman	Kep. Mentawai	187,167.30	-	-									
		Sipora Selatan	55,170.00											
		Pagai Selatan	84,240.00											
		Pagai Utara	40,230.00											
		Sisekap	6,890.00											
	Pemertanian dan pembersihan lahan perumahan	Kep. Mentawai	310.00											
	Sosialisasi perencanaan lokasi	Kep. Mentawai	95.00											
	Facilitasi pengelolaan hunian sementara	Kep. Mentawai	95.00											
	Pelatihan keterampilan membangun rumah, MCK	Kep. Mentawai	135.00											
	Hunian Sementara*	Pagai Utara	4,505.80											
		Pagai Selatan				4,640.80								
2 Prasarana Lingkungan Permukiman			54,335	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Prasarana lingkungan													
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	28,075.10											
	Huntera	Kep. Mentawai	675.84											
	Perbaikan Air Bersih													
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	3,743.35											
	Huntera	Kep. Mentawai	90.11											
	Perencanaan Teknis													
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	1,871.67											
	Huntera	Kep. Mentawai	46.05											
	Pendampingan													
	Relokasi Permukiman Baru	Kep. Mentawai	3,743.35											
	Huntera	Kep. Mentawai	90.11											
	PNP/ Mandiri Penerimaan pasca bencana*	Pagai Utara	4,000.00											
		Sipora Selatan	4,000.00											
		Sisekap	4,000.00											
		Pagai Selatan	4,000.00											
TOTAL			246,007	-	-	4,541	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan:

* Alokasi Penerimaan dan Kemungkinan Lembaga Teknis dan Non Pemerintah

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013**

25 Oktober 2010
Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan	
			Jumlah	Satuan						
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (R2)										
INFRASTRUKTUR										
1 Transportasi							18,998	-		
	A. Transportasi Darat									
	B. Transportasi Air						250	-		
	Demaga/pelabuhan	Sipora Selatan	1	unit		250.00	250			
2 Air dan Sanitasi							120			
	Sarana Air Bersih Dusun Bulasat (Bake)	Pagai Selatan		jaringan		120.00	120			
3 Energi							18,828	-		
	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi									
	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi						1,086			
	Pembangunan Energi terbarukan (PLTS)	Pagai Selatan	785	unit		7	5,495			
		Pagai Utara	217	unit		7	1,519			
		Sikakap	18	unit		7	112			
		Sipora Selatan	613	unit		7	4,291			
	Pembangunan Energi terbarukan (PLTB)	Pagai Selatan	35	unit		50	1,750			
		Pagai Utara	34	unit		50	1,700			
		Sikakap	1	unit		50	50			
		Sipora Selatan	30	unit		50	1,500			
	Sistem pengelolaan pembangkit listrik desa	Kep. Mentawai	7	pkt		5.50	39			
	Penyediaan generator diesel untuk pembangkit listrik desa	Kep. Mentawai	7	pkt		150	1,050			
	Revitalisasi sistem pengelolaan pembangkit listrik desa	Kep. Mentawai	7	pkt		5	37			
SUB TOTAL R2								18,998.4	-	
PERCEPATAN PEMBANGUNAN (P2)										
INFRASTRUKTUR										
1 Transportasi							674,430	28,500		
	A. Transportasi Darat						600,000	-		
	Jalan dan Jembatan	Kep. Mentawai	300	km		2,000.00	600,000			
	B. Transportasi Air						53,500	28,500		

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
	Dermaga/pelabuhan Pasapat	Pagai Utara	1	unit		15,000.00	15,000		
	Dermaga/pelabuhan Pokai	Siberut Utara	1	unit		10,000.00	10,000		
	Pengadaan Kapal tipe RO-RO 500 GT*	Kep. Mentawai	1	unit			28,500	28,500.00	Kementerian Perhubungan
	C. Transportasi Udara						20,500	-	
	Perbaikan/pengerasan landasan pacu (airstrip)	Pagai Selatan	600	m		2.50	1,500		
	Perpanjangan airstrip Bandara Sipora Rokot (750x23m)	Pulau Sipora	750	m		2.50	1,875		
	Perpanjangan airstrip Bandara Siberut (650 x23m)	Pulau Siberut	850	m		2.50	2,125		
	Pembangunan landasan pacu /airstrip (1500 x25m)	Sipora Utara SP II	1,500	m		10.00	15,000		
2	Pos dan Telekomunikasi						430	-	
	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika								
	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi		43	pkt		10.00	430		
SUB TOTAL P2							674,430	28,500	
TOTAL							693,428.44	28,500	

Keterangan:

* Alokasi Pendanaan dari Kementerian/Lembaga Terkait dan Non Pemerintah

INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA-BENCANA GEMPA BUM DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013
 25 Oktober 2010
 Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (R2)													
INFRASTRUKTUR		18,996											
1	Transportasi	251											
	A. Transportasi Darat												
	B. Transportasi Air	251											
	Damagapelaabuhan	251											
2	Air dan Sanitasi	121			0,00				0,00				0,00
	Sarana Air Bersih Dusun Bujaset (Bansé)	121											
3	Energi	18,626			0,00				0,00				0,00
	Program Pengelolaan Listrik dan Pemfaatan Energi												
	Percepatan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pemasangan Konvensional Energi	1,063											
	Pembangunan Energi terbarukan (PLTB)	5,433											
		1,513											
		111											
		4,233											
	Pembangunan Energi terbarukan (PLTB)	1,754											
		1,003											
		54											
		1,503											
	Sistem pengelolaan pembangkit listrik desa	34											
	Penyelesaian generator diesel untuk pembangkit listrik desa	1,063											
	Revitalisasi sistem pengelolaan pembangkit listrik desa	34											
SUB TOTAL R2		18,996											
PERCEPATAN PEMBANGUNAN (P2)													
INFRASTRUKTUR		5,433				344,000				325,000			
1	Transportasi	5,000				344,000				325,000			
	A. Transportasi Darat					300,000				300,000			
	Jalan dan Jembatan					300,000				300,000			
	B. Transportasi Air	5,000				33,500				15,000			
	Damagapelaabuhan Pasopas					5,000				10,000			
	Damagapelaabuhan Perak					5,000				5,000			
	Pengadaan Kapal tipe RO-RO 300 GT	5,000				23,500							
	C. Transportasi Udara					10,500				10,000			
	Pebakan/bengresan landasan pacu (strip)					1,500							
	Pemanangan airstrip Bencana Sipra Raxol (750x23m)					1,000							

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
	Pelapangan airstrip Bandara Sibeur (500 x 200m)					2,125							
	Pembangunan landasan pacu airstrip (1500 x 25m)					5,000				10,000			
2	Pos dan Telekomunikasi	43											
	Program Pengalangan Pos dan Informatika												
	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	43											
	SUB TOTAL P2	5,430				344,000				325,000			
	TOTAL	24,425			0,00	344,000			0,00	325,000			0,00

Keterangan:

* Alokasi Pendanaan dari Kementerian/Lembaga, Tingkat dan Non Pemerintah

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013**

25 Oktober 2010

Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
EKONOMI							113,880.9	18,573	
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN RELOKASI									
1. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan									
	A. Pertanian						18,893.3		
	Pemberdayaan kelompok tani (termasuk peternakan)	Pagai Selatan	44	pkt		140.0	6,157.8		
		Sikakap	3	pkt		140.0	419.9		
		Pagai Utara	71	pkt		140.0	9,936.5		
		Sipora Selatan	17	pkt		140.0	2,379.2		
	B. Perkebunan						47,551.6	1,887.8	
	Replanting wilayah sempadan pantai								
	Kelapa	Kep. Mentawai	1,000	Ha		1.5	1,500.0		
	Pinang	Kep. Mentawai	100	Ha		0.5	50.0		
	Pandan laut	Kep. Mentawai	1	Is			1,000.0		
	Penanaman kebun bibit rakyat (KBR) 2010*	Kep. Mentawai	1,250	ha		0.5	612.5	612.5	Kementerian Kehutanan
	Kebun bibit rakyat (KBR) 2011*	Kep. Mentawai	11	unit		54.7	601.6	601.6	Kementerian Kehutanan
	Penanaman kebun bibit rakyat (KBR) 2011*	Kep. Mentawai	1,375	ha		0.5	673.8	673.8	Kementerian Kehutanan
	Pembukaan lahan perkebunan	Kep. Mentawai	8,155	ha		2.0	16,310.0		
	Benih	Kep. Mentawai	8,155	ha		1.5	12,232.5		
	Penanaman lahan	Kep. Mentawai	8,155	ha		1.0	8,155.0		
	Biaya perawatan	Kep. Mentawai	8,155	ha		0.8	6,116.3		
	Peralatan Perkebunan	Kep. Mentawai	1	pkt		150.0	150.0		
	Sosialisasi/ pendampingan usahatani	Kep. Mentawai	1	pkt		150.0	150.0		
	C. Peternakan						5,379.5		
	Pengadaan bibit ternak		10	pkt		48.0	480.0		
	Ternak babi	Kep. Mentawai	2,407	ekor		1.5	3,610.5		
	Ternak ayam	Kep. Mentawai	3,452	ekor		0.01	17.3		
	Pengadaan pakan ternak								
	Ternak babi	Kep. Mentawai	2,407	ekor		0.01	1,083.2		
	Ternak ayam	Kep. Mentawai	3,452	ekor		0.00	103.6		
	Pengadaan obat hewan	Kep. Mentawai	1	pkt		15.0	15.0		
	Pengadaan peralatan kesehatan hewan	Kep. Mentawai	1	pkt		20.0	20.0		

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
	Sosialisasi usaha peternakan	Kep. Mentawai	1	pkt		50.0	50.0		
2. Perdagangan							2,580.0	-	
	Kios/warung	Pagai Utara							
		KM 17	6	unit	12	2.5	180.0		
		KM 4 (UPT Taikako)	8	unit	12	2.5	240.0		
		Pagai Selatan							
		KM 27	6	unit	12	2.5	180.0		
		KM 37-46	6	unit	12	2.5	180.0		
		KM 1-7	4	unit	12	2.5	120.0		
		Sipora	9	unit	12	2.5	270.0		
	Pembangunan pasar lingkungan	Pagai Selatan KM 37 - 46	1	unit			1,000.0		
	Pemberdayaan Usaha Perdagangan (kios)	Pagai Utara	13	pkt		4.7	61.3		
		Pagai Selatan	14	pkt		4.7	66.0		
		Sikakap	60	pkt		4.7	282.7		
3 Perikanan							38,115.4	17,685.0	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan tangkap								
	Cool Boks 100 liter	Pagai Selatan	12	unit		2.0	24.0		
		Sikakap	82	unit		2.0	164.0		
		Pagai Utara	17	unit		2.0	34.0		
		Sipora Selatan	8	unit		2.0	16.0		
						-			
	Cool Boks 500 liter	Sikakap	14	unit		7.0	98.0		
	Cool Boks 1000 liter	Sikakap	6	unit		11.0	66.0		
						-			
	Keramba Jaring Apung	Pagai Selatan	6	unit		50.0	300.0		
		Sikakap	7	unit		50.0	350.0		
		Pagai Utara	3	unit		50.0	150.0		
		Sipora Selatan	2	unit		50.0	100.0		
						-			
	Rumpon	Pagai Selatan	17	unit		12.5	212.5		
		Pagai Utara	22	unit		12.5	275.0		
						-			
	Perahu Tanpa Motor	Pagai Selatan	182	unit		1.0	182.0		
		Sikakap	43	unit		1.0	43.0		
		Pagai Utara	105	unit		1.0	105.0		
		Sipora Selatan	68	unit		1.0	68.0		

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
						-			
	Perahu Motor 5 HP	Pagai Selatan	43	unit		8.5	365.5		
		Sikakap	26	unit		8.5	238.0		
		Pagai Utara	72	unit		8.5	612.0		
		Sipora Selatan	42	unit		8.5	357.0		
						-			
	Perahu Motor 15 HP	Pagai Selatan	17	unit		27.5	467.5		
		Sikakap	7	unit		27.5	192.5		
		Pagai Utara	21	unit		27.5	577.5		
		Sipora Selatan	17	unit		27.5	467.5		
						-			
	Perahu Motor 25 HP	Pagai Selatan	11	unit		42.5	467.5		
		Sikakap	8	unit		42.5	340.0		
		Pagai Utara	12	unit		42.5	510.0		
		Sipora Selatan	9	unit		42.5	382.5		
						-			
	Kapal Nelayan 5 GT	Pagai Utara	2	unit		180.0	360.0		
		Sipora Selatan	2	unit		180.0	360.0		
						-			
	Jaring Gilnet	Pagai Selatan	300	unit		0.5	135.0		
		Pagai Utara	586	unit		0.5	283.7		
		Sipora Selatan	289	unit		0.5	130.1		
						-			
	Pancing Ulur	Pagai Selatan	200	unit		0.3	62.8		
		Sikakap	75	unit		0.3	23.5		
		Pagai Utara	362	unit		0.3	113.6		
		Sipora Selatan	274	unit		0.3	86.0		
						-			
	Rewai/Longline	Sikakap	350	unit		14.7	5,127.5		
		Pagai Utara	519	unit		14.7	7,603.4		
						-			
	Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pesisir*								
	Pembangunan rumah ramah bencana bagi nelayan*	Kep. Mentawai					1,500.0	1,500.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Akses IPTEK pembangunan solar energi	Kep. Mentawai					500.0	500.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Community based management, mata pencaharian alternatif (COREMAP II)	Kep. Mentawai					5,000.0	5,000.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Rehabilitasi ekosistem	Kep. Mentawai					500.0	500.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
	Pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)	Kep. Mentawai							Kementerian Kelautan dan Perikanan
	PUMP perikanan tangkap	Kep. Mentawai					1,000.0	1,000.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	PUMP perikanan budidaya	Kep. Mentawai					2,000.0	2,000.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	PUMP penogalahan	Kep. Mentawai					400.0	400.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Penyiapan zonasi (tata ruang)	Kep. Mentawai					1,000.0	1,000.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan pelabuhan perikanan Sikakap	Kep. Mentawai					2,000.0	2,000.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Bantuan kapal nelayan	Kep. Mentawai					3,000.0	3,000.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Bantuan cool box	Kep. Mentawai					250.0	250.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Bantuan pendidikan untuk putra-putri korban bencana	Kep. Mentawai					535.0	535.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Pariwisata								
5	Perindustrian								
6	Koperasi dan UKM						181.2		
	Revitalisasi koperasi	Pagai Utara	1	Unit		80.6	80.6		
		Sikakap	1	Unit		80.6	80.6		
	TOTAL						113,680.8	18,572.8	

Keterangan:

* Alokasi Pendanaan dari Kementerian/Lembaga Terkait dan Non Pemerintah

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013**

25 Oktober 2010

Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
EKONOMI		106,853	2,735	-	-	2,547	-	-	-	2,547	-	-	-
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN RELOKASI													
1. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan													
	A. Pertanian	18,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas pertanian (termasuk peternakan)	6,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		420											
		5,303											
		2,373											
	B. Perkebunan	42,459	-	-	-	2,547	-	-	-	2,547	-	-	-
	Rehabilitasi wilayah seremonial pantai												
	Kolase	1,500											
	Pinang	50											
	Pondok laut	1,000											
	Penanaman kebun bibit rakyat (KBR) 2010*	602,5											
	Kebun bibit rakyat (KBR) 2011*	601,8											
	Penanaman kebun bibit rakyat (KBR) 2011**	574											
	Fasilitas lahan perkebunan	16,310											
	Benteng	12,233											
	Penanaman lahan	8,155											
	Biaya perawatan	1,223				2,447				2,447			
	Fasilitas Perkebunan	50				50				50			
	Sosialisasi/pendampingan usahawan	50				50				50			
	C. Peternakan	4,814	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas bibit ternak		400										
	Ternak babi	3,611											
	Ternak ayam	17											
	Fasilitas pakan ternak												
	Ternak babi	1,083											
	Ternak ayam	104											
	Fasilitas obat hewan		15										
	Fasilitas pemeliharaan kesehatan hewan		23										
	Sosialisasi usaha peternakan		53										
2. Perdagangan													
	Kios/warung	410	2,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			190										
			240										

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Peralatan	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
			-										
			180										
			100										
			100										
			370										
	Perbaikan pasar lingkungan		1,000										
	Perbaikan Usaha Perdagangan (dca)		61										
			60										
			283										
3	Perikanan	39,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan tangkap												
	Cair Boks 100 liter		24										
			164										
			34										
			16										
	Cair Boks 500 liter		68										
	Cair Boks 1000 liter		68										
			-										
	Keramba Jaring Apung		300										
			350										
			150										
			100										
			-										
	Rumpon		213										
			275										
	Perahu Tanpa Motor		167										
			43										
			105										
			169										
			-										
	Perahu Motor 5 HP		365										
			228										
			610										
			357										
			-										
	Perahu Motor 15 HP		468										
			133										
			578										
			428										
			-										
	Perahu Motor 25 HP		765										

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
		340											
		610											
		383											
		-											
	Kapal Nelayan 5 GT	350											
		350											
	Jaring Gihes	135											
		254											
		120											
		-											
	Fencing Ulur	63											
		24											
		114											
		89											
	Repat Longline	6,128											
		7,003											
	Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pesisir*												
	Pembangunan rumah rehab bencana tag. nelayan*	1,500											
	Akses IPTEK pembangunan sektor perikanan	500											
	Community based management, male. pencaharian alternatif (CCREMAP II)	5,000											
	Rehabilitasi ekosistem	500											
	Pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)												
	PUMP perikanan tangkap	1,000											
	PUMP perikanan budidaya	2,000											
	PUMP perikanan	400											
	Penyiapan zonaasi (tela ruang)	1,000											
	Pengembangan peraturan perikanan Skalaup	2,000											
	Bantuan kapal nelayan	3,000											
	Bantuan cool box	250											
	Bantuan pendidikan untuk putra-putri korban bencana	535											

Sektor / Sub Sektor	Sumber dan Prasana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
4 Pariwisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Perindustrian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Koperasi dan UKM		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kontribusi koperasi	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	105,853	2,735	-	-	2,547	-	-	-	2,547	-	-	-

Keterangan:

* Alokasi Pendanaan dari Kementerian/Lembaga Terkait dan Non Pemerintah

INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013
 25 Oktober 2010
 Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan 2011	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
SOSIAL							59,071	1,600	
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN RELOKASI									
1. Kesehatan							7,664,28		
	PuskesmasPundi (bangunan semenlana)	Kep. Mentawai	1	pkt		20.00	20.00		
	Penyediaan obat-obatan	Kep. Mentawai	84	pkt		5.00	420.00		
	Pelayanan Kesehatan (tenaga dokter)	Kep. Mentawai	84	OB		7.50	630.00		
	Pelayanan Kesehatan (tenaga Perawat)	Kep. Mentawai	168	OB		3.50	588.00		
	Pelayanan Kesehatan (tenaga non Medis)	Kep. Mentawai	168	OB		2.00	336.00		
	Peningkatan Gizi (balita dan manula)	Kep. Mentawai	29,358	pkt		0.01	293.58		
	Panduan/pangan Psikososial (konse ng)	Kep. Mentawai	12	bln		100.00	1,200.00		
	Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan								
	Fogging	10 Kec. di Kep. Mentawai	10	pkt		30.00	300.00		
	Desinfeksi	10 Kec. di Kep. Mentawai	10	pkt		2.50	25.00		
	Penyuluh	10 kec. di Kep. Mentawai	20	OB		1.00	20.00		
	Penyediaan layanan kesehatan umum utk masyarakat terdampak	Pagai Selatan	4,040	Jwa		0.21	808.80		
		Sikakap	322	Jwa		0.21	68.64		
		Pagai Utara	1,710	Jwa		0.21	364.06		
		Sipora Selatan	1,320	Jwa		0.21	281.26		
	Penyediaan makanan tambahan untuk balita	4 Kecamatan	3,209	Balita		0.48	1,531.24		
	Rehabilitasi posyandu	Pagai Selatan	3	pkt		10.37	31.11		
		Sikakap	1	pkt		10.37	10.37		
		Pagai Utara	7	pkt		10.37	72.67		
		Sipora Selatan	1	pkt		10.37	10.37		
	Pembudayaan masyarakat untuk lingkungan sehat	Pagai Selatan	4	Desa		15.55	62.20		
		Sikakap	2	Desa		15.55	31.10		
		Pagai Utara	3	Desa		15.55	46.65		
		Sipora Selatan	3	Desa		15.55	46.65		
	Penyusunan rencana kontingensi dinas kesehatan	Mentawai	1	unit		304.20	304.20		
2. Pendidikan							27,028.98	1,600.00	
	Pendidikan TK dan SD								
	Sarana pendidikan*						1,500.00	1,500.00	
	Sekolah TK	Sipora	1	unit	180	2.50	450.00		Kementerian Pendidikan Nasional
	Sekolah TK	Pagai Selatan - KM27 (Camp Jayal)	1	unit	180	2.50	450.00		
	Sekolah TK	Pagai Selatan - KM37-48	3	unit	180	2.50	1,350.00		
	Sekolah TK	Pagai Selatan - KM 1-7 (Lakku)	1	unit	180	2.50	450.00		

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan 2011	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
	Sekolah TK	Pagai Utara - KM 17 (Fersemaian)	1	unit	190	2,50	450,00		
	Sekolah TK	Pagai Utara - KM 4 (JPTaikako)	2	unit	190	2,50	900,00		
	Sekolah SD	Sipora	1	unit	420	2,50	1,050,00		
	Sekolah SD	Pagai Selatan - KM27 (Camp Jaya)	1	unit	420	2,50	1,050,00		
	Sekolah SD	Pagai Selatan - KM37-48	3	unit	420	2,50	3,150,00		
	Sekolah SD	Pagai Selatan - KM 1-7 (Lakkau)	1	unit	420	2,50	1,050,00		
	Sekolah SD	Pagai Utara - KM 17 (Fersemaian)	1	unit	420	2,50	1,050,00		
	Sekolah SD	Pagai Utara - KM 4 (JPTaikako)	1	unit	420	2,50	1,050,00		
	Taman Bacaan	Sipora	1	unit	100	2,50	250,00		
	Taman Bacaan	Pagai Selatan - KM27 (Camp Jaya)	1	unit	100	2,50	250,00		
	Taman Bacaan	Pagai Selatan - KM 1-7 (Lakkau)	1	unit	100	2,50	250,00		
	Taman Bacaan	Pagai Utara - KM 17 (Fersemaian)	1	unit	100	2,50	250,00		
	Taman Bacaan	Pagai Utara - KM 4 (JPTaikako)	1	unit	100	2,50	250,00		
	Pendidikan Menengah								
	Sekolah SMP	Pagai Selatan - KM27 (Camp Jaya)	1	unit	460	2,50	1,200,00		
	Sekolah SMP	Pagai Selatan - KM37-48	1	unit	460	2,50	1,200,00		
	Sekolah SMA	Pagai Selatan - KM37-48	1	unit	460	2,50	1,200,00		
	Taman Bacaan	Pagai Selatan - KM37-48	3	unit	100	2,50	750,00		
	Pengadaan guru bantu								
	TK	Kep. Mentawai	252	GB		1	252,00		
	SD	Kep. Mentawai	576	GB		1	576,00		
	SMP	Kep. Mentawai	120	GB		1	120,00		
	SMA	Kep. Mentawai	72	GB		1	72,00		
	Sekolah sementara								
	TK	Kep. Mentawai	7	pkt		140	980,00		
	SD	Kep. Mentawai	8	pkt		160	1,280,00		
	SMP	Kep. Mentawai	2	pkt		40	80,00		
	SMA/SMK	Kep. Mentawai	1	pkt		20	20,00		
	Perengkapan sekolah	Kep. Mentawai	18	pkt		50	900,00		
	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SD terdampak	Sipora Selatan	94	pkt		2	188,00		
		Pagai Selatan	301	pkt		2	602,00		
		Pagai Utara	477	pkt		2	954,00		
		Sikakap	12	pkt		2	24,00		
	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SMP terdampak	Sipora Selatan	33	pkt		3	99,00		
		Pagai Selatan	14	pkt		3	42,00		
		Pagai Utara	35	pkt		3	105,00		
		Sikakap	9	pkt		3	27,00		
	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SMA terdampak	4 kecamatan	198	pkt		4	792,00		

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran		Luas/ Jumlah Reta2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan 2011	Keterangan
			Jumlah	Satuan					
	Pengembangan sekolah siaga bencana (SSB)	4 kecamatan	11	pkt		62	692,00		
3. Agama							18,264,52	0,00	
	Pemulihan prasarana perbedalan								
	Gorog	Sipora	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Selatan - KM27	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Selatan - KM37	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Selatan - KM41	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Selatan - KM48	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Selatan - KM 1-7	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Utara - KM 17	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Utara - KM4 (JPTaikako)	1	unit	600	2,50	1,500,00		
	Meq id	Sipora	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Selatan - KM37-48	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Utara - KM 17	1	unit	600	2,50	1,500,00		
		Pagai Utara - KM4 (JPTaikako)	1	unit	600	2,50	1,500,00		
	Pemulihan kegiatan keagamaan masyarakat	Kep. Mentawai	34	pkt		7,76	264,52		
4 Lembaga Sosial							6,224		
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak	Kep. Mentawai	1	le		3,000	3,000		
	Pembangunan panli asuhan	Kep. Mentawai	2	unit		1,000	2,000		
	Penyuluhan pengarusutamaan gender	Kep. Mentawai	7	pkt		12,00	84		
	Stimulan untuk ketahanan pangan keluarga	Pagai Selatan	143	pkt		2,78	398		
		Sikakap	5	pkt		2,78	14		
		Pagai Utara	203	pkt		2,78	564		
		Sipora Selatan	29	pkt		2,78	81		
	Penyuluhan untuk pengarusutamaan gender	Pagai Selatan	4	pkt		6,93	28		
		Sikakap	2	pkt		6,93	14		
		Pagai Utara	3	pkt		6,93	21		
		Sipora Selatan	3	pkt		6,93	21		
	TOTAL						69,070,72	1,500,00	

Keterangan:

* Lokasi Pendanaan dan Kementrian/Lembaga Terakut dan Non Pemerintah

**INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013**
26 Oktober 2010
Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
SOSIAL		38,071	-	-	19,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN RELOKASI													
1. Kesehatan		7,554.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas/Pustu (bangunan sementara)	20.00											
	Perawatan obat-obatan	420.00											
	Felelsyan Kesehatan (tenaga dokter)	630.00											
	Felelsyan Kesehatan (tenaga Paramd)	582.00											
	Felelsyan Kesehatan (tenaga non Medis)	338.00											
	Peningkatan Gizi (balita dan menula)	233.58											
	Fondsmpangan Pakkesdral (konseling)	1,200.00											
	Pengendalian penyakit dan vektor lingkungan												
	Fogging	300.00											
	Desinfektan	25.00											
	Penyuluh	20.00											
	Penyediaan layanan kesehatan umum utk masyarakat terdampak	860.82											
		63.61											
		364.36											
		281.26											
	Penyediaan makanan tambahan untuk balita	1,521.47											
	Rehabilitasi prasyanda	31.10											
		10.37											
		72.57											
		10.37											
	Pembentayan masyarakat untuk lingkungan sehat	62.20											
		31.10											
		46.66											
		46.66											
	Penyusunan rencana kontingensi di das kesehatan	301.20											
2. Pendidikan		27,028.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan TK dan SD												
	Sarana pendidikan*	1,500.00											
	Sekolah TK	450.00											
	Sekolah TK	450.00											
	Sekolah TK	1,360.00											
	Sekolah TK	450.00											
	Sekolah TK	450.00											
	Sekolah TK	900.00											
	Sekolah SD	1,050.00											
	Sekolah SD	1,060.00											

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
	Sekolah SD	3.160,00											
	Sekolah SD	1.060,00											
	Sekolah SD	1.060,00											
	Sekolah SD	1.060,00											
	Taman Bacaan	250,00											
	Taman Bacaan	250,00											
	Taman Bacaan	250,00											
	Taman Bacaan	250,00											
	Taman Bacaan	250,00											
		-											
	Pendidikan Menengah												
	Sekolah SMP	1.200,00											
	Sekolah SMP	1.200,00											
	Sekolah SMA	1.200,00											
	Taman bacaan	750,00											
	Pengadaan guru sakti	-											
	TK	250,00											
	SD	675,00											
	SMP	120,00											
	SMA	72,00											
	Sekolah semester												
	TK	980,00											
	SD	1.280,00											
	SMP	80,00											
	SMAS/MA	20,00											
	Pengembangan sekolah	900,00											
	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SD termasuk	165,99											
		534,71											
		947,36											
		21,32											
	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SMP termasuk	87,93											
		37,31											
		93,26											
		23,98											
	Bantuan biaya sekolah dan peralatan untuk siswa SMA termasuk	703,47											
	Pengembangan sekolah sebagai bencana (SSB)	682,00											
3. Agama		264,62	0,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perbaikan prasarana peribadatan												
	Gereja				1,500,00								
					1,500,00								
					1,500,00								
					1,500,00								
					1,500,00								
					1,500,00								
					1,500,00								
					1,500,00								
	Mesjid				1,500,00								

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
					1.500,0								
					1.500,0								
					1.500,0								
	Pemulihan kegiatan keagamaan masyarakat	264,02											
4 Lembaga Sosial		3,224	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak				1,000				1,000				1,000
	Pembangunan pert. sauban	2,700											
	Pemulihan pengurus masa gender	84,00											
	Stimulan untuk ketahanan pangan keluarga	397,56											
		13,90											
		664,37											
		82,62											
	Pemulihan untuk pengurus masa gender	27,71											
		13,85											
		23,78											
		20,76											
		-											
	TOTAL	38,070,72	0,00	0,00	19,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI serta PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013
25 Oktober 2010
Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran				Luas/Jumlah Rata2	Harga Setuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan 2011	Keterangan
			Jumlah	Sedang	Ringan	Satuan					
LINTAS SEKTOR								44,109	2,500		
1. Pemerintahan								16,987.50	2,500.00		
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Ditjen Pemerintahan Umum										
	Bangunan Kantor										
	Kantor Kepala Desa	Dusun Tapak	1			unt	120	2.50	300.00		
	Cudang Pemubusan	Dusun Tapak	1			unt	200	2.50	500.00		
	Kantor Camat	Pagai Utara Ds.Saumanganya	9			unt	200	2.50	4,500.00		
	Rumah Dinas Camat	Sipora selatan	9			unt	90	2.50	2,225.00		
	Balai Perkenan warga	Sipora	1			unt	150	2.50	375.00		
	Balai Perkenan warga	Pagai Selatan - KM 27	1			unt	150	2.50	375.00		
	Balai Perkenan warga	Pagai Selatan - KM 37 - 46	1			unt	150	2.50	375.00		
	Balai Serbaguna	Pagai Selatan - KM 37 - 46	1			unt	600	2.50	1,250.00		
	Balai Perkenan warga	Pagai Selatan - KM 1 - 7	1			unt	150	2.50	375.00		
	Balai Perkenan warga	Pagai Utara - KM 17	1			unt	150	2.50	375.00		
	Balai Perkenan warga	Pagai Utara - KM 4 (UPH Takaroi)	1			unt	150	2.50	375.00		
	Kantor BPHMD	Keo. Mentawai	1			unt		2.500	2,500.00	2,500.00	Konsentrasi Dalam Negeri
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Ditjen Mendikdasmen										
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Utara	1			unt	45	2.50	112.50		
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Utara Ds.Saumanganya	1			unt	45	2.50	112.50		
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Utara Ds.Saumanganya	2			unt	45	2.50	225.00		
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Selatan - KM 37-46	2			unt	45	2.50	225.00		
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Selatan - KM 1-7	2			unt	45	2.50	225.00		
	Rumah Dinas Guru SD	Pagai Selatan - KM 27	2			unt	45	2.50	225.00		
	Rumah Dinas Guru SMP	Pagai Selatan - KM 37-46	2			unt	45	2.50	225.00		
	Rumah Dinas Guru SMA	Pagai Selatan - KM 37-46	2			unt	45	2.50	225.00		
	Rumah Dinas Guru SD	Sipora	2			unt	45	2.50	225.00		
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Kementerian Kesehatan										
	Rumah Dinas Dokter	Pagai Selatan KM 37 - 46	1			unt	45	2.50	112.50		
	Revitalisasi sistem dan data kependudukan (pendataan ulang)	Keo. Mentawai	1			pk			1,000.00		
	Penyusunan, pengujian dan penyelenggaraan RP Daerah	Keo. Mentawai	1			pk			750.00		

Sektor / Sub Sektor	Serana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran				Luas/Jumlah Rata2	Harga Satuan	Total Kebutuhan	Indikasi Pendanaan 2011	Keterangan
			Jumlah	Sedang	Ringan	Satuan					
2	Ketertiban dan Keamanan (TN/POLRI)							266,00	0,00		
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Uj. Kemhan										
	Bangunan Kantor:										
	Kantor Koramil	Sipora Selatan			1	unit	45	2.50	11,25		
	Kantor Koramil	Sikakap			1	unit	45	2.50	11,25		
	Kantor POLSEK	Sikakap			1	unit	45	2.50	11,25		
	Kantor POLSEK	Sipora Selatan			1	unit	45	2.50	11,25		
	Pos Hansip	Sipora	1			unit	12	2.50	30,00		
	Pos Hansip	Pagai Selatan - KM 27	1			unit	12	2.50	30,00		
	Pos Hansip	Pagai Selatan - KM 37 - 46	3			unit	12	2.50	30,00		
	Pos Hansip	Pagai Selatan - KM 1 - 7	1			unit	12	2.50	30,00		
	Pos Hansip	Pagai Utara - KM 17	1			unit	12	2.50	30,00		
	Pos Hansip	Pagai Utara - KM 4 (UPD Takaro)	1			unit	12	2.50	30,00		
3	Lingkungan Hidup:							11,287	0		
	Rehabilitasi hutan mangrove	Kep. Mentawai	100			ha		7.039	707		
	Pemulihan daerah pesisir	Kep. Mentawai	1			ha		200	200	Kementerian Kehutanan	
	Program pengelolaan perikanan nasional										
	Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	Pulau Pagai dan Sipora				ha			7.500		
	Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	Siboru				ha			2.500		
	Pendidikan pola hidup ramah lingkungan	Kep. Mentawai	12			pkt		25,00	300		
4	Pengurangan Risiko Bencana							15,550	0		
	Program Penanggulangan Bencana										
	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Kep. Mentawai				ha			2.500		
	Pengajaran dan pengembangan INA TPWS	Kep. Mentawai				ha			5.000		
	Sosialisasi dan diseminasi serta Pengembangan	Kep. Mentawai				ha			500		
	Diseminasi sistem peringatan dini tsunami dan	Kep. Mentawai	200			pkt		25,00	5.000		
	Program Pengembangan dan Pencapaian Meteorologi										
	Pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG	Kep. Mentawai	9			pkt			1.000		
	Pengelolaan Iklim Agrorimal dan Iklim Maritim Bmkg	Kep. Mentawai				ha			1.000		
	Pengelolaan Database Bmkg	Kep. Mentawai				ha			500		
	TOTAL							44,109	2,500		

Keterangan:

1 Alokasi Pendanaan dari Kementerian/Lembaga Terkecual dan Non Pemerintah

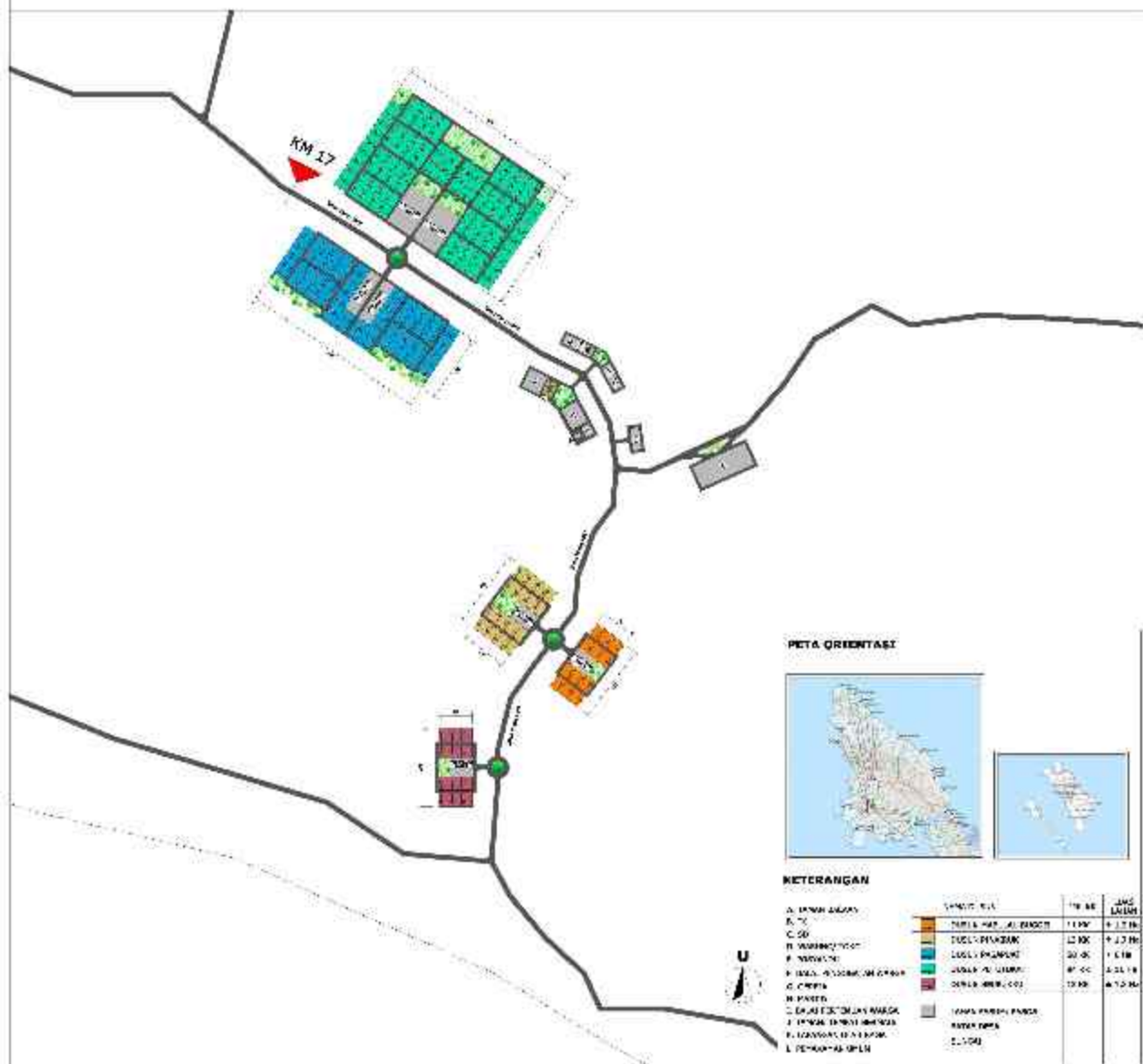
INVENTARISASI KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI series PERCEPATAN PEMBANGUNAN
di WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT 2011 - 2013
25 Oktober 2010
Status : 9 Januari 2011

Sektor / Sub Sektor	Strana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
LINTAS SEKTOR		31,584	-	-	-	10,025.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-
1. Pemerintahan		16,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Dijen Pemerintahan Umum												
	Bangunan Kantor												
	Kantor Kepala Desa	300											
	Gedang Perhubungan	600											
	Kantor Camat	4.500											
	Rumah Dinas Camat	2.025											
	Basis Pertemuan warga	375											
	Basis Pertemuan warga	375											
	Basis Pertemuan warga	375											
	Basis Serbaguna	1.250											
	Basis Pertemuan warga	375											
	Basis Pertemuan warga	375											
	Basis Pertemuan warga	375											
	Kantor EPED*	2.600											
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Dijen Mandikdasmen												
	Rumah Dinas Guru SD	113											
	Rumah Dinas Guru SD	113											
		225											
	Rumah Dinas Guru SD	225											
		225											
	Rumah Dinas Guru SMP	225											
	Rumah Dinas Guru SMA	225											
	Rumah Dinas Guru SD	225											
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Kementerian Kesehatan												
	Rumah Dinas Dokter	113											
	Restorasi sistem dan data keperawatan pendataan ulang	1.000											
	Penyusunan, penguatan dan penyelenggaraan PB Daerah	750											
2	Kelatihan dan Keamanan (TNIPOLRI)	286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Uo. Kemhan												
	Bangunan Kantor												
	Kantor Koramil	11											

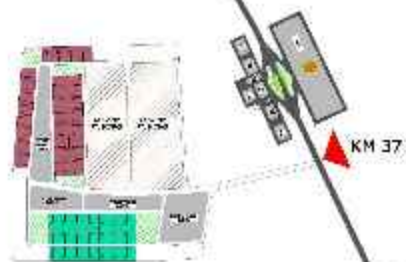
Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pendanaan 2011				Kebutuhan Pendanaan 2012				Kebutuhan Pendanaan 2013			
		APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Non Pemerintah
	Kantor Koramil	11											
	Kantor POLSEK	11											
	Kantor POLSEK	11											
	Pos harap	30											
	Pos harap	30											
	Pos harap	30											
	Pos harap	30											
	Pos harap	30											
	Pos harap	30											
3	Lingkungan Hidup:	4,787	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitasi rumah mangrove	787											
	Pertanian daerah pedesaan	200											
	Program pengelolaan perikanan nasional												
	Pengaluran dan Penetapan Hak Tanah	2.500				2.500,00				2.500,00			
	Pengaluran dan Penetapan Hak Tanah	1.000				1.000,00							
	Pendidikan desa hidup ramah lingkungan	300											
4	Pengurangan Risiko Bencana	9,525	0,00	0,00	0,00	6,025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Penanggulangan Bencana												
	Pengujian dan Pengurangan Risiko Bencana	2.500											
	Pengujian dan pengembangan INA-TEWS	2.500				2.500,00							
	Sosialisasi dan diseminasi serta Pengembangan SOP	500											
	Diseminasi sistem peringatan dini tsunami dan informasi	2.525				2.525,00							
	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi,												
	Pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG	500				500,00							
	Pengelolaan Ilim Agroklimat dan Ilim Maritim BMKG	500				500,00							
	Pengelolaan Database Dinkg	500											
	TOTAL	31,584	0,00	0,00	0,00	10,025	0,00	0,00	0,00	2,500	0,00	0,00	0,00

**PETA USULAN LOKASI RELOKASI
DIRJEN PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

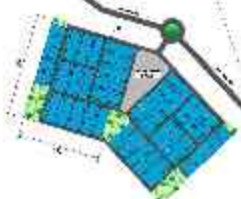
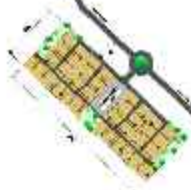
MODEL HUNIAN TETAP DI LOKASI RELOKASI KM 17, PULAU PAGAI UTARA



**MODEL HUNIAN TETAP
DI LOKASI RELOKASI KM 37 s.d. KM 41, PULAU PAGAI SELATAN**



KM 37



PETA ORIENTASI



KETERANGAN

- 1. TAMAN BUNGA
- 2. TV
- 3. SD
- 4. P-F
- 5. SMO
- 6. KANTOR LUB
- 7. POLSITUB
- 8. TALLA "KORONTALA" MASEH
- 9. GAZON
- 10. HATIB
- 11. PANGKALAN JETTY
- 12. BUKIT BUKIT
- 13. TAMPILAN BENTANG
- 14. PANGKALAN P-F
- 15. PANGKALAN JPM

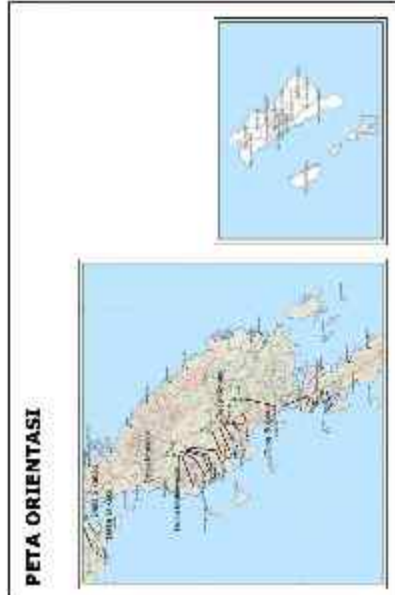
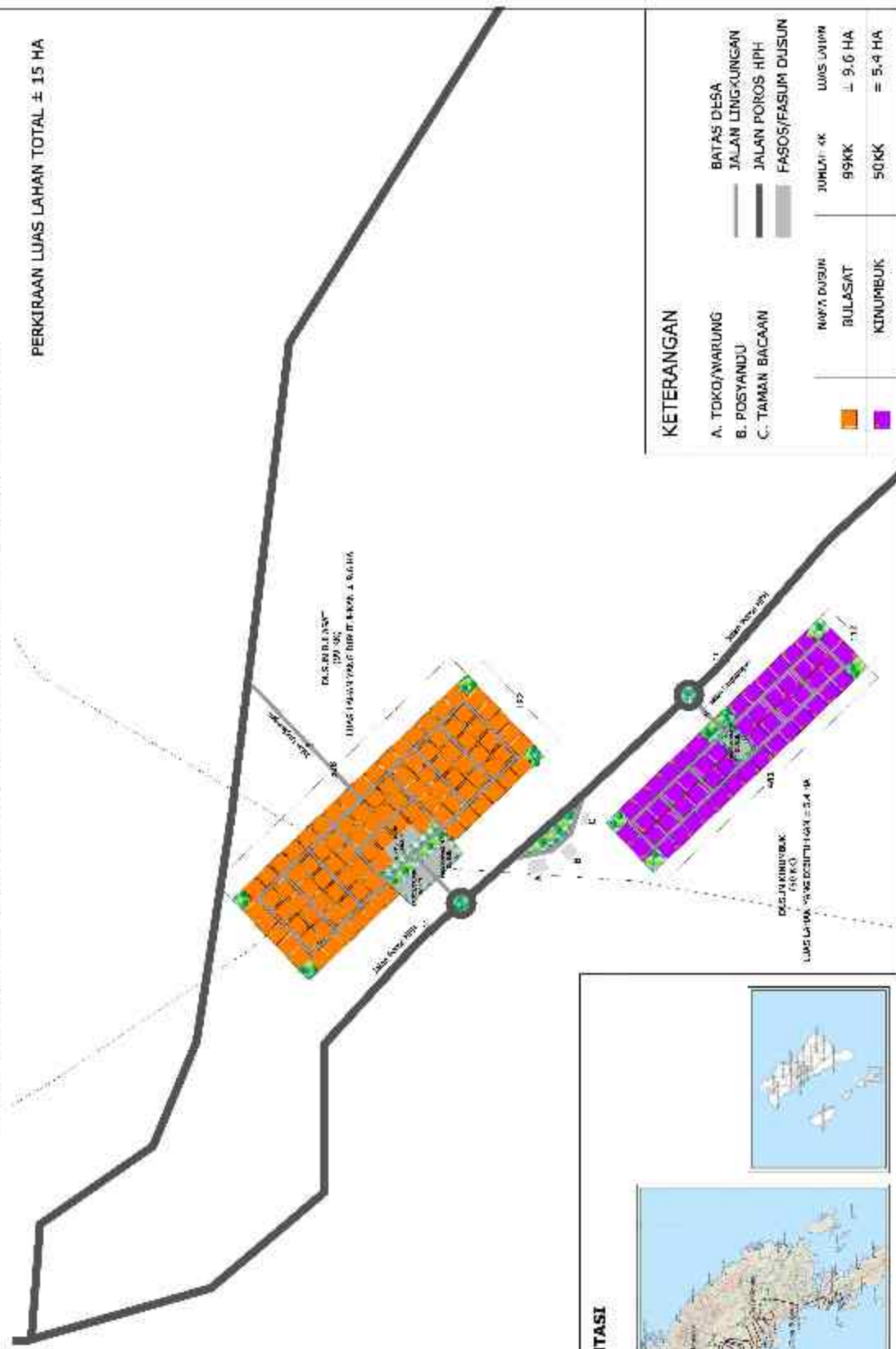
MODEL TUNJUK	SPESIFIKASI	LUAS	LOKASI
[Orange Box]	RELOKASI ORANGE	48.50	0.40
[Yellow Box]	RELOKASI KUNING	37.50	0.40
[Blue Box]	RELOKASI BIRU	37.50	0.40
[Green Box]	RELOKASI HIJAU	28.50	1.25
[Red Box]	RELOKASI MERAH	41.50	1.25
[Grey Box]	RELOKASI GRAY		



MODEL HUNIAN TETAP DI LOKASI RELOKASI KM 41 s.d. KM 46, PULAU PAGAI SELATAN



PERKIRAAN LUAS LAHAN TOTAL ± 15 HA



KETERANGAN

A. TOKO/WARUNG	BATAS DESA	JUMLAH KK	LUAS LAHAN
B. POSYANDU	JALAN LINGKUNGAN	99KK	± 9,6 HA
C. TAMAN BACAAN	JALAN POROS HPH	50KK	= 5,4 HA
	FASOS/FASUM DUSUN		

PETA ORIENTASI

MODEL HUNIAN TETAP DI LOKASI RELOKASI LAKKAU, PULAU PAGAI SELATAN

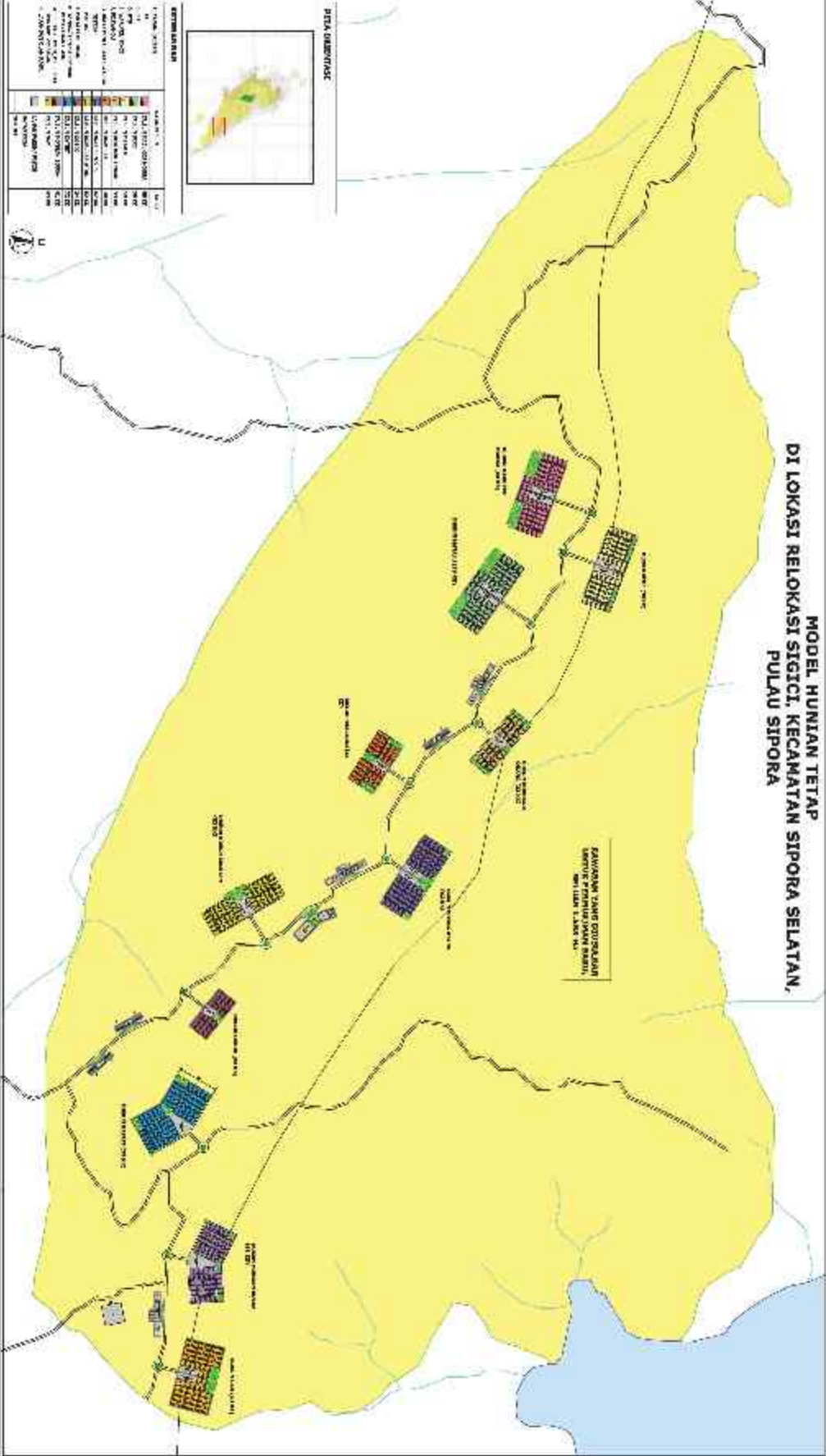


KETERANGAN

- A. PASARE
- B. TK
- C. SD
- D. POSRAMBU
- E. BALAI PERKELUA
- F. GEREJA
- G. MESJID
- H. BALAI KESPHA'AMA

DUSUN	JML. KK	LUMS LAHAN
DUSUN TIMOSUA	62 KK	≅ 11 Ha
DUSUN SURAT ASAN	105 KK	≅ 18 Ha
DUSUN LAKKAOU	19 KK	≅ 4 Ha
DUSUN MAHPANG	42 KK	≅ 8 Ha
DUSUN MOWAL	28 KK	≅ 7 Ha
DUSUN LAMU	34 KK	≅ 7 Ha
LAHAN PASURY PASUD		

**MODEL HUNIAN TETAP
DI LOKASI RELOKASI SIGICI, KECAMATAN SIPORA SELATAN,
PULAU SIPORA**

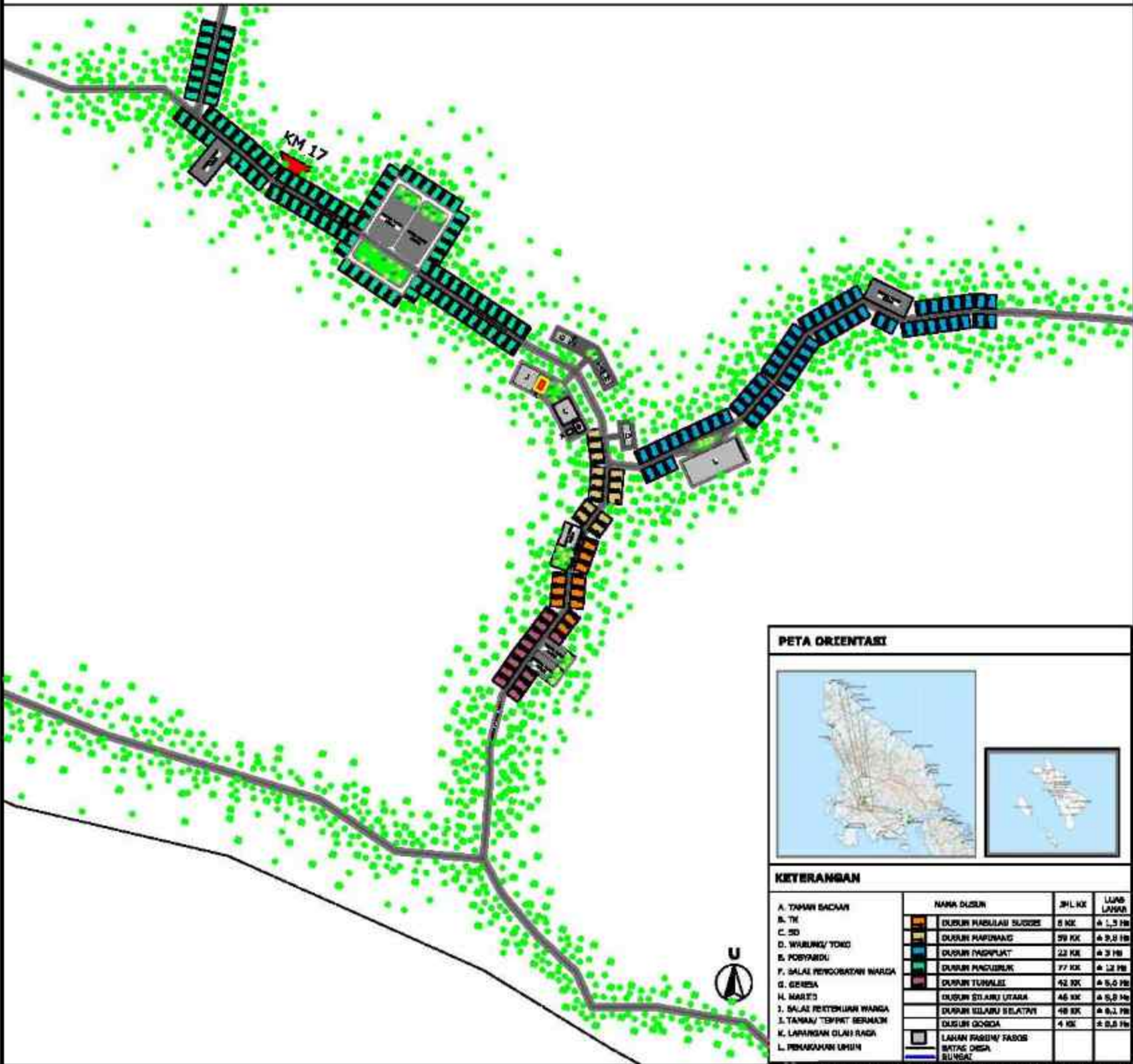


REKAMEN DAN DATA

1. NAMA	2. NO.	3. JENIS	4. LUAS (M ²)	5. TINGGI (M)	6. JENIS BAHAN	7. NO. URUT
1. JALAN	101	ASPAK	100	3	ASPAK	1
2. JALAN	102	ASPAK	100	3	ASPAK	2
3. JALAN	103	ASPAK	100	3	ASPAK	3
4. JALAN	104	ASPAK	100	3	ASPAK	4
5. JALAN	105	ASPAK	100	3	ASPAK	5
6. JALAN	106	ASPAK	100	3	ASPAK	6
7. JALAN	107	ASPAK	100	3	ASPAK	7
8. JALAN	108	ASPAK	100	3	ASPAK	8
9. JALAN	109	ASPAK	100	3	ASPAK	9
10. JALAN	110	ASPAK	100	3	ASPAK	10
11. JALAN	111	ASPAK	100	3	ASPAK	11
12. JALAN	112	ASPAK	100	3	ASPAK	12
13. JALAN	113	ASPAK	100	3	ASPAK	13
14. JALAN	114	ASPAK	100	3	ASPAK	14
15. JALAN	115	ASPAK	100	3	ASPAK	15
16. JALAN	116	ASPAK	100	3	ASPAK	16
17. JALAN	117	ASPAK	100	3	ASPAK	17
18. JALAN	118	ASPAK	100	3	ASPAK	18
19. JALAN	119	ASPAK	100	3	ASPAK	19
20. JALAN	120	ASPAK	100	3	ASPAK	20

**PETA USULAN LOKASI RELOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

ALTERNATIF MODEL HUNIAN TETAP DI LOKASI RELOKASI KM 17, PULAU PAGAI UTARA



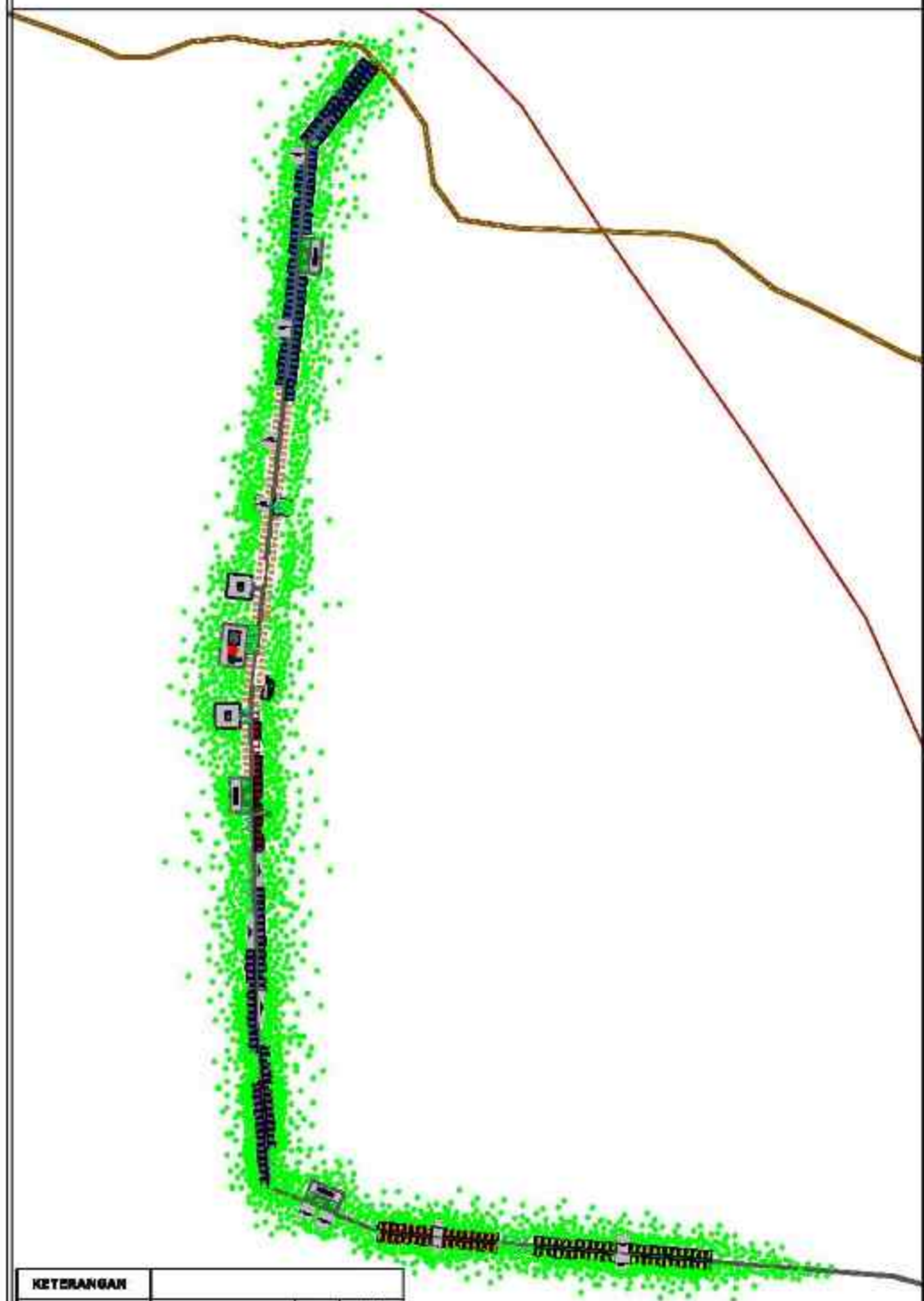
PETA ORIENTASI



KETERANGAN

	NAMA DUSUN	JML. KK	LUMB. LAYAN
A. TAMAN BACAAN			
B. TK			
C. SD			
D. WARUNG/ TOKO			
E. POSYANDU			
F. SALAZ PERKOBATAN WARGA			
G. GEREJA			
H. MARET			
I. SALAZ POKTUKHUN WARGA			
J. TANJAN/ TEMPAT BERMAIN			
K. LAYANGAN OLIMPI RAGA			
L. PEMAKAMAN UMUM			
	DUSUN PARULUAI SUDUK	5 KK	4 1,3 PB
	DUSUN PARUPANG	59 KK	4 3,2 PB
	DUSUN PARUPILAKT	22 KK	4 3 PB
	DUSUN PARULURUK	77 KK	4 12 PB
	DUSUN TURMALI	42 KK	4 5,0 PB
	DUSUN SELAMU UTARA	46 KK	4 5,2 PB
	DUSUN SELAMU SELATAN	48 KK	4 6,1 PB
	DUSUN GOGGA	4 KK	2 0,8 PB
	LAHAN PASIR/ PASOB		
	BATAS DESA		
	BUNGA		

MODEL HUNIAN TETAP DI LOKASI RELOKASI KM 27, PULAU PAGAI SELATAN

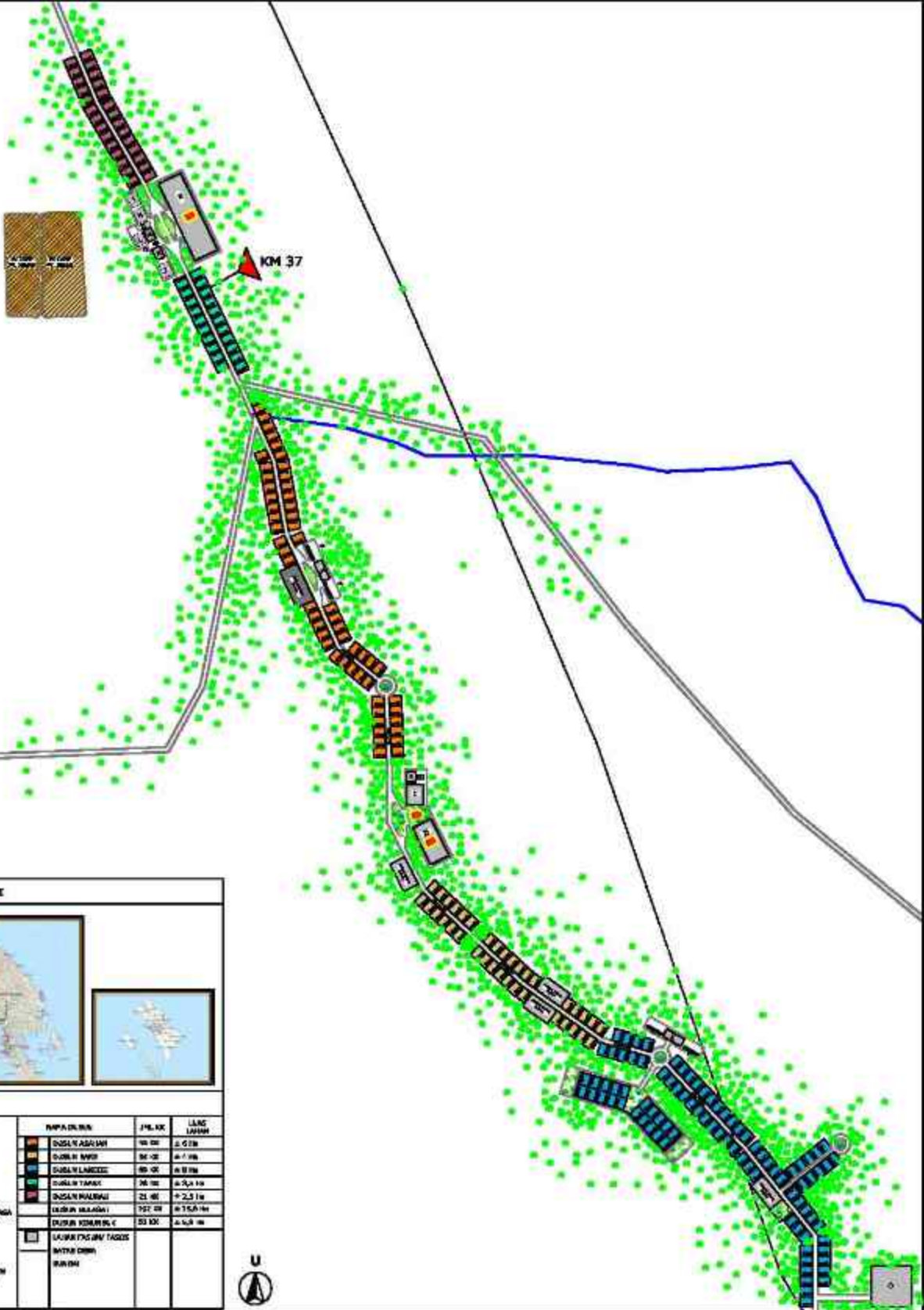


KETERANGAN

- A. PASAR
- B. TK
- C. SD
- D. KOSTANBU
- E. BALAI PESTERIAK
- F. WERESA
- G. HEDSID
- H. BALAI KEMAHAYAN

NAMA DESUR	JML KK	LINDA LA-MN
D.1. BUN. BUK. PARAGAT	77 KK	± 6.5 Ha
D.2. BUN. PONDOKGAT	79 KK	± 13 Ha
D.3. BUN. SANDIKAT	82 KK	± 9 Ha
D.4. BUN. M. ATIS KOCIL	21 KK	± 5.5 Ha
D.5. BUN. RUMIT BESAR	41 KK	± 7 Ha
LAJUR TAYUW TADIS		

**MODEL HUNIAN TETAP
DI LOKASI RELOKASI KM 37 s.d. KM 41, PULAU PAGAI SELATAN**



KM 37

PETA ORIENTASI



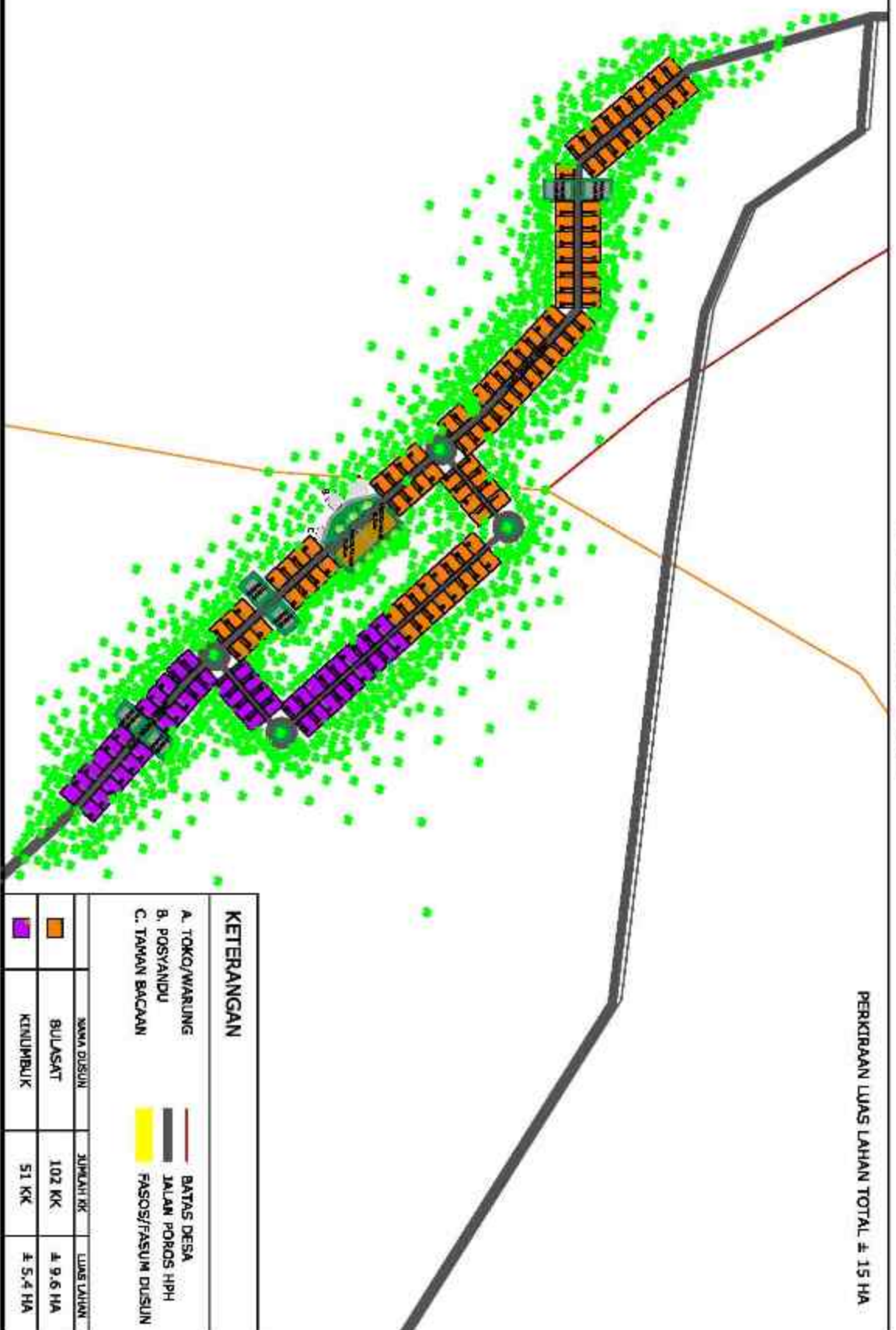
KETERANGAN

	WUJUD BUNYI	JML. KK	LUAS LURUH
A. TAMAN BUNGA			
B. TE		10 KK	± 0,75 ha
C. SD		30 KK	± 7,5 ha
D. SMP		60 KK	± 15 ha
E. SMA		30 KK	± 7,5 ha
F. MARUNG' TOKO & POSYANDU		21 KK	± 2,5 ha
G. BALAI BERKEMAHAN MANGA		100 KK	± 15,0 ha
H. GEDUNG		30 KK	± 4,0 ha
I. PASIR			
J. PAKSI L'YONG' NYAH			
K. SALAN SEKANGEM			
L. TAMBUK' TRIMAT' KAPASAH			
M. LAMPING' OLAK' SAGA			
N. PERUMAHAN' JEMAH			
		LAJUR PUSAT TAGESS	
		BATAS DESA	
		BUNYI	



**MODEL HUNTAP KM 41-46
PULAU PAGAI SELATAN**

PERKIRAAN LUAS LAHAN TOTAL ± 15 HA



KETERANGAN

- A. TOKO/WARUNG
- B. POSYANDU
- C. TAMAN BACAAN

-  BATAS DESA
-  JALAN POROS HPH
-  FASOS/FASUM DUSUN

NAMA DUSUN	JUMLAH KK	LUAS LAHAN
BULASAT	102 KK	± 9,6 HA
KINULMIBUK	51 KK	± 5,4 HA



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 188.45-320 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN SK NO.188.45-288 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI RELOKASI
PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA MASYARAKAT KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
TANGGAL 25 OKTOBER 2010 DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA KECAMATAN PAGAI UTARA,
PAGAI SELATAN DAN SIPORA SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2010

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan masyarakat korban gempa bumi dan tsunami tanggal 25 Oktober 2010, dipandang perlu melakukan relokasi pembangunan hunian sementara masyarakat ke lokasi-lokasi yang dianggap aman dari tsunami dan memudahkan untuk membangun sarana prasarana pendukung lainnya serta perubahan jumlah Kepala Keluarga;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditelapkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2010;
- Memphatikan : Hasil musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan penentuan Hunian Sementara pasca gempa bumi dan tsunami Tanggal 25 oktober 2010 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lokasi Relokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) pasca gempa bumi dan tsunami untuk masyarakat dan perubahan jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Keluarga (KK) dan Dusun Tepi Pantai/Zona Merah yang rawan tsunami sesuai dengan lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran bantuan dari berbagai pihak yang tidak mengikat dan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tuapeijat
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



EDISON SALELEUBAJA

**REKAPITULASI DATA RELOKASI PEMUKIMAN MASYARAKAT
YANG TERKENA GEMPA DAN TSUNAMI 25 OKTOBER 2010
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	KK	VERIFIKASI	JIWA YANG MUNGUNSI	RUMAH		LOKASI RELOKASI
							RB	RELOKASI	
1	Pagai Selatan	Malakopa	Sabbiret	62	0	210	62	62	Km. 27 Poros Jl. Pagai Selatan
			Muntei Kecil	31	0	126	0	31	Km. 27 Poros Jl. Pagai Selatan
			Muntei Besar	41	0	166	0	41	Km. 27 Poros Jl. Pagai Selatan
			Eru Paroboat	72	5	215	72	77	Km. 27 Poros Jl. Pagai Selatan
			Purourougat	79	0	235	79	79	Km. 37 Poros Jl. Pagai Selatan
	JUMLAH			285	5	952	213	290	
	Pagai Selatan	Bulasat	Limu	34	0	148	11	34	Km. 2 - 7 Logpond Lakkau
			Mapinang	0	46	312	0	46	Km. 2 - 7 Logpond Lakkau
			Maonai	34	1	139	34	35	Km. 2 - 7 Logpond Lakkau
			Lakkau	19	0	70	19	19	Km. 2 - 7 Logpond Lakkau
			Limosua	42	-1	180	34	41	Km. 2 - 7 Logpond Lakkau
			Surat Aban	109	1	481	0	110	Km. 2 - 7 Logpond Lakkau
	JUMLAH			238	47	1330	98	285	
	Pagai Selatan	Bulasat	Asahan	54	1	0	0	55	Km. 37 - 40 Poros Jl. Pagai selatan
			Bake	36	0	132	4	36	Km. 37 - 40 Poros Jl. Pagai selatan
			Laggigi	68	0	256	0	68	Km. 37 - 40 Poros Jl. Pagai selatan
			Maurau	21	0	88	0	21	Km. 37 - 40 Poros Jl. Pagai selatan
			Tapak	28	0	116	25	28	Km. 37 - 40 Poros Jl. Pagai selatan
			Bulasat	99	3	402	1	102	Km. 41 - 46 Poros Jl. Pagai selatan
			Kinumbuk	50	1	185	27	51	Km. 41 - 46 Poros Jl. Pagai selatan
	JUMLAH			356	5	1179	57	361	
	Pagai Utara	Betumonga	Muntei	65	0	193	65	65	Jalur 8 KM 4 Trans Taikako
			Baru Baru	23	0	90	23	23	Jalur 8 KM 4 Trans Taikako
			Sabeu Gunggung	53	0	149	53	53	Jalur 8 KM 4 Trans Taikako
	JUMLAH			141	0	432	141	141	
	Pagai Utara	Silabu	Tumalei	42	0	198	43	42	Km. 17 Jl. Poros Pagai Utara
			Gogoa	4	0	17	4	4	Km. 17 Jl. Poros Pagai Utara

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	KK	VERIFIKASI	JIWA YANG MENGUNGS!	RUMAH		LOKASI RELOKASI
							RB	RELOKASI	
			Silabu Utara	0	46			46	Km. 17 Jl. Poros Pagai Utara
			Silabu Selatan	0	48			48	Km. 17 Jl. Poros Pagai Utara
			Maguiruk	0	77			77	Km. 17 Jl. Poros Pagai Utara
			JUMLAH	46	171	215	47	217	
	Sikakap	Taikako	Ruamonga	18	-2	71	16	16	Belakang Perkampungan Lama
			Bulak Monga	0	60			60	KM 5 Trans Taikako
			JUMLAH	18	58	71	16	76	
	Pagai utara		Mapinang	59	0	312	0	59	Km. 2 Lokpon Lakkau
			Pasapat	123	-101	570	22	22	Belakang Perkampungan Lama
			Mabulau Buggei	8	0	-	8	8	Belakang Perkampungan Lama
			JUMLAH	190	-101	882	30	89	
	Sipora Selatan	Bosua	Bosua Utara	62	0		23	62	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Bosua Selatan	51	0		25	51	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Gobik	24	0		24	24	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Katiet	72	0		0	72	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Sao	93	0		14	93	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Mongan Bosua	61	0		0	61	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			JUMLAH	363	0	0	86	363	
		Beriulou	Bere	58	0		58	58	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Mabukuk Monga	59	0		59	59	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Matalu	62	0		4	62	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Masokut (Masokut Rualelu)	38	0		38	38	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			Masokut (Rokdang Oinan)	33	0		33	33	Km. 4 - 9 Desa Beriulou
			JUMLAH	250	0	0	192	250	
TOTAL								2.072	

